

Menapak Pemikiran

Syahrul Yasin Limpo

Sektor pertanian merupakan bagian penting dalam perjalanan karir Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selama 25 tahun, SYL menjabat sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan dan merasakan peran pertanian sebagai penopang utama pembangunan Sulawesi Selatan. Pengalaman tersebut kemudian dibawa saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2019 hingga sekarang. Apalagi pertanian Indonesia merupakan jantung perekonomian nasional sekaligus mata pencaharian bagi puluhan juta petani yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

SYL menyadari bahwa pertanian harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Semangat "Pertanian Maju, Mandiri, Modern" yang dibawa SYL ke Kementerian Pertanian merupakan bukti komitmennya untuk mewujudkan pertanian yang inovatif. Untuk itu, pemerintah sebagai fasilitator dan semua pelaku pertanian sebagai penggerak harus mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran baru berupa inovasi dan teknologi. Kerja bersama dilakukan demi mendorong pertanian Indonesia sehingga bisa mengikuti perubahan dunia yang terus bergerak maju. Cita-cita tak lagi sekedar untuk membangun kemandirian pangan nasional, tapi berupaya membawa pertanian Indonesia ke kancah ekonomi global.

Pemikiran dan gagasan SYL tentang sektor pertanian yang terangkum dalam buku ini merupakan kumpulan tulisan opini yang dituangkan oleh penulis Kuntoro Boga Andri dan Imam Mujahidin Fahid, serta telah terbit di beberapa koran nasional. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua pelaku sektor pertanian dalam memajukan pembangunan pertanian ke depan.

Menapak Pemikiran
Syahrul Yasin Limpo

SYAHRUL YASIN LIMPO



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. : 62 21 7806202, Faks. 62 21 7800644



ISBN 978-602-6916-58-7

9 786026 916587



Menapak
Pemikiran
Syahrul Yasin Limpo

SYAHRUL YASIN LIMPO

Menapak Pemikiran

Syahrul Yasin Limpo

PENULIS:

SYAHRUL YASIN LIMPO

KUNTORO BOGA ANDRI

IMAM MUJAHIDIN

MENAPAK PEMIKIRAN SYAHRUL YASIN LIMPO

Syahrul Yasin Limpo

©Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022

Hak cipta dan hak penerbitan dilindungi Undang-Undang
Kementerian Pertanian, 2022

Katalog dalam terbitan (KDT)

LIMPO, Syahrul Yasin

Menapak pemikiran Syahrul Yasin Limpo/penulis, Syahrul Yasin Limpo, Kuntoro Boga Andri, dan Imam Mujahidin; editor, Sumarno. -- Jakarta: Balitbangtan, 2022.

viii, 179 hlm.; ill.; 25 cm.

ISBN: 978-602-6916-58-7

- | | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| 1. Pertanian Masa Depan | 2. Ketahanan Pangan | 3. Diversifikasi Pangan |
| 4. Pertanian menghadapi Pandemi dan Krisis | | 5. Ekonomi Nasional |

I. Judul II. Andri, Kuntoro B. III. Mujahidin, I. IV. Sumarno

631.1

Penulis:

Syahrul Yasin Limpo

Kuntoro Boga Andri

Imam Mujahidin

Editor:

Sumarno

Desain:

Syarifah Hanoum

Penerbit:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merilis buku “Menapak Pemikiran Syahrul Yasin Limpo”. Sebelumnya tak terpikirkan bahwa perbincangan dan diskusi kami dengan kawan-kawan tentang pertanian ternyata dapat dituangkan dalam tulisan-tulisan yang pada akhirnya bisa diwujudkan dalam sebuah buku.

Bidang pertanian merupakan bagian penting dalam perjalanan karir seorang Syahrul Yasin Limpo. Sebelum diberi kepercayaan sebagai Menteri Pertanian, selama 25 tahun menjabat sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan, pertanian tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kami. Pertanian merupakan penopang utama pembangunan Sulawesi Selatan. Maka layaknya jantung bagi tubuh manusia, sektor pertanian perlu terus dipompa, sehingga perekonomian Sulawesi Selatan bisa terus berjalan maju kala itu.

Dalam kancah nasional, pertanian bagi Indonesia pun merupakan jantung perekonomian Indonesia. Sebagai sebuah lapangan usaha, pertanian Indonesia merupakan topangan bagi puluhan juta petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Ekonomi Indonesia yang kuat hingga saat ini, ditopang dengan sektor pertanian yang kuat. Nasib pangan nasional untuk 267 juta rakyat bergantung pada sektor pertanian. Tak ada gerak ekonomi, bila tak ada makanan. Nilai ekonomi bahan pangan mencapai tidak kurang dari Rp 20 triliun perhari, atau Rp 7.300 triliun pertahun. Belum lagi produk pertanian bahan baku industri dan turunannya.

Dengan peran penting tersebut, pertanian harus menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia. Pemikiran-pemikiran baru berupa inovasi dan teknologi perlu terus dilahirkan, sehingga pertanian Indonesia tidak lagi terkungkung dalam kemasan tradisional dan tertinggal. Cita-cita terbesar kami melihat pertanian Indonesia bisa bergerak maju, mandiri dari hulu ke hilir, serta dilakukan dengan praktik-praktik modern dan inovatif.

Berangkat dari peran besar pertanian bagi kemaslahatan bangsa Indonesia, pemikiran-pemikiran dalam buku ini lahir. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan penulis yang telah menuangkan pemikiran-pemikiran ini dalam bentuk tulisan yang sebelumnya juga telah dipublikasi diberbagai surat kabar, antara lain Kompas, Media Indonesia, Republika, dan surat kabar nasional lainnya.

Kawan penulis kami yang pertama adalah Kuntoro Boga Andri, yang mendampingi kami sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Beliau merupakan rekan yang handal dalam menangkap ide dan pemikiran kami untuk disampaikan kepada publik.

Kawan penulis yang kedua adalah Imam Mujahidin. Di samping tugas beliau sebagai Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Hasanuddin, masih berkenan untuk membantu kami sebagai Staf Khusus Kementerian Pertanian.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada kawan-kawan yang penuh semangat memberikan masukan dan mengajak berdiskusi segala hal tentang pertanian, terutama para petani, penyuluh, akademisi, legislator, hingga para pelaku usaha tani di seluruh penjuru Indonesia. Kawan-kawan tersebut telah menjadi sumber inspirasi utama dari pemikiran-pemikiran ini.

Pada akhirnya, kami mengharapkan buku ini dapat bermanfaat dan bisa membantu lahirnya pemikiran-pemikiran lainnya yang lebih maju dan inovatif untuk kemajuan pertanian kita. Maju terus pertanian Indonesia!

Jakarta, Januari 2021

Syahrul Yasin Limpo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagai bangsa yang berada dinegara terdekat dengan garis katulistiwa dengan iklim tropis dan hujan mushroom, Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang kaya dan beragam. Sumber daya alam hayati ini adalah salah satu kekuatan yang tidak bisa tergantikan nilainya. Sehingga wajar pada awalnya sebelum ada revolusi industri bila mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian. Usaha pertanian merupakan fakta historis budaya kehidupan bangsa Indonesia yang akan tetap lestari, dibalik perubahan dan kemajuannya.

Maka ketika dunia terus bergerak maju, pertanian Indonesia perlu didorong untuk maju, berinovasi dan mengadopsi teknologi baru, serta menjadi bagian dari revolusi industri berbasis teknologi 4.0. Kehadiran inovasi perlu dimaksimalkan sehingga Indonesia bisa mengakselerasi kemajuan pertanian. Inovasi juga bisa menjadi katalisator untuk membawa pertanian Indonesia ke kancan ekonomi global.

Semangat “Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, Modern” yang digaungkan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak menjabat Menteri Pertanian pada Oktober 2019, bisa diartikan sebagai komitmen beliau untuk sektor ini terus berbenah. Komitmen SYL untuk memajukan sektor pertanian Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman menjadi kepala daerah selama 25 tahun di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadikan SYL memahami sektor pertanian, tapi turut terlibat dalam sektor pertanian dan pencapaian Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan Nasional.

Memahami persoalan pertanian tidak cukup hanya soal teori, apalagi sebatas retorika. Seperti yang sering disampaikan SYL, bahwa sektor pertanian menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya berbasis pada teori, tapi juga diperkaya dengan pengalaman di lapangan.

Pemikiran dan gagasan SYL tentang sektor pertanian yang terangkum dalam buku ini, merupakan kumpulan tulisan-tulisan opini yang telah terbit di beberapa koran nasional seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Sindo, Indopos, Suara Pembaruan dll, yang ditulis oleh penulis Kuntoro Boga Andri, (Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan), maupun oleh Imam Mujahidin Famid (Staf Khusus Menteri Pertanian, Bidang Kebijakan).

Kita berharap bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam tulisan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi pejabat lingkup Kementan dan bagi para pelaku sektor pertanian dalam memajukan pembangunan pertanian ke depan. Bagaimana pun, kita harus mampu memanfaatkan kesempatan dan momentum untuk menjadikan sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Nasional dan harapan bangsa.

Jakarta, Januari 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PERTANIAN MASA DEPAN.....	1
Memulai Pertanian Masa Depan.....	3
Pertanian Maju, Mandiri, Modern.....	7
Pertanian Modern dan Teknologi.....	13
Memacu Teknologi 4.0 dalam Pertanian.....	17
Babak Baru Implementasi AI Pertanian.....	21
Teknologi Pertanian Era Milenial.....	25
3M Peradaban Baru dalam Pembangunan Pertanian.....	29
PERTANIAN BERKELANJUTAN.....	33
Gebrakan Mentan Syahrul Sediakan Pangan Rakyat.....	35
Mengenalkan Pertanian di Sekolah.....	39
Cegah Konversi Lahan Pertanian untuk Penyediaan Pangan Masa Depan.....	43
Penyelamatan Lahan Pertanian.....	49
Benih <i>In-situ</i> Berbasis Korporasi.....	53
KUR untuk Pertanian.....	57
Partisipasi Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani.....	61
Kepedulian Negara Kepada Petani.....	65
KETAHANAN PANGAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN.....	71
Melawan Rawan Pangan.....	73
Bukan Hanya Beras.....	77
Menjaga Pangan.....	81
Merayakan Diversifikasi Pangan pada di Hari Fitri.....	85

Strategi Penyediaan Pangan Menghadapi Pandemi	91
Ketahanan Pangan di Daerah	97
Merdeka Pangan	101
PERTANIAN MENGHADAPI PANDEMI DAN KRISIS	105
Pertanian Meredam Krisis.....	107
Menjaga Ketangguhan Pertanian di Tengah Krisis	113
Sektor Pertanian Andalan Hadapi Krisis	117
Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi	121
Kerja Pertanian di Tengah Pandemi	125
Kemandirian Pangan di Tengah Pandemi	129
Normal Baru Pertanian.....	133
Agripreneur Menjawab <i>New normal</i> Pertanian.....	137
PERTANIAN TULANG PUNGGUNG EKONOMI NASIONAL	141
Pertanian untuk Perekonomian Bangsa	143
Kolaborasi Memajukan Pertanian Indonesia	147
Sinergi Membangun Pertanian	151
Hibridasi Pembangunan Pertanian	155
Diplomasi Ekspor Pertanian	159
Gratieks, Ekosistem Pertanian	163
Ekspor dan Kesejahteraan Petani	167
Pertanian Penyelamat Ekonomi.....	171
RIWAYAT PENULIS	177

Pertanian Masa Depan



MEMULAI PERTANIAN MASA DEPAN

Cepat atau lambat petani kita harus melakukan banyak lompatan inovasi. Pergerakan maju dalam sektor pertanian bisa terjadi jika petani sebagai pelaku utama bersikap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Petani mutlak harus gesit dan cekatan dalam mengaplikasikan inovasi dan teknologi baru.

Pergerakan cepat teknologi saat ini memang perlu dikejar dengan kecepatan tinggi oleh para pelaku sektor pertanian. Apalagi sekarang dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan mesin otomatis terintegrasi jaringan internet yang merasuki semua aktivitas sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat semua sektor berevolusi, berubah menjadi lebih cepat dan efisien.

Sektor pertanian juga turut dipacu untuk mengadopsi teknologi tersebut. *Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)*, telah memprediksi pada tahun 2030-an akan ada penurunan drastis produksi pertanian di berbagai kawasan di dunia karena perubahan iklim global. Tidak terkecuali Indonesia.

Tantangan besar tersebut tak ayal mendorong kita semua untuk mencari solusinya. Terlebih prediksi produksi pertanian yang menurun juga dibarengi pertumbuhan penduduk yang terus melonjak. Kondisi tersebut mengharuskan kita untuk melibatkan teknologi dalam kegiatan pertanian.

Pertanian Presisi

Salah satu konsep pengembangan teknologi dalam pertanian dikenal dengan istilah pertanian presisi (*precision agriculture*). Pertanian presisi adalah istilah baru yang diciptakan untuk praktik pertanian yang secara beragam dideskripsikan sebagai “pertanian resep”, praktik “spesifik lokasi”, “teknologi tingkat variabel” dan istilah pendukung lainnya.

Filosofi dasar pertanian presisi adalah untuk mengukur dan mengelola variabilitas seperti hasil, tanah, hama, dan gulma di seluruh lahan yang ada

untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan praktik pertanian dalam sistem usaha tani. Dengan cara ini, produktivitas, kualitas produk dan pengembalian ekonomi bisa lebih optimal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meminimalkan dampak lingkungan dan risiko pertanian.

Pertanian presisi tidak asal bertani. Dikarenakan perbedaan setiap lahan, petani masa depan menggunakan satelit images, *drone*, dan alat geografi lainnya. Untuk mendiagnosis masalah dan melihat peluang yang tersedia, langkah yang dilakukan adalah obeservasi jenis tanaman yang cocok ditanam pada lahan pertanian. Kemudian, akan dibangun sistem sensor di lahan pertanian untuk mengukur kelembapan dan suhu dari tanah dan udara sekitar lahan, serta menentukan dosis pemupukan.

Pertanian presisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas setiap meter persegi lahan pertanian yang ada. Karena itu, petani membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi tanah. Pemberian air, pupuk, ataupun pestisida secara efektif digunakan hanya pada tempat yang membutuhkan.

Apakah cara bertani seperti ini bisa segera dilakukan di Indonesia? Bisa. Kementerian Pertanian saat ini menitikberatkan pendekatan pertanian presisi. Kelompok-kelompok tani didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penyedia *big data* untuk meningkatkan hasil pertanian nasional agar mampu mengakses informasi pertanian presisi.

Pertanian berskala besar di beberapa negara telah menggunakan teknologi yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Mereka sudah memiliki peralatan bertani yang dapat menanam benih pada kepadatan tanah dan kegemburan tanah yang berbeda. Mereka juga sudah mampu memberikan jumlah pupuk yang berbeda di berbagai lahan. Tidak asal sebar, dan tidak asal memberi pupuk. Bahkan, aliran air pun terus dimonitor. Tujuannya agar dapat memberi petani data secara *real-time* tentang berapa banyak air yang diterima tanaman.

Bagaimana di Indonesia? Saat ini sudah banyak perusahaan *start up* dan perusahaan komersil yang sedang mengembangkan sistem manajemen pertanian dengan memanfaatkan teknologi *big data analytics* yang berbasis analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan *drone* yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem yang dikembangkan tersebut dirangkai dalam tiga produk, yaitu *Crop Accurate*, *Agritrack* dan *Crop Insurance*. Nantinya, sistem tersebut akan dapat di-*subscribe* per hektare lahan untuk petani, agregator petani, pembeli, peneliti maupun pemerintah.

Dalam penggunaannya, produk *Crop Accurate* akan memanfaatkan sistem sensor, *drone*, dan *remote sensing* untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh sistem *smart farming*. Sistem tersebut dapat memandu kegiatan bertani para petani binaan agregator (komunitas binaan bank, *microfinance*,

produsen makanan atau komunitas mandiri) sehingga kegiatan bertani dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Sistem *Agritrack* yang dikembangkan untuk merunut pergerakan produk, yakni merupakan sistem informasi terintegrasi untuk *supply chain* komoditas pertanian. Sistem tersebut dirancang untuk menjembatani petani, pembeli produk, supplier, distributor, pasar dan pembeli akhir komoditas dengan memanfaatkan *mobile application* untuk menginput data riil keadaan *supply*, *demand*, dan problem di lapangan pada setiap titik jalur *supply*. Menggunakan sistem ini dapat menyalurkan produk dari wilayah yang surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan produk.

Peran Kostratani dalam Implementasi Teknologi

Kehadiran teknologi hanya akan sia-sia jika tidak bisa diaplikasikan di tingkat akar rumput. Proses peralihan dari pola pertanian tradisional ke modern tidak serta-merta akan berjalan dengan sendirinya. Peran pendampingan menjadi krusial untuk membantu petani dalam mengimplementasikan teknologi dalam proses pertanian dari hulu hingga hilir.

Komando Strategis Petani (Kostratani) yang diusung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan mengemban peran pendampingan tersebut. Kostratani mengangkat konsep pasukan khusus (kopassus) pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Pasukan utamanya tentu saja penyuluh yang terdiri dari PNS, THLTBPP, penyuluh swasta hingga penyuluh swadaya.

Kostratani menjadi entitas penghubung antara pemerintah pusat dan petani. Sebagai bagian dari perannya sebagai penghubung, para penyuluh yang tergabung dalam Kostratani akan mendampingi petani dalam mengadopsi teknologi. Karena itu, penyuluh Kostratani diharapkan inovatif, berinteraksi dengan media sosial, fleksibel, punya rasa ingin tahu yang tinggi dan adoptif terhadap perubahan.

Untuk mengoptimalkan perannya tersebut, Kostratani akan didukung dengan teknologi komputer dan tenaga di bidang informasi (*information technology/IT*). Tujuannya agar penyuluh dapat merekam data yang ada di kecamatan, misalnya data luas sawah, luas tanam, luas panen, produksi, atau bahkan kejadian kekeringan, banjir, hingga serangan hama-penyakit.

Penguatan manajemen data dan informasi tidak hanya memudahkan pendampingan petani di lapangan, tapi juga meningkatkan efektifitas fungsi pembinaan dan evaluasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Data pertanian di tingkat kecamatan tersebut akan terkoneksi dengan ruang kendali di tingkat pusat yang dinamai *Agriculture War Room* (AWR). Melalui AWR, pemerintah

pusat akan lebih mudah memantau dan mengevaluasi sehingga secara mudah bisa menyarankan pemecahan masalah.

Dengan teknologi dan inovasi yang terus dikembangkan dan optimalisasi peran penyuluh melalui Kostratani, tidak akan mengherankan bila nanti petani cukup menggunakan telepon selular untuk mencari solusi masalah dan mengendalikan pertanian. Dan, ini bukan mimpi karena Kementerian Pertanian akan membantu mewujudkannya.

PERTANIAN MAJU, MANDIRI, MODERN

Presiden Joko Widodo mengungkapkan Bangsa ini harus mampu membangun peradaban baru demi mencapai Indonesia Maju. Peradaban baru tentunya bukan hanya sekedar menghadirkan aset-aset fisik, seperti infrastruktur, tapi juga tentang membangun kekuatan sumber daya manusia (SDM). Dengan dukungan SDM yang berkualitas, cita-cita Indonesia Maju bisa terwujud.

Maka dalam konteks pembangunan pertanian, komitmen pemerintah dalam mensejahterakan petani selayaknya tidak perlu dipertanyakan. Petani sebagai pelaku utama produksi pangan merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian Indonesia terletak pada kekuatan para petani. Karena itu, kesejahteraan petani merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Jika menelaah pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disampaikan pada sejumlah kesempatan, komitmen pemerintah dalam mensejahterakan petani telah berulang kali dan secara tegas disampaikan. Bahkan Pak Syahrul meminta jajaran Kementerian Pertanian untuk bekerja keras dan bersinergi dengan semua pihak sehingga sektor pertanian bisa membawa rahmat bagi masyarakat, terutama untuk petani dan keluarganya. Program-program yang sudah mulai dirancang pun bermuara kepada upaya untuk meningkatkan kekuatan petani.

Upaya awal yang sudah dan akan terus dilakukan adalah menyinergikan dan mengoptimalkan program dan anggaran dari kementerian/lembaga lain untuk mendukung pembangunan pertanian. Upaya ini disebut “Menggaling Program dan Anggaran untuk Sektor Pertanian”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filosofi pembangunan pertanian yang akan dikembangkan ke depan adalah *program and budget for agriculture* bukan *program and budget in agriculture*. Melalui upaya ini Kementerian Pertanian menargetkan untuk dapat tumbuh sebesar 5%.

Disadari anggaran di Kementerian Pertanian (*budget in agriculture*) sangat terbatas. Menggaling *resources* dari luar Kementerian Pertanian menjadi pilihan yang rasional. Sinergi program dan anggaran antara Kementerian

Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain akan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan, antara lain: (a) peningkatan produksi dan produktivitas; (b) efisiensi usaha pertanian (rendah biaya); (c) ekspansi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penyediaan air; dan (d) mekanisasi dan dukungan inovasi teknologi.

Untuk mengimplementasikan sejumlah program itu secara baik, Kementerian Pertanian juga menyiapkan skema dukungan permodalan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Arahan langsung dari Menteri Pertanian, alokasi KUR untuk pertanian pada tahun 2020 sebesar Rp 50 triliun dari total KUR Rp 190 triliun. Itu artinya Menteri Pertanian ingin sekitar 26,4 persen dari total KUR masuk ke sektor pertanian.

KUR dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Akses untuk mendapatkan kredit bagi petani harus lebih mudah, strategi perluasan KUR ke petani harus melalui pengendalian hingga ke lapangan langsung agar terorganisir. KUR ini diharapkan dapat memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan usaha pertanian, khususnya yang skalanya kecil, optimalisasi dan perluasan cakupan Asuransi Pertanian juga akan menjadi agenda prioritas Kementerian Pertanian. Skema subsidi dan bantuan premi dari pemerintah lebih diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas secara nyata serta berkeadilan.

Melalui filosofi *program and budget for agriculture*, Kementerian Pertanian mendorong peran swasta dan perbankan lebih besar dalam pembangunan pertanian. Manajemen korporasi akan dijadikan sebagai basis utama. Dengan cara ini, keterlibatan swasta dan perbankan dapat secara nyata memberikan dampak kesejahteraan terhadap petani dan keluarganya.

Pemberlakuan manajemen korporasi diarahkan untuk pengembangan agroindustri yang dapat menciptakan nilai tambah produk sehingga petani bisa menghasilkan produk pertanian hasil olahan yang kompetitif untuk diekspor. Dengan demikian, desain pembangunan pertanian ke depan akan sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan ekspor dan investasi sebagai sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Regenerasi Petani

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani sebetulnya sudah mulai membuahkan hasil. Hal tersebut terlihat dari tren yang terus meningkat dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha

Pertanian (NTUP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Bersumber dari data Badan Pusat Statistik, NTP periode Januari – Oktober 2019 mencapai 102.99, tertinggi selama enam tahun terakhir. Pada periode yang sama, NTP adalah berturut-turut sebagai berikut: 102.07 pada tahun 2014; 101.33 tahun 2015; 101.70 tahun 2016; 100.91 tahun 2017; 102.23 tahun 2018 . Begitupun NTUP Periode Januari – Oktober 2019 mencapai 112.21, tertinggi selama enam tahun terakhir. Pada periode yang sama NTUP adalah berturut-turut sebagai berikut: 105.83 pada tahun 2014, 107.00 tahun 2015; 109.81 tahun 2016; 109.71 tahun 2017; 111.77 tahun 2018.

Upaya pemerintah tidak akan berhenti di situ. Disadari sampai saat ini tingkat pendidikan petani masih rendah, didominasi oleh petani pendidikan dengan tingkat SD ke bawah, dan penguasaan lahan sangat sempit (petani gurem). Pertanian modern sudah mulai digiatkan tapi secara keseluruhan masih banyak yang dikelola secara konvensional.

Hal tersebut yang menyebabkan kenapa sektor pertanian tidak banyak dilirik oleh kaum milenial. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan pertanian harus mampu meningkatkan kualitas SDM pertanian seraya membuat sektor pertanian menguntungkan dan membuat keluarga petani sejahtera dan banyak diminati generasi muda.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian termasuk dalam program prioritas Kementerian Pertanian. Upaya ini akan dilakukan secara terintegrasi dalam Kostratani yang berbasis di Kecamatan. Kostratani mulai tahun 2020 akan mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu sebagai (a) Pusat Data dan informasi; (b) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian; (c) Pusat Pembelajaran dan Pelatihan Petani; (d) Pusat Konsultasi Agribisnis; dan (e) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan.

Sebagai bagian dari Kostratani, Kementerian Pertanian juga akan membangun fasilitas *War Room*. Fasilitas ini akan digunakan untuk memonitor seluruh data pertanian dan mengoptimalkan peran penyuluh sebagai pendamping petani.

Petugas penyuluh pertanian di tingkat kecamatan akan dilengkapi dengan informasi pertanian lengkap dan perangkat digital yang bisa memantau kapan dan berapa luasan panen, waktu tanam, potensi serangan hama penyakit dan cara penanggulangan, produksi, permintaan pasar, serta informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri, distribusi tenaga kerja pertanian, dan pergerakan alat mesin pertanian (alsintan).

Untuk menarik minat generasi milenial menggeluti usaha pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan program Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern seluas 50.000 hektare di 10-15 Provinsi. Dalam kawasan tersebut dikembangkan pertanian modern yang didukung teknologi

informasi (*information technology/IT*). Melalui *show window* tersebut, diharapkan generasi milenial dapat belajar sekaligus magang menjadi petani modern.

Pengembangan kawasan terintegrasi modern dan maju berbasis keunggulan lokal ini akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi keterbatasan penguasaan lahan yang dimiliki petani. Petani juga didorong untuk menggunakan inovasi teknologi unggulan terkini, seperti penggunaan benih/bibit varietas unggul dengan potensi hasil yang tinggi. Selain itu, petani diberi kebebasan dan didorong untuk mengembangkan komoditas pertanian yang mampu memberikan keuntungan yang paling baik.

Melalui pengembangan pertanian modern dan wawasan pertanian terintegrasi tersebut petani akan mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan produktivitas serta nilai tambah secara signifikan. Kesejahteraan dan penghasilan yang diterima petani akan semakin meningkat dan diharapkan lebih baik dibandingkan bekerja pada sektor lainnya. Hal ini tentunya akan mendorong generasi milenial dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan terjun ke sektor pertanian.

Bersatu untuk Kedaulatan Pangan

Pekerjaan rumah menyejahterakan petani tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sendiri. PR ini harus dibangun melalui gerakan bersama, dimana bingkainya adalah kebangsaan. Pembangunan pertanian perlu berpijak pada dasar yang kuat, perlu rumusan konsep yang mantap dan ramuan strategi supaya lebih terkonsentrasi. Karena itu, pijakan yang tepat adalah membesarkan gerakan bersama.

Terpilihnya Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian didasarkan pada pengalamannya sebagai kepala daerah selama lebih dari 25 tahun. Sempat menjabat sebagai lurah, camat, bupati, hingga gubernur, Pak Syahrul sudah terbiasa duduk bersama petani dan mendengarkan keluh kesah mereka. Pak Syahrul pun memahami, suatu bangsa hanya bisa bergerak maju jika semua elemen bisa bersinergi dan berkolaborasi membangun kekuatan bersama. Kekuatan besama ini akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian.

Maka tak heran jika dalam berbagai kesempatan, Pak Syahrul mengajak para petani, praktisi, pengusaha, maupun pemerintah daerah agar mampu berjalan selaras menuju barisan depan untuk kemakmuran. Katanya, pertanian kita tidak boleh berjalan stagnan. Apalagi jika terus bergantung pada petani '*gerontocracy*'.

Jadi, sebenarnya, pekerjaan rumah kita hari ini adalah menyatukan kekuatan semua elemen bangsa untuk memajukan pertanian Indonesia. Bukan sebaliknya, menyurutkan semangat petani yang tengah membara dalam melakukan usaha

pertanian. Kita percaya, Syahrul Yasin Limpo mampu mewujudkan harapan itu. Hari ini kita perlu semangat baru yang meletup-letup. Hari ini kita perlu diingatkan bahwa sektor pertanian hanya mengenal kata 'maju', bukan stagnan, apalagi mundur.

PERTANIAN MODERN DAN TEKNOLOGI

Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa". Demikian pidato Presiden Bung Karno dalam peletakan batu pembangunan Fakultas Pertanian IPB pada 27 April 1952. Isi pidato tersebut bukan sekadar wacana, namun secara jelas, beliau memberi pesan dan menegaskan agar kita memahami konsep ketahanan pangan secara utuh.

Terlebih, pembangunan pertanian di Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada lingkungan strategis yang sangat kompleks, dinamis, dan menantang. Sektor pangan dan pertanian sedang menghadapi banyak isu strategis seperti globalisasi, perdagangan bebas, keamanan pangan, modernisasi, persaingan global, kesejahteraan petani dan masalah lingkungan yang akan menjadi *critical point* pada proses perjalanan pembangunan pertanian Indonesia.

Namun, semua persoalan tadi, perlahan tapi pasti harus dapat dieliminasi dengan persiapan teknologi dan modernisasi. Bukan sekadar konsep, teknologi telah menjadi jawaban pasti dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kini memasuki tahap revolusi 4.0.

Hal-hal yang disampaikan Bung Karno memberi makna bahwa penerapan teknologi sangat menentukan maju mundurnya sektor pangan dan pertanian suatu negara. Namun kita sadar kemajuan sektor pertanian tidak bisa hanya ditentukan faktor internal lingkup sektor pertanian saja, tetapi juga oleh faktor eksternal termasuk aspek daya saing dan perdagangan internasional yang mengubah tatanan ekonomi dunia. Pasalnya, produk pertanian dari negara maju akan mendesak produk dalam negeri dan pasar lokal hingga diperlukan untuk mengubah kebijakan.

Dalam setahun terakhir terjadi perang dagang dua negara besar, Amerika Serikat (AS) dan Cina, ditambah lagi integrasi ekonomi kawasan yang semakin menguat. Namun di sisi lain, kapitalisasi pertanian kita juga memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan pasar internasional dengan menghadirkan produk unggul berkualitas dan berdaya saing ekspor.

Perihal teknologi, berbagai studi telah melaporkan besarnya kontribusi adopsi teknologi maju disertai pemanfaatan mekanisasi. Bahkan bisa dibilang,

pemanfaatan mekanisasi berhasil meningkatkan pertumbuhan produksi, terutama pada konteks mutu dan daya saing.

Ketersediaan inovasi teknologi merupakan salah satu kunci peningkatan kesejahteraan dan adopsi petani yang mampu menarik minat generasi muda untuk menciptakan aneka peluang bisnis turunan. Sayangnya, belum semua teknologi diadopsi oleh petani dalam praktek usaha tani.

Kondisi ini lebih disebabkan ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan petani. Belum lagi soal ketidaksesuaian teknologi dengan agroekologi, sosial ekonomi pengguna, serta masalah sumberdaya penyuluhan dan petani. Teknologi yang berupa varietas unggul, teknik budidaya baku dan alsintan relatif mudah diadopsi oleh petani.

Inovasi Teknologi

Adopsi teknologi pertanian memerlukan waktu lama karena harus mengganti kebiasaan petani yang telah nyaman dengan teknik yang biasa digunakan. Budidaya sayuran dalam rumah plastik secara hidroponik, budidaya sayuran didalam rumah kaca, penutupan bedengan tanah menggunakan plastik perak, perangkat hama menggunakan *light-trap*, merupakan contoh teknologi produksi hortikultura yang sudah banyak diadopsi oleh petani. Pada tanaman padi, teknik pengairan bergiliran basah dan kering (*alternating wet and dry/AWD*), tanam baris berpasangan jarak legowo, pembusukan jerami menggunakan mikroba, tanam bibit menggunakan transplanter, panen padi menggunakan *combine harvester* adalah contoh-contoh inovasi teknologi yang mulai banyak diadopsi oleh petani.

Di samping itu, lembaga penelitian pemerintah dan swasta juga berhasil memaksimalkan minyak nabati untuk energi terbarukan seperti bioetanol dan biodisel.

Berbagai teknik juga menghasilkan metode dan proses untuk meminimalisasi kehilangan hasil (*loss dan food waste*) melalui teknologi penyimpanan. Teknik kemasan produk dapat meningkatkan nilai tambah.

Penggunaan teknologi modern di sektor pertanian menjadi pilihan mutlak dan tidak bisa dinafikan pemanfaatannya. Penggunaan peralatan moderen telah menjangkau sektor hulu dan hilir dalam bisnis pertanian sejak persiapan bibit, pengolahan tanah sampai panen dan pemasaran.

Karakteristik lainnya dari penggunaan mekanisasi ini adalah penggunaan mesin-mesin otomatisasi yang terintegrasi dengan jaringan internet dalam berbagai aktivitas. Kondisi ini rupanya telah menaikkan posisi Indonesia ke level

yang lebih tinggi. Kecanggihan teknologi sangat berimplikasi pada perubahan aktivitas pertanian.

Kebijakan modernisasi pertanian dalam beberapa tahun terakhir juga turut berpengaruh pada peningkatan level mekanisasi pertanian di Indonesia. Pada 2014 misalnya, level mekanisasi kita hanya 0,14. Namun pada 2018 levelnya telah meningkat signifikan menjadi 1,68.

Mekanisasi secara jelas mampu mengurangi kerugian petani, baik saat menanam maupun panen. Terutama *losses* pemotongan, perontokan, dan pengeringan yang diperhitungkan bisa mencapai 10 persen. Sedangkan penggunaan *combine harvester losses*, yang dikhawatirkan dapat diminimalisir menjadi hanya 1-3 persen saja.

Dalam hal efisiensi kerja, penggunaan alsintan keunggulannya terlihat dalam durasi waktu kerja olah tanah yang biasanya butuh 320-400 jam per hektare, menjadi hanya 4-6 jam per hektare. Dengan kata lain, penggunaan mekanisasi lebih efisien dan menghemat biaya kerja hingga 40 persen.

Mekanisasi pertanian terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani, meski harga yang diterima menurun akibat produksi melimpah. Akan tetapi, dengan adanya tambahan penghematan biaya dan kenaikan produksi berhasil mengkompensasi turunnya harga yang diterima, sehingga tetap meningkatkan keuntungan.

Keterlibatan anak muda

Salah satu persoalan yang sering mengemuka dalam banyak diskursus adalah rendahnya keterlibatan anak muda pada sektor pertanian. Namun, kekhawatiran ini dengan optimis bisa ditepis dengan antusias Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) 2019 yang lalu, di mana jurusan Argoteknologi menjadi favorit kedua bagi para calon mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi.

Melalui mekanisasi alsintan, generasi muda berbondong-bondong mengambil peran dalam bidang pertanian, termasuk kontribusi besar pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setidaknya hal ini yang terlihat pada banyaknya perusahaan *start-up* pertanian seperti iGrow, TaniHub, Habibie Garden dan berbagai *start up* lain yang menawarkan efisiensi dan utilisasi sistem pemasaran baru, asuransi dan penyertaan modal dari industri besar.

Usaha *start up* tersebut memanfaatkan TIK dan teknologi 4.0 di sektor pertanian untuk mampu menarik semangat kerja anak muda terjun ke sektor pertanian. Mereka secara nyata berhasil memperbaiki rantai pasok dan efisiensi produksi, sehingga jalur pemasaran menjadi lebih menguntungkan, cepat dan presisi.

Peranan milenial sangat vital dalam mentransfer kemampuan penggunaan dan penerapan teknologi. Melalui teknologi informasi dan media digital, kecepatan diseminasi akan lebih efektif. Dampak lain yang juga dalam genggamannya anak muda adalah akselerasi informasi dengan memviralkan teknologi pertanian melalui media sosial seperti *Facebook*, *Youtube* dan *Twitter*. Selain itu, respon pengguna terkait dengan suatu inovasi teknologi langsung dapat diketahui secara *real time* dan akurat setelah informasi tersebut diujicoba dan dimanfaatkan oleh petani di lapangan.

MEMACU TEKNOLOGI 4.0 DALAM PERTANIAN

Pembangunan pertanian ini harus lebih maju, tidak boleh *stuck* apalagi mundur. Pertanian juga harus makin mandiri. Ada tantangan baru yang harus kita jawab dari masa ke masa dan era ini dengan teknologi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI pada November 2019 lalu. Pernyataan Menteri Pertanian itu tentu memiliki makna penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian ke depan.

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul memang tak pernah berhenti menegaskan cita-cita “Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern”. Salah satu elemen penting untuk mencapai cita-cita tersebut adalah penggunaan teknologi.

Upaya Menteri Pertanian saat ini untuk menggiatkan implementasi teknologi menegaskan bahwa sektor ini tak semata kegiatan individual yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pertanian adalah sebuah industri yang terbesar di dunia. Komoditas pertanian adalah sumber daya terpenting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dan pertanian turut berevolusi seiring dengan penemuan-penemuan penting di dunia industri.

Era Pertanian 4.0

Kita tengah memasuki era Industri 4.0 yang lekat dengan penggunaan *Internet of Things* (IoT) di dalam berbagai sektor, tidak terkecuali pertanian. Kebutuhan pangan yang semakin tinggi hingga ledakan populasi dunia menuntut sistem pertanian yang lebih cerdas dibanding sebelumnya. Pertanian Presisi, Pemanfaatan *Drones* untuk Pertanian, Pemantauan Ternak, dan Rumah Kaca cerdas merupakan implementasi dari teknologi IoT untuk bertani lebih efisien dan berkelanjutan di tengah berbagai hambatan dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Pertanian memiliki tantangan untuk menyediakan bahan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh populasi dunia. Hal ini semakin penting mengingat

tantangan terhadap keterbatasan lahan pertanian, perubahan cuaca, dan peningkatan dampak lingkungan akibat praktik pertanian intensif.

Dari sudut pandang permasalahan lingkungan, *smart agriculture* berbasis IoT dapat memberikan manfaat besar termasuk dalam penggunaan air yang lebih efisien, atau optimalisasi input dan perawatan tanaman. Adapun aplikasi *Smart agriculture* dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu (a) *Precision agriculture* atau Pertanian Presisi, (b) *Agricultural Drones* atau Pemanfaatan Drones untuk Pertanian, (c) *Livestock Monitoring* atau Pemantauan Ternak, dan (d) *Smart Greenhouses* atau Rumah Kaca Cerdas.

Pertanian presisi merupakan salah satu bentuk aplikasi IoT yang paling terkenal di sektor pertanian. Banyak perusahaan dunia di bidang pertanian telah memanfaatkan teknik ini untuk efisiensi kinerja dan capaian produksi. Sebagai contoh pertanian presisi yang fokus pada solusi *agronomi ultra-modern* dalam pengelolaan irigasi dan suplai nutrisi presisi.

Tidak hanya itu, aplikasi IoT nirkabel mulai digunakan untuk pemantauan ternak. Data mengenai lokasi dan kesehatan ternak berbasis IoT dapat membantu peternak untuk mengidentifikasi hewan yang sakit sehingga bisa dipisahkan dari kawanan lebih cepat agar mencegah penyebaran penyakit.

Server berbentuk *cloud* dapat diciptakan untuk mengakses sistem dari jarak jauh manakala diperlukan. Pertanian berbasis IoT membuat para pengambil kebijakan memperoleh *real-time* data yang bermanfaat. Proses ini akan memangkas seluruh aktivitas yang membutuhkan periode waktu tertentu dan jumlah tenaga kerja yang cukup besar pada skala industri pertanian. Oleh karena itu, industri pertanian saat ini harus sadar akan potensi pasar IoT untuk aplikasi di dunia pertanian.

Terkoneksinya perangkat dan tersedianya *database* yang terhubung secara *real-time* antar pengambil kebijakan diharapkan mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk optimalisasi produksi pada agroindustri, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengusaha dari sektor swasta dalam rangka pelaksanaan investasi pada sektor agroindustri.

Aplikasi sistem IoT imembuat masyarakat tidak perlu datang atau turun langsung ke lapangan untuk budidaya secara langsung. IoT dapat membantu masyarakat mendapatkan data tanaman yang tidak mendapatkan cukup air, nutrisi, maupun serangan penyakit. Seluruh informasi tersebut bisa diakses melalui perangkat telepon pintar (*smartphone*).

Berbekal teknologi, petani mampu mengurangi kendala jarak dan waktu dalam budidaya pertanian. Selain itu, teknologi mampu mereduksi peran manusia dalam sektor budidaya sehingga meminimalisir kebutuhan tenaga

kerja dalam proses budidaya. Bahkan dengan permodelan yang valid, peran tenaga kerja berkeahlian khusus, seperti paramedik veteriner dapat tergantikan oleh teknologi. Karena status kesehatan ternak dapat terpantau dan teranalisis dengan menggunakan model algoritma.

Implementasi Teknologi IoT

Indonesia tentunya beruntung memiliki para peneliti dan perekayasa teknologi yang unggul. Para investor teknologi unggul kita sudah bisa merancang dan menciptakan teknologi pertanian berbasis IoT. Kementerian Pertanian juga sangat mendorong kehadiran *start up* yang mengakomodasi penggunaan teknologi IoT. Setiap teknologi berbasis IoT yang dihasilkan dari internal dan eksternal Kementerian Pertanian, terus dirangsang untuk tumbuh dan berkembang.

Kementerian Pertanian dengan para peneliti dan perekayasa teknologi di Badan Penelitian dan Pengembangan Penelitian (Balitbangtan) selama ini tidak hanya berfungsi sebagai kreator dan inventor, tapi juga diseminator teknologi. Balitbangtan melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah terus didorong menyampaikan teknologi terbaru, termasuk alat dan mesin pertanian berbasis IoT. Peran nyata tersebut harus didukung dan difasilitasi melalui kemitraan dengan sejumlah kelompok pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, Keberadaan Kostratani sebagai bentuk revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian juga bisa menjadi tumpuan Kementerian Pertanian dalam mendiseminasikan teknologi 4.0 di kalangan pelaku usaha pertanian. Sebagai pusat edukasi dan informasi, para penyuluh kostratani wajib berpartisipasi untuk mendesiminasikan dan mendampingi para petani dalam penerapan teknologi maju berbasis IoT.

Pemanfaatan teknologi ini selayaknya terus didorong dan diaplikasikan dalam lingkup yang lebih luas, tidak lagi sebagai penelitian dan uji coba. Peningkatan produktifitas pertanian yang bersumber dari efisiensi dan efektifitas proses budidaya, tentu akan memperkuat status ketahanan pangan nasional.

BABAK BARU IMPLEMENTASI AI PERTANIAN

Pemanfaatan teknologi merupakan keniscayaan bagi upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia, terutama dalam konteks mutu dan daya saing. Ketersediaan inovasi teknologi juga merupakan salah satu kunci peningkatan kesejahteraan petani dan penarik minat generasi muda dalam menciptakan aneka peluang bisnis turunan.

Karena itu, pemerintah pun memandang penggunaan teknologi modern di sektor pertanian menjadi pilihan mutlak. Sejumlah lembaga riset pemerintah, seperti LIPI, BPPT, dan Balitbangtan Kementerian Pertanian beserta sejumlah perguruan tinggi terus menggiatkan penciptaan inovasi berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dalam konteks pemanfaatan teknologi ini, Kementerian Pertanian berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian dengan mengimplementasikan teknologi 4.0 di sektor pertanian.

Terdapat lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *computer vision*, *artificial intelligence (AI)*, *human machine interface (HMI)*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Kesemuanya itu mentransformasi cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar. Implementasi industri 4.0 juga diarahkan untuk efisiensi dan daya saing.

Artificial intelligence (AI) sebagai salah satu teknologi utama yang mendukung implementasi industri 4.0 sangat potensial dan prospektif. Sektor pertanian juga ikut berubah seiring dengan tren ini. Karena itu, tidak bisa dihindari kemudian muncul terminologi *smart farming* (pertanian cerdas), *precision farming* (pertanian presisi), dan istilah-istilah yang merujuk pada industri 4.0 dan pengaplikasian teknologi AI.

Pemanfaatan AI dapat dilihat implementasinya dalam pertanian global. Sebuah perusahaan dari Illinois, AS, telah memanfaatkan AI yang mampu mengenali hama atau penyakit tanaman, seperti tumbuhnya jamur dan juga kekurangan air pada tanaman jagung dan kedelai, beberapa minggu sebelum mata manusia dapat melihat apa yang terjadi. *Startup* tersebut menawarkan para petani analisis kecerdasan buatan dari foto yang diambil dari *drone*.

Dengan kemampuan deteksi tersebut, manajemen perkebunan tidak terlambat melakukan perawatan terhadap tanaman yang menghadapi masalah penyakit. Jikalau kita dapat mengetahuinya lebih dini, seperti adanya hama, misalnya, para petani dapat bertindak lebih cepat guna mencegah agar tidak mengganggu produktivitas.

Para petani tomat dan stroberi di Jepang telah menggunakan sebuah jaringan kamera yang dipasang pada atap rumah kaca untuk memantau dan mengenali apabila ada masalah. Juga, banyak petani di Jepang saat ini telah menggunakan *drone* untuk membantu memantau areal persawahan mereka.

Menyambut implementasi AI

Sejauh mana implementasi teknologi AI dalam sektor pertanian Indonesia? Kementerian Pertanian di 2020 akan memberikan perhatian khusus pada implementasi AI, mengingat teknologi AI menjadi bagian penting dari model pertanian presisi yang maju dan modern. Filosofi dasar pertanian presisi yang dimanfaatkan ialah mengukur dan mengelola variabilitas, seperti hasil, tanah, hama, dan gulma di seluruh lahan yang ada untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan praktik pertanian dalam sistem usaha tani. Dengan cara ini, maka produktivitas, kualitas produk dan keuntungan ekonomi diharapkan lebih optimal.

Sejumlah inovasi telah dihasilkan dan dikembangkan Kementerian Pertanian, di antaranya *smart green house* dengan memanfaatkan teknologi IoT. Pada inovasi ini, semua aktivitas yang memengaruhi pertumbuhan tanaman diatur melalui internet dengan menggunakan sistem AI. Misalnya, dengan melakukan pengaturan terhadap cahaya, air, dan hal yang memengaruhi pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan kualitas yang terbaik.

Inovasi berikutnya ialah *Smart irrigation system* yang juga memanfaatkan teknologi IoT berbasis AI. Inovasi tersebut diterapkan melalui irigasi bawah tanah yang dimanfaatkan untuk tanah kering. Sistem kerjanya ialah dengan mengatur kelembapan tanah dengan sistem AI sehingga tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembap sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Inovasi lainnya merupakan pemanfaatan *autonomous technology* pada *automatic tractor*. Melalui penerapan AI, petani dapat mengendalikan pola pekerjaan traktor secara cerdas. Dengan cara ini, petani dapat mengendalikan mesin tanpa harus turun ke sawah.

Penerapan AI pertanian memiliki dampak positif langsung bagi petani produsen maupun konsumen hasil pertanian, meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangannya ialah biaya dan

infrastruktur. Peranti teknologi yang canggih tentu tidak murah harganya, apalagi besarnya kawasan pertanian Indonesia. Selain masih membutuhkan tambahan peranti pendukung yang masif, di sejumlah wilayah, infrastruktur internet dan aksesibilitasnya juga perlu terus ditingkatkan.

Tantangan lainnya ialah kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi. Walaupun teknologi ini difokuskan terhadap petani milenial yang *digital native*, sebagian besar sektor ini masih dihuni generasi tua. Selain itu, banyak petani muda yang masih belum melek teknologi karena pendidikannya yang relatif rendah. Di sinilah perlunya pendampingan secara intensif melalui sebuah pusat pelatihan, pusat informasi, dan komando program yang terpadu.

Pada 2020, penerapan implementasi teknologi AI dalam pembangunan pertanian akan memasuki babak baru dengan dibangunnya *Agriculture War Room* (AWR) di Kementerian Pertanian sebagai pusat pengendalian Kostratani. Kostratani ialah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi 4.0 dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan bahwa teknologi AI wajib menjadi basis utama dalam AWR menggerakkan pertanian di kawasan binaan Kostratani. Kostratani ini akan memiliki banyak peran, baik sebagai pusat pergerakan sektor pertanian, pusat pelatihan, penyuluhan, pusat konsultasi agribisnis, pengembangan jejaring kemitraan, maupun pusat data dan Informasi pertanian daerah.

Kostratani yang dibangun akan menjalankan sistem manajemen data dan informasi sehingga kementerian (pemerintah pusat) bisa mengetahui kondisi lapangan secara cepat dan akurat. Teknologi AI akan didukung aplikasi dalam pengumpulan informasi pertanian dan mengolah data luas lahan, luas tanam, luas panen, serta produktivitas setiap komoditas sebagai sebuah informasi. Data iklim (*automatic weather station/AWS*) dan *monitoring standing crop* juga menjadi bagian penting dari informasi yang dikumpulkan. Teknologi AI akan berperan dalam mengolah semua data dan informasi sehingga kebijakan yang diambil akan tajam dan sah. Akurasi data dan aksesibilitasnya memang menjadi salah satu fokus utama Menteri Syahrul. Disadari data dan informasi yang tepat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan pertanian.

Kostratani dan AWR berbasis AI yang dibangun, diharapkan akan menghilangkan rentang jarak dan waktu dalam proses adopsi teknologi pertanian modern. Sebagai pusat pembelajaran inovasi, Kostratani akan menjadi wahana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam pendampingan pembangunan pertanian di daerah.

TEKNOLOGI PERTANIAN ERA MILLENIAL

Pertanian di Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada lingkungan strategis yang sangat kompleks, dinamis dan menantang. Sektor ini sedang menghadapi banyak isu strategis seperti globalisasi, perdagangan bebas, keamanan pangan, modernisasi, persaingan global, kesejahteraan petani, kesehatan serta masalah lingkungan yang akan menjadi *critical point* pada proses perjalanan pembangunan pertanian.

Kesadaran bahwa kemajuan pertanian tidak bisa hanya ditentukan oleh faktor internal saja, namun juga oleh pengaruh geopolitik dan strategi perdagangan internasional, telah mengubah tatanan ekonomi dunia. Kondisi pandemi Covid-19 yang kini melanda dunia, merupakan sebuah contoh dimana tatanan politik dan strategi pertanian serta ketahanan pangan harus terus beradaptasi.

Pemerintah terus menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional, termasuk ketika kebijakan “*new normal*” alias tatanan kehidupan baru di masa pandemi covid-19 ini berlaku. Implementasi *new normal* seharusnya tidak memberi banyak perubahan pola masyarakat dalam memenuhi dan mengakses pangan. *New normal* justru dapat menjadi momentum untuk kembali menggeliatkan sektor pertanian dalam arti luas, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat bisa bangkit. Kebijakan *new normal* menjadi momentum untuk mengembangkan pola bisnis pertanian yang lebih bergairah.

Peran pemerintah, terutama Kementerian Pertanian terus menjaga dan meningkatkan semangat itu dengan menghadirkan program dan kebijakan yang mendukung secara konkret kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir. Kementerian Pertanian mengeluarkan beberapa program strategis untuk menjawab tantangan dimasa pandemi melalui perubahan postur anggaran, yang bertujuan untuk menguatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan kinerja pembangunan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tak mungkin tercapai tanpa dukungan teknologi. Sektor pertanian harus mampu beradaptasi menjawab

tantangan ke depan, dengan modernisasi dan inovasi teknologi yang merupakan salah satu komponen penting pertanian maju untuk mencapai target kedaulatan pangan.

Teknologi dan Peran Kaum Milenial

Dalam mendukung implementasi industri pertanian 4.0, sektor pertanian berevolusi mengadopsi model dan inovasi bisnis baru, yaitu: pertanian presisi, pertanian vertikal, dan pertanian pintar (*smart farming*). Kementerian Pertanian terus berupaya mengakselerasi agar sektor pertanian memanfaatkan teknologi berbasis IoT. *Big data*, sensor dan *drone*, alat analisis, “internet pertanian” dan otomatisasi alat produksi pertanian (alsintan) yang merupakan komponen teknologi yang mendukung industri 4.0. Pemanfaatan IoT dalam bentuk Internet Pertanian telah menghubungkan alat-alat yang kita perlukan dengan piranti informasi di tangan kita.

Penerapan teknologi pertanian dipercaya mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan perluasan pasar hasil industri pertanian. Hal ini tentu menjadi peluang bagi berkembangannya industri pertanian yang berfungsi sebagai *multiplier effect* sehingga usaha pertanian semakin produktif dan berdaya saing, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian telah berupaya mengenalkan sistem pertanian modern, melalui pemanfaatan irigasi, pengolahan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, pengembangan varietas baru, pengolahan pasca panen dan pemasaran. Percepatan program bantuan sarana produksi yang bermuatan inovasi (alat dan mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan/vaksin dan sarana penunjang lain) kepada petani terus digalakkan. Implementasi Industri 4.0 disektor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, sehingga produk pertanian memiliki daya saing di tingkat global.

Inovasi teknologi dan modernisasi pertanian telah dirintis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, diantaranya: *Smart irrigation*, *smart green house*, *telescoping boom sprayer*, *mobile dryer*, *rice Upland Seeder by Farm Dozer*, *jarwo riding transplanter*, penanam benih padi, alsin penanam tebu dan *drip line* irigasi. Inovasi teknologi tersebut terus didorong agar dapat diadopsi petani dan diproduksi massal oleh para perusahaan alsintan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi usaha tani dan kesejahteraan petani.

Disisi lain, komposisi umur petani menunjukkan sebagian besar angkatan kerja pertanian Indonesia berusia 45 tahun atau lebih, dan mayoritas berpendidikan rendah. Kondisi ini menjadi tantangan revolusi teknologi dan adopsi alat pertanian berteknologi tinggi. Kementerian Pertanian mendorong generasi milenial yang melek teknologi dan akrab dengan internet, tertarik menjadi agripreneur untuk merubah wajah pertanian Indonesia.

Ketersediaan mekanisasi alsintan diharapkan menarik minat generasi muda untuk mengambil peran dalam bidang pertanian. Kontribusi besar mereka pada diseminasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pertanian terlihat pada banyaknya *start-up* pertanian seperti IGrow, TaniHub, Habibie Garden dan pemasaran produk melalui internet yang menawarkan efisiensi dari sistem pemasaran baru, asuransi usaha tani dan penyertaan modal pada industri besar.

Start up usaha pertanian memanfaatkan TIK dan teknologi 4.0 di sektor pertanian untuk menarik minat semangat kerja anak muda terjun ke sektor pertanian. Usaha pertanian tersebut secara nyata telah berhasil memperbaiki efisiensi produksi dan rantai pasok sehingga jalur pemasaran menjadi lebih pendek dan menguntungkan pelaku usaha tani.

Pada intinya, peranan generasi milenial sangat vital dalam mentransfer kemampuan penggunaan dan penerapan teknologi. Melalui teknologi informasi dan media digital, kecepatan diseminasi informasi dan teknologi akan lebih efektif. Dampak lain yang juga timbulkan angkatan millennial anak muda adalah akselerasi informasi, promosi dan pemasaran secara langsung dengan memviralkannya melalui media sosial seperti *Facebook*, *Youtube* dan *Twitter*. Dengan demikian, respon pasar dan konsumen terhadap suatu produk berjalan dengan cepat dari tangan produsen secara langsung. Teknologi informasi juga mampu mentransfer inovasi teknologi secara langsung kepada pelaku usaha di lapangan.

3M PERADABAN BARU DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Tugas utama Kementerian Pertanian berdasarkan Perpres 45/2015 meliputi antara lain, pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian. Kedua, pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian. Ketiga, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM di bidang pertanian. Keempat, pelaksanaan diversifikasi dan pementapan ketahanan pangan. Kelima, pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Dengan tugas tersebut, sektor pertanian bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi 270 juta penduduk Indonesia pada 2021. Pada 2045, perkiraan jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa. Dalam menghadapi tantangan ini, tentu saja membutuhkan dukungan aneka teknologi, inovasi, dan kapital yang cukup untuk mendorong peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan para petani.

Oleh karena itu, pemerintah, *private sectors*, dan masyarakat sipil harus bisa berkontribusi dalam penciptaan inovasi teknologi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan pertanian nasional, serta meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas pertanian. Inovasi teknologi berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian yang berbasis pada modernisme.

Hal yang cukup penting juga ialah soal kemandirian. Pembangunan pertanian harus keluar dari jebakan bantuan dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Petani cukup diberikan ruang, memiliki akses untuk memperoleh modal dengan proses bisnis yang jelas. Keterlibatan pemerintah hanya mengatur regulasi harga, pengaturan ketersediaan komoditas, dan menyiapkan akses masyarakat terhadap komoditas pertanian, khususnya pangan. Dengan peran seperti itu, masyarakat dapat dipastikan bisa memiliki ketahanan terhadap kebutuhan pangan.

Roh Pembangunan Pertanian

Dengan demikian, 'roh' pembangunan pertanian saat ini dan ke depan ialah pertanian yang berbasis pada teknologi (modern), mandiri, dan di ujungnya ialah pertanian yang maju, atau yang lebih dikenal dengan modern, mandiri, dan maju (3M).

Secara umum, maju berarti progresif, tumbuh dan berkembang terus-menerus untuk menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan ideal. Dalam konteks pembangunan, tujuan ideal itu ialah peradaban tinggi yang dalam konstitusi bangsa Indonesia didefinisikan sebagai kehidupan masyarakat yang cerdas, sejahtera, makmur, dan berkeadilan sosial.

Asas kemajuan dalam UUD 45 adalah asas kita berbangsa. Pertanian maju bersifat dinamis dan progresif, dalam pengertian masyarakat tani kita terus-menerus tumbuh berkembang menuju arah yang semakin baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan sosial.

Dalam konsep pembangunan, maju adalah prinsip perbaikan terus-menerus. Inovasi teknologi dalam berbagai bentuk adalah salah satu cara untuk perbaikan pembangunan. Sekaligus untuk merespons permasalahan yang muncul dalam praktik pembangunan pertanian.

Dengan demikian, kata maju dalam pembangunan pertanian harus diterjemahkan sebagai upaya memenuhi perannya dengan dukungan teknologi inovatif guna mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan gizi, dan kemakmuran petani.

Ringkasnya, pertanian maju adalah pembangunan pertanian yang berhasil mewujudkan tujuannya secara bertahap dan berkelanjutan.

Selanjutnya konsep kemandirian, yakni langkah menuju ketahanan dan kedaulatan hidup berbangsa dan bernegara, atau cerminan dari kebebasan dalam mengambil keputusan tertentu.

Bagi negara, masyarakat, maupun organisasi tertentu, atau orang per orang setiap warga negara, kedaulatan menyangkut harga diri setiap individu dan hak asasi setiap manusia yang mesti dipertahankan dengan tetap mengacu pada konstitusi. Kedaulatan adalah kunci untuk menampilkan, mengembangkan, dan melestarikan fitur-fitur khas sebuah bangsa dan masyarakatnya.

Dalam konteks pembangunan pertanian, konsep kemandirian tentu saja berkaitan dengan ketahanan, kedaulatan petani, serta kemandirian pangan dan pertanian, dua nilai yang perlu diwujudkan sesuai amanat UU No 18/2012 tentang Pangan.

Dalam hal ini, kemandirian bernilai intrinsik sehingga termasuk bagian tujuan pembangunan pertanian. Kemandirian ialah salah satu penanda kemajuan. Selain bernilai intrinsik, kemandirian juga bernilai instrumental, berfungsi sebagai strategi atau instrumen pembangunan.

Dalam konteks ini, kemandirian pangan adalah kemampuan negara bangsa dan masyarakatnya dalam memproduksi pangan yang bervariasi dari tempat berbeda, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal, melalui inovasi yang berbasis kekuatan spesifik lokal. Dalam hal ini, kemandirian adalah instrumen untuk kemajuan, bebas dari intervensi ekonomi politik global, dan dapat menunjukkan kekukuhan dan kekuatan sebagai bangsa.

Secara sederhana, kata modern bisa dimaknai sebagai sesuatu yang terbaru, terkini, dan sesuai tuntutan zaman dalam pergaulan dunia yang terbuka. kebalikan dari modern ialah tradisional, konservatif, konvensional, kuno, atau lama. Dengan demikian, lawan makna dari pertanian modern ialah pertanian tradisional, pertanian konservatif, pertanian konvensional, atau pertanian kuno.

Modernisasi, dengan pilar utamanya inovasi dan budaya teknologi, adalah proses pergeseran sikap, kebiasaan, dan mentalitas dari warga masyarakat, dalam hal ini petani, untuk dapat hidup sesuai tuntutan masa kini. Modernisasi pertanian berarti perubahan dari sistem pertanian tradisional, konservatif, konvensional, kuno, atau lama ke sistem pertanian berbasis teknologi mutakhir sesuai tuntutan zaman dalam konteks global. Dalam konteks perekonomian dan budaya terbuka, pertanian modern berarti pula pertanian yang mampu bersaing terbuka, dengan daya saing tinggi.

Inovasi

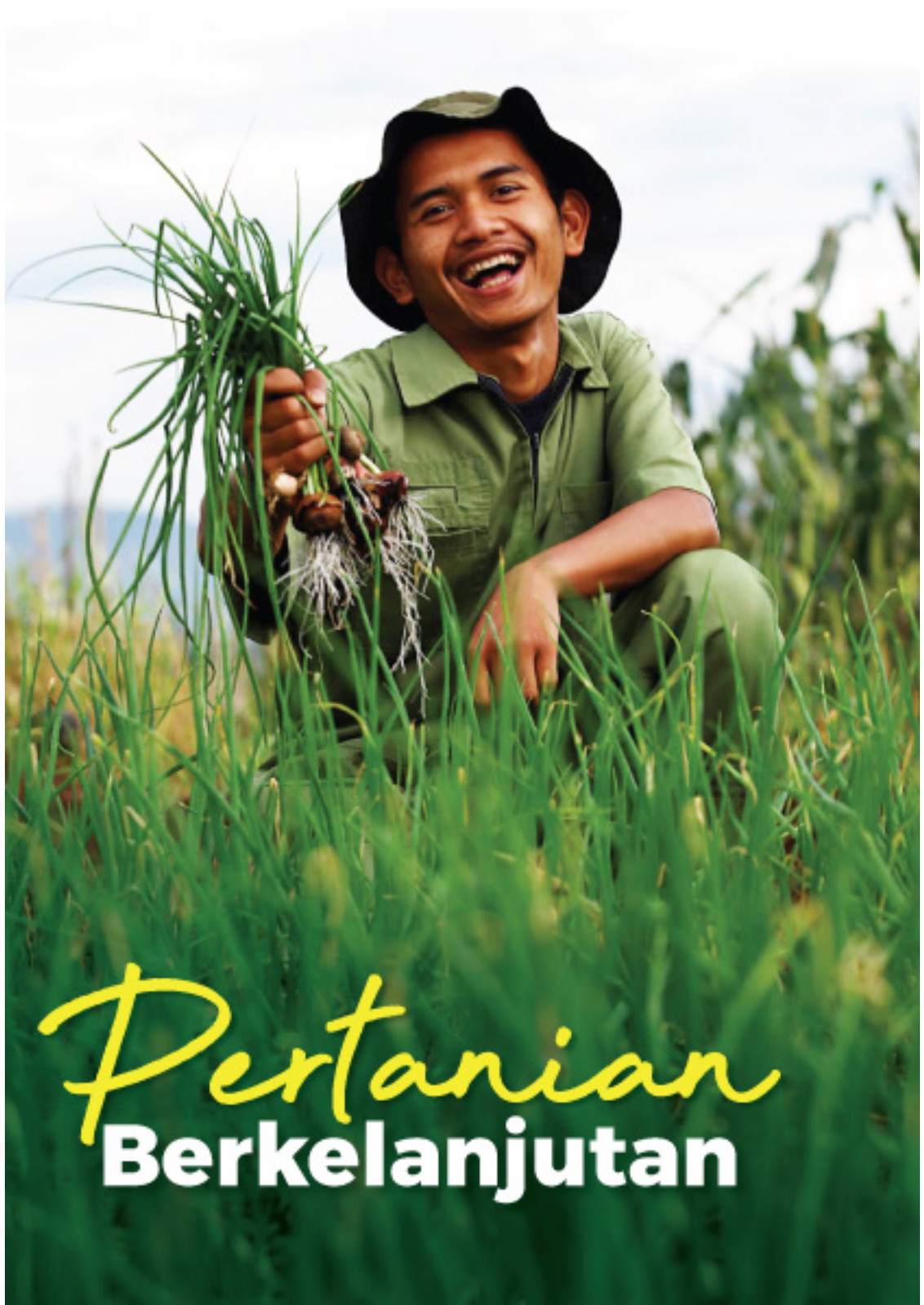
Kata modern dapat dijadikan sebagai penanda sikap dan mentalitas masyarakat yang memiliki usaha dan kemampuan penciptaan, menumbuhkan inovasi baru, dan menguasai teknologi inovatif. Modernisasi tecermin dari perubahan sikap dan mentalitas masyarakat tani dalam menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kelembagaan pertanian yang dipergunakan dalam proses produksi.

Fungsi utama modernisasi pertanian ialah sebagai instrumen untuk mewujudkan pertanian maju dan mandiri. Pertanian maju karena melakukan inovasi teknologi dan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, nilai tambah, dan efisiensi produksi usaha pertanian. Pertanian

menjadi mandiri karena inovasi yang dilakukan mampu mengurangi ketergantungan pasokan input, modal, dan pemasaran kepada pihak luar, serta meningkatkan bagian nilai tambah bagi para petani pelaku usaha.

Gagasan Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo dengan arah pembangunan pertanian mandiri, modern, dan maju (3M) adalah sebuah konsep yang tidak saja dapat mengubah pembangunan pertanian dari pembangunan pertanian konvensional menuju pembangunan yang modern, tetapi juga dapat mengubah peradaban masyarakat.

Dengan cara apa gagasan ini dapat mengubah peradaban masyarakat? Kini sejumlah program superprioritas, seperti *food estate*, korporasi petani, penguatan pangan lokal secara masif, penumbuhan petani milenial secara besar-besaran, peningkatan akses KUR, dan penyediaan alsintan, adalah indikator kuat berubahnya kebudayaan pertanian pada masyarakat petani perdesaan.



Pertanian
Berkelanjutan

GEBRAKAN MENTAN SYAHRUL SEDIAKAN PANGAN RAKYAT

Pada Minggu, 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi dilantik. Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu banyak harapan yang digantungkan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kemajuan di sektor pertanian. Pembangunan bangsa sebesar Indonesia, tidak mungkin meninggalkan pertanian, sedangkan pun, negara industri maju, seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Jepang menjadikan pertanian sebagai sektor andalan untuk menopang ekonomi mereka.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia di sektor pertanian tidaklah ringan. Data Badan Pusat Statistik terkini mencatat, penduduk Indonesia sudah berjumlah 267 juta jiwa berada pada urutan ke-4 setelah Amerika, India, dan Tiongkok. Bahkan pada 2050, penduduk Indonesia diperkirakan akan menembus angka 300 juta jiwa.

Memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat untuk negara sebesar Indonesia membutuhkan strategi khusus. Untuk itulah sejak dilantik dan mengawali jabatannya sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menekankan wajib hadirnya pemerintah dalam penyediaan pangan bagi seluruh rakyat.

Sebagai langkah awal Menteri Pertanian, Syahrul berkomitmen membenahi data pertanian. Pembenahan itu ditargetkan selesai dalam 100 hari pertama masa kerjanya di Kabinet Indonesia Maju. Poin penting dalam pembenahan tersebut ialah validasi data secara bersama dan hanya satu data di Badan Pusat Statistik, atau data satu pintu.

Selama ini, pengumpulan data pangan melibatkan banyak kementerian/ lembaga sehingga harus ada data pangan yang disepakati bersama dan memiliki akurasi tinggi agar bisa dimanfaatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi dan kebijakan.

Koordinasi dan konsolidasi dengan sejumlah kementerian/ lembaga yang terlibat dalam data pertanian pun digiatkan. Kementerian Pertanian dan kementerian/ lembaga lainnya harus saling menunjang untuk menyediakan

data yang akurat. Karena dengan akurasi, semua kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik.

Selain membenahan data, Menteri Pertanian Syahrul juga segera membangun *War Room* Pangan berupa Sistem Kostratani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. *War Room* ini akan digunakan untuk memonitor seluruh data pertanian dan mengoptimalkan peran penyuluh di level kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional.

Untuk menunjang kinerja para penyuluh, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan akan dilengkapi dengan informasi pertanian lengkap dan perangkat digital yang bisa memantau kapan dan berapa luasan panen, waktu tanam, potensi serangan hama penyakit dan cara penanggulangannya, serta informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri hingga distribusi tenaga kerja pertanian dan pergerakan alat mesin pertanian (alsintan).

Optimalisasi peran BPP dan para penyuluh ini berangkat dari pemikiran bahwa penyuluh merupakan *“the dream academic”* petani, dengan kata lain, intelektualnya petani ialah penyuluh. Juga mengutip pernyataan Syahrul dalam Rakernas Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Jakarta (30/10), “Penyuluh adalah otaknya petani, manajemen dan hatinya petani yang selalu mendampingi petani. Karena itu, mereka wajib menjadi *“Kopassusnya”* pembangunan pertanian di daerah.”

Menurut Menteri Pertanian Syahrul, penggunaan iptek di level petani juga sangat ditentukan oleh penguasaan Iptek pertanian bagi penyuluhnya. Selain itu, peran penelitian dan pengkajian di bidang pertanian pun turut menjadi perhatian.

Hasil riset pertanian harus menjadi inovasi yang dapat dipraktikkan para petani dan secara nyata berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas produksi. Para peneliti, baik di Kementerian Pertanian maupun di perguruan tinggi nasional perlu didorong untuk menggunakan seluruh kekuatannya menemukan hasil-hasil riset baru, varietas-varietas baru, dan cara-cara bertani baru untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Dengan teknologi dan inovasi terbaru, pertanian bisa lebih efektif dan efisien, bahkan didorong untuk menopang kebutuhan pangan, ekspor, dan industri pertanian yang terus bergerak maju. Ini sangat penting dan tentu akan memerlukan kontribusi kuat hadirnya penyuluh, peneliti, dan petani dalam mendorong industri pertanian dan peningkatan produksi pangan.

Sinergi untuk Indonesia berdaulat pangan

Beberapa langkah yang sudah mulai diantakkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengerucut pada semangat kebersamaan. Untuk memantapkan

langkah ketahanan pangan yang dimulai dari perlunya data pertanian tunggal, Syahrul tak segan menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik.

Kemudian, Menteri Pertanian juga menggelar pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan itu menegaskan bahwa data luas baku sawah akan sinkron per 1 Desember 2019. Karenanya, pihaknya juga akan segera melakukan validasi dan verifikasi secara bersama-sama dengan melibatkan Badan Pusat Statistik, ATR/BPN, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Validasi dan verifikasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi dengan deviasi rendah. Selain itu, bersama-sama cek lapangan. Dia berjanji akan mengawal proses ini secara langsung hingga tuntas. Selanjutnya, Syahrul juga sudah mengatur jadwal pertemuan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya.

Menteri Pertanian Syahrul berjanji akan rutin menggelar pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga lain dalam memantapkan jalannya program pertanian untuk kepentingan rakyat.

Begitu halnya dalam Kostratani yang akan menggiatkan teknologi pertanian aplikatif. Petani akan semakin maju jika peneliti dan penyuluh bisa bekerja sama dalam mendiseminasikan inovasi-inovasi pertanian. Peneliti sebagai penghasil inovasi dan penyuluh memastikan inovasi-inovasi tersebut bisa dipraktikkan petani di lapangan.

Yang tidak kalah penting, menurut Menteri Pertanian Syahrul ialah pemerintah daerah di semua level diharapkan turut bersama berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Pemerintah daerah turut dilibatkan dalam upaya penanganan kerentanan rawan pangan dan penyediaan stok pangan di daerah.

Untuk mengentaskan stunting dan daerah rentan rawan pangan, Kementerian Pertanian mengajak pimpinan daerah, dari kepala desa, lurah, camat, bupati/wali kota, sampai gubernur untuk bersama-sama turun tangan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Juga, akan terus digiatkan kerja sama para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga agar semua daerah di Indonesia cukup pangan dan memiliki ketahanan pangan yang baik.

MENGENALKAN PERTANIAN DI SEKOLAH

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia adalah masalah regenerasi petani. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 34,58 juta orang (27,33% dari seluruh lapangan pekerjaan utama). Angka itu turun 1,12 juta atau 1,46% dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat 35,70 juta orang.

Petani bukanlah mata pencaharian favorit di kalangan generasi muda. Rendahnya minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian tercermin dari hasil kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2015 silam. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa hanya 54 persen anak petani tanaman pangan yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya, sementara 46 persen menolak. Pada petani hortikultura, persentasenya lebih timpang lagi. Sebanyak 63 persen menolak mewarisi profesi orang tuanya dan hanya 36,7 persen yang bersedia melanjutkan usaha tersebut.

Bertolak dari temuan tersebut, upaya mengatasi masalah regenerasi pertanian sangat terkait dengan meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian. Kementerian Pertanian ingin menunjukkan bahwa dunia pertanian memiliki daya tarik sebagai lapangan usaha yang dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan. Pertanian tidak lagi identik dengan cangkul dan kotor, bertani sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan modern.

Sebagai upaya meningkatkan minat anak muda terhadap pertanian, langkah fundamental yang penting dilakukan adalah memperkenalkan pertanian kepada anak sekolah. Diperlukan inisiatif untuk memasukkan pengetahuan pertanian sebagai kecakapan hidup (lifeskill) melalui pembelajaran pertanian ke dalam kurikulum sekolah. Selain sebagai bentuk upaya memperkenalkan pertanian sejak dini, langkah ini penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) pembangunan pertanian yang bermutu.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, awal November 2019, menyatakan berkomitmen akan

memperkenalkan program Pertanian Masuk Sekolah. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh SDM yang mumpuni. Dengan program Pertanian Masuk Sekolah, anak-anak sejak dini memiliki pemahaman dasar-dasar pertanian, sehingga keluar dari sekolah minimal memiliki kemampuan memproduksi pangan keluarga.

Konsep Kebun Sekolah

Ide untuk memasukkan pertanian sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sejumlah sekolah sudah mempraktekkan konsep Kebun Sekolah, terutama sekolah-sekolah yang menggunakan pendekatan alam dalam kegiatan belajarnya. Konsep sekolah yang dikenal dengan sebutan ‘Sekolah Alam’ ini memiliki program Kebun Sekolah yang mendidik para muridnya melakukan kegiatan berkebun. Tidak hanya sekolah alam, konsep Kebun Sekolah juga sudah dipraktekkan oleh sekolah-sekolah umum, termasuk sekolah yang dikelola pemerintah.

Dalam konsep Kebun Sekolah, pembelajaran tentang pertanian bahkan dikaitkan dengan lingkungan. Siswa diperkenalkan berbagai jenis sayuran yang bisa ditanam. Penjelasan cara bercocok tanam sayuran, cara penyiapan lahan, dan pengendalian hama penyakit, dan cara membuat pupuk organik. Dengan demikian, diharapkan siswa mampu memengaruhi orang tuanya untuk gemar bertanam sayur di rumah masing-masing.

Partisipasi siswa dalam kebun sekolah bukan hanya dalam budidaya akan tetapi juga dalam kegiatan pengamatan tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman sampai panen. Kegiatan panen dilakukan untuk setiap macam komoditas sayuran, hasilnya dilakukan penimbangan dan pencatatan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.

Tujuan sekolah mengimplementasikan Kebun Sekolah adalah untuk memperluas pengenalan model kebun keluarga kepada siswa. Melalui program Kebun Sekolah, para guru memperkenalkan teknik menanam sayuran yang tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sayuran, tapi juga untuk menanamkan kesadaran pentingnya siswa mengonsumsi berbagai jenis sayuran.

Kehadiran Kebun Sekolah untuk membiasakan para siswa untuk mengonsumsi berbagai jenis sayuran bukanlah tanpa alasan. Konsumsi buah dan sayur di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Konsumsi sayur di Indonesia pada tahun 2005 ialah 35 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 40 kg/kapita/tahun (Agroprima,2010). Berdasarkan kajian Badan Litbang Pertanian, Kementerian

Pertanian, tingkat konsumsi buah per kapita 35 kg/tahun, sedangkan tingkat konsumsi sayuran per kapita 40 kg/tahun. Sebagai perbandingan, konsumsi buah dan sayur per kapita warga Singapura dan Vietnam melebihi 100 kg/tahun (Abdurrahman, 2013).

Implementasi Pertanian Masuk Sekolah

Konsep Kebun Sekolah yang sudah berjalan di sejumlah sekolah akan menjadi modal untuk mengimplementasikan program Pertanian Masuk Sekolah. Kegiatan Pertanian Masuk Sekolah dijadikan sebagai salah satu komponen kegiatan *Family Farming* yang menjadi program Menteri Pertanian untuk enam bulan pertama Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Sebagai tahap awal, kegiatan Pertanian Masuk Sekolah dilaksanakan di 68 Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 34 provinsi. Sekolah yang dipilih setidaknya memiliki lahan seluas 500 meter persegi dan sumber air yang akan digunakan untuk irigasi. Pemilihan sekolah juga ditentukan dari komponen guru dan murid yang memiliki respon tinggi terhadap program ini.

Program Pertanian Masuk Sekolah tidak hanya berfokus pada budidaya sayuran dan buah, tapi juga komoditas-komoditas pertanian lain, seperti komoditas pangan dan peternakan. Dengan pendekatan ini, para siswa akan dilatih menanam sayuran, umbi, buah, juga bertenak ayam dan kelinci.

Dengan program Pertanian Masuk Sekolah, diharapkan para siswa SMA setelah lulus dibekali dengan keterampilan di bidang pertanian. Di tengah ancaman pengangguran yang terus meningkat, pertanian bisa menjadi sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. Selain keterampilan praktis, para siswa diberikan pengetahuan tentang peluang usaha dibidang pertanian, potensi ekonomi yang besar dan lapangan pekerjaan pada pertanian modern.

Implementasi program Pertanian Masuk Sekolah tentunya tidak bisa hanya mengandalkan inisiasi Kementerian Pertanian. Selain kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, program ini melibatkan pemerintah daerah. Sinergi dengan banyak pihak dibutuhkan dalam melakukan survey untuk mengetahui pengetahuan guru dan siswa tentang dunia pertanian, *training of trainer* (TOT) kepada guru, penyusunan kurikulum, praktik dan pelaksanaannya.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi banyak pihak, program Pertanian Masuk Sekolah bisa berjalan baik dan berdampak positif terhadap pembangunan pertanian Indonesia. Seperti peribahasa “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”, gerakan meningkatkan partisipasi para anak muda ini bisa menjadi langkah substantif dalam memajukan pertanian Indonesia.

CEGAH KONVERSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PENYEDIAAN PANGAN MASA DEPAN

Alih fungsi lahan pertanian guna peruntukan lain terus berlangsung di Indonesia dengan laju yang mengkhawatirkan. Setiap tahun sekitar 60.000 hektare sawah berubah menjadi perumahan, pabrik, jalan tol dan penggunaan lain di luar pertanian. Angka tersebut setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 300.000 ton setiap tahun.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 1,19% per tahun menuntut peningkatan kebutuhan lahan permukiman, industri, dan infrastruktur. Semua itu mendorong peningkatan permintaan lahan pertanian dan non pertanian secara simultan. Dalam kenyataannya, sektor pertanian tumbuh dengan laju 3,54% per tahun sementara non pertanian tumbuh sebesar 6,10% per tahun. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kebutuhan lahan sedangkan lahan tidak bertambah sehingga akibatnya luas lahan yang tersedia pun semakin berkurang.

Terkait hal ini, pertumbuhan ekonomi mau tidak mau memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang akan berakibat pada penurunan produksi pangan. Kondisi demikian mengancam ketahanan pangan nasional dan akhirnya akan memberikan sinyal tanda bahaya bagi ketahanan nasional.

Indonesia tentu tidak dapat membiarkan alih fungsi lahan ini terus berlangsung kalau ingin mewujudkan negara ini mandiri pangan, bahkan sebagai lumbung pangan dunia. Apalagi kalau merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals, SDGs*) yang menyebutkan “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian keberlanjutan”.

Oleh karena itu, seluruh kebutuhan lahan tersebut harus ditata sebaik-baiknya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa setiap penyusunan rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kemampuan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan alat kontrol pemerintah dalam menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan dan alih fungsi lahan sawah, sehingga mengancam daya dukung wilayah secara nasional serta kedaulatan pangan. Padahal, sumber daya lahan (dan air) adalah sumber daya alam yang terbatas dan lahan yang telah terkonversi tidak terbarukan.

Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan pemicu bencana. Dengan demikian perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang.

Dalam menentukan daya dukung lingkungan hidup, pemerintah perlu mengetahui kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan manusia dalam pemanfaatan ruang. Ukuran kapasitas dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi faktor pembatas dan kontrol dalam penentuan pemanfaatan ruang yang tepat.

Penentuan DDLH dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu kemampuan dan kesesuaian lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Dalam penentuannya, DDLH tidak dapat dibatasi oleh batas wilayah administratif, tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan ekologis dari suatu ruang wilayah.

Pengaplikasian rencana tata ruang dan wilayah yang sesuai dengan DDLH akan mendukung komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini akan menjadi citra positif Indonesia di dunia internasional dan bukti nyata komitmen Indonesia dalam "Agenda 2030" *Sustainable Development Goals*.

Dalam koridor ini, Kementerian Pertanian menjalankan kebijakan peningkatan produksi untuk swasembada beras. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri mengutamakan dari produksi domestik. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan kebijakan pengembangan kawasan pertanian dan pengembangan sarana dan infrastruktur.

Dengan berbagai pertimbangan, Kementerian Pertanian telah menyusun neraca ketersediaan sawah dan kebutuhan lahan. Terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi kebutuhan sawah di Indonesia. Pertama, jumlah penduduk (proyeksi tahun 2035) mencapai 305.652.400 jiwa. Kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, tingkat konsumsi beras sebesar 111,58 kg/kapita/tahun. Ketiga, dari data Pusat Data dan Sistem Informatika (Pusdatin) Kementerian Pertanian 2018, produktivitas rata-rata padi sebesar 5,76 ton/ha, indeks pertanaman 1,53%, rendemen gabah ke beras 62,74%, laju alih fungsi sawah 2,53% dan stok beras cadangan pemerintah sebanyak 11,67%.

Berdasarkan hal-hal tersebut, melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN No 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018, ditetapkan bahwa luas lahan baku sawah nasional sebesar 7.105.145 hektare. Luasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi berbagai kebijakan, termasuk RDKK pupuk bersubsidi.

Dasar Hukum Cegah Alih Fungsi Lahan

Dalam agenda Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, difokuskan pada peningkatan kedaulatan pangan. Untuk itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pertama, mengamankan lahan sawah beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi, salah satunya melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Program ini diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani.

Kedua, pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

Ketiga, perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait dengan penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B).

Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan, yakni (1) dukungan Peraturan Daerah, (2), pemahaman terhadap karakteristik sumber daya lahan pertanian, (3) identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan, (4) struktur penguasaan lahan petani, (5) fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali, (6) perpecahan (*division*) dan perpecahan (*fragmentation*) lahan dan (7) pentingnya pengembangan pusat informasi.

Arah pengaturan dari UU PLP2B adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri. Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai.

UU tersebut juga telah menyebutkan dengan tegas sanksi bagi perorangan maupun perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menjelaskan dengan rinci denda dan hukuman yang akan menimpa mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Guna memperkuat kedudukan UU PLP2B, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunannya, yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan UU PLP2B tersebut, di antaranya Perpres No 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres tersebut menjelaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun. Mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, juga bakal membuat kesejahteraan petani menurun.

Tidak cukup dengan itu, untuk pelaksanaan dari UU ini diperlukan pengaturan lebih lanjut pada peraturan di bawahnya, dari Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun sayang, dewasa ini baru beberapa daerah yang aktif mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah diperlukan untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan. Misalnya Peraturan Daerah yang mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan pendirian bangunan di lahan yang diirigasi teknis. Dengan adanya peraturan yang mengatur hingga masalah teknis tersebut, peluang untuk alih fungsi lahan pertanian pangan semakin kecil dan

secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan secara nasional. Dengan demikian upaya persuasif kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan UU PLP2B sungguh sangat diperlukan.

Upaya Kementerian Pertanian

Untuk kepentingan pembangunan pertanian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara tegas menyampaikan akan melawan usaha mengubah alih fungsi lahan. Ia minta agar perlawanan pada alih fungsi lahan dilakukan secara sinergi dengan pro-aktifnya peranan pemerintah daerah melakukan pencegahan secara optimal.

Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, Kementerian Pertanian melakukan pengawalan verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Kementerian Pertanian juga terlibat dalam pengawalan pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunan lainnya dapat dilaksanakan lebih optimal.

Sebagai sudah disebut di atas, saat ini ada 7,1 juta hektare lahan baku sawah nasional yang ditetapkan pemerintah. Dari jumlah tersebut, 5 juta hektare sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Untuk menjaga keberlangsungan lahan-lahan ini, sesuai dengan mandat Perpres 59/2019 dan tupoksi Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian akan terus menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian sebagai salah satu bentuk insentif bagi daerah-daerah atau lahan-lahan yang mempertahankan fungsi sawah. Berdasarkan pasal 20 Permen 59/2019, bantuan bisa diberikan dalam beberapa bentuk seperti sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan /atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang tidak kalah penting untuk menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan adalah dengan sesegera mungkin membenahi akurasi data luasan lahan pertanian. Data presisi luas lahan pertanian menjadi variabel utama menahan laju alih fungsi lahan sehingga kedaulatan pangan nasional dapat diwujudkan, menciptakan *single data* merupakan langkah awal untuk mencegah alih fungsi lahan. Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang telah melakukan koordinasi, dan sepakat untuk melakukan penghitungan presisi dan verifikasi lahan baku sawah nasional. Data pertanian harus satu, data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya harus sama, termasuk data lahan dan produksi, Komitmen dan sinergi semua pihak yakni pemerintah pusat dan daerah menjadi modal utama menekan konversi lahan.

Harus disadari keberlanjutan pertanian dan kecukupan pangan nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak bisa disangkal bahwa keberlanjutan pertanian pangan membutuhkan aksi nyata pada pelestarian, perlindungan dan peningkatan sumber daya alam.

Untuk itu diperlukan sinergi dari seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan pertanian, dan non pertanian khususnya kawasan industri, permukiman dan infrastruktur demi perencanaan tata ruang yang lebih baik. Dengan demikian sangat dibutuhkan langkah konkret agar pembangunan terus berjalan namun lahan pertanian tetap terlindungi. Adalah merupakan tantangan pembangunan bagi perencana maupun penata ruang dalam memadukan seluruh kepentingan tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. (*)

PENYELAMATAN LAHAN PERTANIAN

Lahan dalam sektor pertanian tidak dapat digantikan dalam proses usaha pertanian. Perannya utama dan unik. Karena itu, ketersediaan lahan dapat disebut sebagai *conditio sine-qua-non* (syarat mutlak) dalam pengembangan pertanian secara berkelanjutan (*sustainable agriculture*), termasuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

Maka tak heran sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2019 lalu, Syahrul Yasin Limpo berulang kali menegaskan komitmennya untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Saat melepas ekspor komoditas pertanian di Pangalengan, Bandung, Sabtu (11/1/2019), Pak Syahrul menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang mencoba mengalihfungsikan lahan pertanian. Mengutip pernyataan lengkap beliau, "Alih fungsi lahan musuh kita bersama. Siapapun itu, pejabat yang menandatangani (untuk mengalihfungsikan lahan), akan dihukum."

Ketegasan terhadap para pelaku alih fungsi lahan wajib dilakukan. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian memang semakin dahsyat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 399/KEP-23.3/x/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah rata-rata berkurang 2,53 persen atau seluas 205.440 hektare per tahun bila dibandingkan hasil audit sawah 2013. Dengan laju konversi tersebut, tercatat luas lahan baku sawah nasional pada tahun 2018 seluas 7.105.145 hektare.

SK Menteri ATR/BPN tersebut saat ini sedang direvisi sehingga luas sawah kemungkinan bisa bertambah dan rerata laju konversi sawah pun bisa jadi tidak sebesar itu. Tapi hasil audit yang dilakukan Kementerian ATR/BPN mutlak dijadikan sebagai lampu merah bagi kita semua.

Kompetisi pemanfaatan ruang untuk kebutuhan masing-masing sektor semakin ketat. Sektor properti, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain, seiring dengan pertumbuhan penduduk, juga membutuhkan lahan. Kebutuhan lahan setiap sektor ini pada akhirnya turut memaksakan perubahan fungsi lahan pertanian, khususnya sawah.

Lahan sawah memang menjadi sasaran empuk untuk dialihfungsikan. Selain memiliki lanskap datar, lahan sawah sudah memiliki infrastruktur yang mapan dan berada dekat dengan jalan. Terjadinya alih fungsi lahan tentunya sangat merugikan bagi pembangunan pertanian nasional. Tidak hanya menyebabkan pengurangan luas penggunaan sawah, tapi juga menimbulkan kerugian investasi yang besar, terutama tidak berfungsinya sarana dan prasarana infrastruktur terutama irigasi yang telah dibangun.

Dengan kondisi tersebut, alih fungsi lahan pertanian menjadi momok yang menakutkan dan mengancam produksi pangan nasional saat ini maupun di masa depan. Apalagi Indonesia masih memiliki harapan besar untuk tidak hanya swasembada pangan, tapi juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat dunia.

Strategi Pengelolaan Lahan Pertanian

Untuk menyaingi laju konversi yang terus meningkat, sejumlah strategi terus dijalankan pemerintah. Pertama, pemerintah mendorong ekstensifikasi lahan, seperti pembukaan lahan baru untuk peruntukan tanaman pangan secara permanen, pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk komoditas pangan, pemanfaatan lahan terlantar untuk peruntukan cadangan pangan, pemanfaatan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk tanaman pangan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi dan konservasi lahan kritis yang dimanfaatkan untuk peruntukan tanaman pangan.

Strategi lain yang dijalankan adalah intensifikasi lahan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengelola lahan pertanian sebaik mungkin yang bertujuan meningkatkan produksi. Langkah yang dilakukan meliputi optimasi lahan pertanian, pengembangan pertanian pangan metode *System of Rice Intensification* (SRI), dan peningkatan kesuburan tanah.

Strategi pengelolaan lahan yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan kebijakan pengendalian. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Salah satu amanah mendasar dari UU No 41 tahun 2009 adalah Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdiri dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan Kawasan dilakukan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota. Sedangkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kota.

Melalui komitmen penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota, diharapkan alih fungsi lahan pertanian bisa lebih terkendali. Selain itu Perda RTRW juga berfungsi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian izin lokasi pembangunan skala besar sehingga terbentuk keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya Kementerian Pertanian juga melakukan pengawalan penetapan LP2B dalam Perda RTRW melalui pemberian persetujuan substansi dalam Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018. Disamping itu, Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi dan koordinasi baik di tingkat pusat dan di daerah dengan instansi terkait dalam rangka upaya pengendalian lahan sawah. Sampai Oktober 2019 sudah 221 Kabupaten dan 17 Provinsi yang menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dan terdapat 66 Kabupaten dan 16 Provinsi yang menerbitkan Perda LP2B.

Namun dalam pelaksanaannya, belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW dan bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B dan juga belum didukung data spasial yang menunjukkan zonasi penetapan LP2B tersebut. Ini karena berbagai kepentingan yang saling berbenturan antara penyediaan pangan dengan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya di sektor perumahan, infrastruktur dan industri.

Aktor Kunci dalam Perlindungan Sawah

Untuk memperkuat implementasi perlindungan lahan sawah, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres tersebut akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Tanah Air.

Salah satu amanah penting dalam Perpres ini adalah pembentukan tim terpadu. Tim terpadu ini tidak hanya mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, tapi juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Tim terpadu diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara posisi ketua harian diisi Menteri ATR/BPN dan keanggotaan diisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial. Keberadaan tim terpadu menegaskan bahwa pemerintah menyadari pengendalian alih fungsi lahan pertanian membutuhkan kerja sama banyak pihak.

Dalam arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain. Seandainya terjadi pengalihan fungsi areal tersebut, maka wajib disediakan lahan pengganti.

Penggantian lahan pertanian yang dialihfungsikan mengikuti aturan bahwa apalagi yang dialihfungsikan merupakan lahan beririgasi, maka penggantianannya paling sedikit sebanyak tiga kali luas lahan. Sementara apabila yang dialihfungsikan merupakan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut, penggantianannya paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan.

Untuk memperkuat komitmen pemerintah dan pelaku pembangunan pertanian di tingkat daerah, Perpres Nomor 59 Tahun 2019 juga turut mengatur pemberian insentif. Pemerintah pusat memberikan insentif bagi lahan sawah dilindungi kepada Pemda yang sawah di daerahnya dilindungi dan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Insentif juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki atau mengelola sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Insentif yang diberikan dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedepan diharapkan basis pemberian bantuan pemerintah berdasarkan lahan yang dilindungi sehingga bantuan pemerintah tidak diberikan kepada lahan lahan yang telah dan yang akan dialihfungsikan. Oleh sebab itu bantuan pemerintah sebagai insentif akan memastikan keberlanjutan program tersebut maupun dampaknya.

Lahirnya Perpres nomor 59 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pemerintah pusat menyadari peran penting pemerintah daerah sebagai aktor utama pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Tak dapat dipungkiri bahwa diperlukan sinergi antara pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan lahan pertanian Indonesia.

Sebagai bagian dari tim terpadu, Menteri Pertanian sudah menunjukkan komitmennya. Jajaran Kementerian Pertanian pun siap secara penuh terlibat sehingga alih fungsi lahan pertanian bisa terkendali. Kami harapkan semua elemen pembangunan pertanian pun bisa turut menunjukkan komitmennya. Bagaimanapun, keberlanjutan pertanian Indonesia sangat bergantung pada aksi nyata semua pelaku pembangunan pertanian dalam melestarikan dan melindungi lahan kita.

BENIH *IN-SITU* BERBASIS KORPORASI

Tantangan dan hambatan pembangunan pertanian di masa mendatang kian kompleks, terutama pada upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Pengalihan fungsi lahan pertanian terus terjadi sekitar 100 ribuan hektare tiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian juga mengalami penurunan karena generasi muda enggan bekerja di sektor pertanian. Padahal bangsa ini memiliki harapan besar dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Segala tantangan dan hambatan dalam pembangunan pertanian, terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, penting untuk diurai satu per satu karena sektor pertanian sesungguhnya adalah lokomotif pembangunan nasional dan basis ekonomi kerakyatan. Keberhasilan pembangunan pertanian akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan jumlah pengangguran, mengecilnya koefisien gini rasio sebagai indikator tingkat ketimpangan kota dan desa, serta peningkatan pendapatan per kapita di pedesaan.

Langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan berbagai harapan itu? Pemerintah saat ini memang terus melakukan gebrakan untuk mendukung transformasi pembangunan pertanian. Salah satunya dengan mewujudkan kemandirian pangan yang tidak hanya semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga turut berorientasi pada kesejahteraan petani. Peningkatan produksi tidak mungkin bisa dijalankan jika petani sebagai pelaku produksi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Karena itu, pembangunan pertanian pun perlu dikuatkan dari hulu hingga hilir.

Penguatan hulu hingga hilir ini dilakukan melalui wadah korporasi petani. Melalui wadah ini, transformasi pembangunan pertanian dimulai dengan membangun sistem pertanian dengan teknologi tinggi berbiaya rendah dan digitalisasi. Para petani yang tergabung dalam wadah korporasi ini juga diajak untuk berpikir dan bergerak dengan manajemen modern, dimulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasarannya.

Penguatan Hulu Pertanian

Penggiatan korporasi petani diharapkan bisa mendongkrak produksi pertanian. Pada tahun ini, Kementerian Pertanian telah menargetkan peningkatan produksi beberapa komoditas pangan utama, yaitu target produksi padi ditetapkan sebesar 59,15 juta ton, jagung 24,17 juta ton, kedelai 0,42 juta ton, bawang merah 1,66 juta ton, cabai besar 1,35 juta ton, serta komoditas strategis lainnya ditargetkan pada tahun 2020 meningkat rata-rata 7% dibandingkan tahun 2019.

Target peningkatan produksi komoditas pangan utama pada tahun ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mencapai swasembada dan menempatkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah perlu melibatkan partisipasi *stakeholder* pembangunan pertanian. Sinergi dengan *stakeholder* diperlukan untuk melakukan revitalisasi sistem perencanaan program/kegiatan, pengelolaan sumberdaya pertanian dan hilirisasi, pada ujungnya, diharapkan terjadi peningkatan produksi.

Faktor yang cukup berpengaruh untuk meningkatkan produksi pertanian adalah benih varietas unggul. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai terobosan perbaikan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi, sertifikasi (kualitas) dan sistem distribusi perbenihan nasional. Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah baik di dalam maupun di luar habitatnya, dan atau melalui usaha introduksi dari luar negeri.

Benih merupakan penciri dan penentu produktivitas sehingga memiliki posisi penting dalam usaha pertanian. Dalam benih terkandung potensi genetik produksi yang akan memberikan tingkat hasil dalam usaha pertanian. Sebagus apapun faktor lingkungan disediakan seperti ketersediaan unsur hara dan yang lainnya, manakala potensi genetik benihnya rendah, maka rendah pula produksi yang dihasilkannya. Karena itu, persoalan benih harus mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian kita.

Soal perbenihan tanaman diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/1995 yang menjelaskan bahwa benih tanaman adalah salah satu sarana budidaya tanaman. Benih memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman. PP ini mengamanahkan agar sistem perbenihan tanaman mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan. Akan tetapi, sejauh ini, pengelolaan perbenihan nasional belum menunjukkan kinerja maksimal, mulai dari ketersediaan, jangkauan/distribusi, kualitas dan harga.

Untuk mengejawantahkan PP No. 44/1995, Menteri Pertanian, melalui Kepmen No. 726/Kpts/KB.20/12/2015 menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam rangka perbanyakan benih/bibit sebar ES atau BR komoditas strategis yang bermutu, untuk percepatan diseminasi varietas unggul, dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menjamin tingkat kualitas (kemurnian genetik) dan daya tumbuh benih/bibit sebar.

Keputusan Menteri Pertanian tersebut menjadi legalitas bagi institusi riset untuk melakukan perbanyakan benih sebar dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki terutama peneliti, infrastruktur dan kelompok pemangku kepentingan lainnya yaitu Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan penangkar dalam rangka ketersediaan benih/bibit strategis komoditas pertanian sebagai upaya mendukung swasembada pangan dan lumbung pangan dunia dimasa mendatang.

Peranan UPBS dan penangkar dalam memproduksi benih bermutu sangatlah strategis. Oleh karena itu, UPBS dan petani penangkar harus mempunyai kapasitas yang memadai. Selain memiliki kapasitas individu, petani sebaiknya menjalankan usaha bersama secara kolektif dalam suatu Korporasi Petani. Korporasi Petani digagas untuk melahirkan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum, dapat berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal oleh petani.

Metode Perbenihan untuk Korporasi Petani

Mengacu pada pentingnya perbenihan dalam produksi pertanian, maka perlu dicarikan metode produksi benih yang cocok untuk korporasi petani. Berdasarkan pengalaman, produksi benih *in-situ* kompatibel dengan kelembagaan petani berbasis korporasi. Perbenihan *in-situ* adalah perbenihan yang dilakukan dengan mengambil areal target (*on-site*), dalam ekosistem alami atau aslinya. Produksi benih *in-situ* dapat dilakukan dengan pemberdayaan kelompok tani sebagai produsen benih dan bermitra dengan produsen benih.

Program Kostratani juga wajib diintegrasikan dalam model produksi benih *in-situ*. Produksi dilakukan pada setiap posko Kostratani, dengan luas hamparan 10-20 hektare untuk kebun benih, demi memenuhi kebutuhan benih setiap wilayah Kostratani.

Secara matematis, kebutuhan benih padi 2019 sebesar 353.761 ton (setara Rp 3,46 triliun). Penyediaan benih 220.738 ton (Rp 2,16 triliun). Dari penyediaan benih bersertifikat tersebut digunakan petani 186.936 ton (Rp 1,83 triliun) dengan rincian untuk program 59.309 ton (16% atau Rp 581 milyar) dan swadaya petani 127.626 ton (36% atau Rp 1,25 triliun) serta sisanya 47,15%

petani masih menggunakan benih tidak bersertifikat. Total penggunaan benih bersertifikat 52,84%.

Sedangkan kebutuhan benih jagung pada 2019 sebanyak 102.533 ton (setara Rp 4,51 triliun). Penyediaan benih 102.940 ton (Rp 4,52 triliun). Dari penyediaan benih bersertifikat tersebut digunakan petani 58.673 ton (Rp 2,58 triliun) dengan rincian untuk program 32.237 ton (31% atau Rp 1,41 triliun) dan swadaya petani 26.436 ton (25% atau Rp 1,16 triliun) serta sisanya 42,78% petani masih menggunakan benih komposit/non hibrida. Total penggunaan benih bersertifikat 57,22%.

Untuk kebutuhan benih kedelai Tahun 2019 sebesar 10.313 ton (setara Rp 122 milyar). Penyediaan benih 10.212 ton (Rp 121 milyar). Dari penyediaan benih bersertifikat tersebut digunakan petani 5.488 ton (Rp65 milyar) dengan rincian untuk program 4.856 ton (47% atau Rp 57 milyar) dan swadaya petani 631 ton (6 % atau Rp 7,5 milyar) serta sisanya 46,79% petani masih menggunakan benih no sertifikat. Total penggunaan benih bersertifikat 53,21%.

Jika diasumsikan harga benih padi Rp. 9.800,-/kg; benih jagung hibrida Rp. 40.000,-/kg; dan benih kedelai Rp. 12.000,-/kg, maka harga benih untuk tiga komoditi; padi, jagung dan kedelai berkisar 8 triliun setiap tahun. Jika pemenuhan benih dapat dilaksanakan melalui produksi benih *in-situ* di setiap lokasi pengembangan dengan pemberdayaan kelompok tani sebagai produsen benih dan bermitra dengan produsen benih, maka petani setidaknya dapat efisiensi penggunaan dana untuk kebutuhan benih sekitar 4 triliun rupiah/tahun, dengan asumsi biaya produksi sebesar 50 persen.

Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi kelompok tani dengan menyiapkan biaya sarana produksi untuk benih sumber, pupuk, dan pestisida. Pemenuhan benih sumber untuk kegiatan produksi benih oleh kelompok tani diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP, BB Padi, Balitkabi, Balitserereal dan Perguruan Tinggi), maka efisiensi penggunaan dana untuk produksi benih akan lebih besar lagi. Kelompok tani yang akan mengembangkan kelembagaan petaninya menjadi kelembagaan ekonomi petani, dapat memanfaatkan permodalan dari perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit lainnya. Pemanfaatan hasil penangkaran benih *in-situ* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan benih petani pelaksana program di daerah setempat melalui posko Kostratani dan wilayah sekitarnya yang membutuhkan atau bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan benih pasar bebas.

Pengembangan metode perbenihan *in-situ* berbasis korporasi yang bertujuan memperbanyak penggunaan benih bermutu ini kita harapkan bisa memperkuat fondasi pembangunan pertanian di masa depan. Dimulai dengan penggunaan benih bermutu, semoga cita-cita Indonesia sebagai produsen pangan mencukupi kebutuhan dalam negeri bahkan bagi masyarakat dunia bisa tercapai.

KUR UNTUK PERTANIAN

Untuk mendorong sektor pertanian yang terus maju, modern, dan mandiri, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan meningkatkan partisipasi masyarakat tani untuk memanfaatkan paket Kredit Usaha Rakyat (KUR). Paket ini untuk mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Harapannya, ini dapat meningkatkan akses ke sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, dan meningkatkan pasar produk UMKMK.

Selain itu, KUR juga diharapkan mampu menghilangkan stigma pembangunan pertanian yang cenderung dilakukan dengan pendekatan sinterklas.

Paket Kebijakan ini ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak, belum memiliki agunan tambahan, atau agunan tambahannya belum cukup. UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif, antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Pagu anggaran KUR pada 2020 sebesar Rp 190 triliun, dengan suku bunga enam persen. Suku bunganya turun satu persen dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Sektor pertanian memperoleh bagian lebih dari 25 persen atau sebesar Rp 50 triliun. Kalau pagu KUR ini terpakai habis pada 2020, dan digunakan sesuai peruntukan, target dan sasaran KUR bisa menjadi pengungkit hadirnya pertanian maju, dan mandiri.

Dengan input Rp 50 triliun, dalam dua kali musim tanam, setidaknya dapat memutar Rp 500 sampai Rp 1.000 triliun, dalam hitungan makro ekonomi. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, daya serap KUR sangat rendah. Rata-rata realisasi KUR pada semua sektor tiga tahun terakhir hanya sekitar 15 persen. Sedangkan KUR yang terserap pada sektor pertanian, pada tahun berjalan hingga Oktober 2019, sebesar Rp 28,7 triliun dan diakses oleh 1.224.932 orang.

Angka ini telah mengalami kenaikan hampir Rp 10 triliun dibandingkan tahun 2018, yang hanya terserap sebanyak Rp 19,65 triliun dan hanya diakses oleh 894.620 pelaku usaha sektor pertanian. Realisasi KUR per subsektor pertanian selama 2016-2018, belum menunjukkan pencapaian menggembirakan. Secara statistik, subsektor perkebunan paling tinggi daya serapannya, yakni rata-rata 38,71 persen.

Sektor tanaman pangan sebanyak 29,71 persen, peternakan 18,05 persen, hortikultura 13,53 persen. Mengapa daya serapan KUR masih cukup rendah? Pertama, soal agunan. Pinjaman sebesar Rp 25 juta semestinya tidak menggunakan agunan. Namun kenyataan di lapangan, pinjaman sebesar Rp 25 juta diwajibkan memakai agunan oleh bank pelaksana. Kedua, masalah *grace period*. Perlu mempertimbangkan kekosongan *grace period* untuk kredit sektor pertanian.

Terutama pada sektor perkebunan dan peternakan, mengingat komoditas perkebunan dan peternakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil panen. Ketiga, sektor pertanian dianggap oleh bank pelaksana sebagai sektor dengan risiko tinggi. Padahal, NPL terendah dari semua sektor pengguna KUR adalah sektor pertanian, hanya 1,4 persen.

Untuk meningkatkan daya serap KUR, pada sektor pertanian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengampanyekan pentingnya pertanian yang maju, modern, dan mandiri. Petani, institusi keuangan, pemda, dan swasta harus bahu-membahu membangun pertanian, memanfaatkan KUR. Kerja sama antara Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta dan perbankan, akan menjadi kunci keberhasilan program KUR.

Sosialisasi secara intensif kepada kelompok tani, pendampingan petani untuk mengakses perbankan, optimalisasi pemanfaatan KUR, dan koordinasi dengan bank pelaksana harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Pemda juga perlu mengembangkan sistem informasi dan teknologi tentang permodalan, produk hilir, kemitraan, pasar, dan pendataan lapangan diperkuat pada simpul kecamatan. Kementerian Pertanian membangun konsep kelembagaan yang disebut Kostratani pada tingkat kecamatan. Pada kelembagaan Kostratani ini, semua informasi dilakukan secara digital, untuk memfasilitasi aliran informasi secara vertikal dan horizontal.

Dengan adanya Kostratani ini, diharapkan menjadi basis pemetaan dan pergerakan semua program dan kegiatan pertanian di lapangan. Maka itu, perlu pengoordinasian lebih baik mulai dari manajemen usaha tani, alat dan mesin, pupuk, benih, termasuk asuransi yang dimonitor dari Kostratani Kecamatan.

Hal lain yang cukup penting dilakukan untuk penyerapan KUR adalah komitmen bank pelaksana. Bank pelaksana bersama petugas pemerintah perlu melakukan supervisi kepada calon debitur, bank juga dapat merumuskan rencana bisnis perbankan untuk sektor pertanian. Dengan cara ini, anggapan sektor pertanian yang memiliki risiko tinggi dapat dikurangi, sekaligus dapat menekan NPL. Debitur yang sudah mendapatkan fasilitas kredit dan terbukti sukses pengembalian kreditnya dapat ditingkatkan plafon kreditnya.

Untuk meminimalisasi risiko, pemerintah memprioritaskan cakupan perluasan asuransi sebagai bentuk perlindungan kepada para petani, utamanya yang memiliki usaha kecil.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memiliki solusi berupa program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal dari klaim asuransi.

Dengan kata lain, petani akan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. Adapun, risiko yang dijamin dalam AUTP, yakni meliputi gagal panen akibat dari banjir, kekeringan, serangan hama.

Program AUTP ini dijalankan dengan skema subsidi pembayaran premi. Skema ini diharapkan mampu melindungi petani dari resiko kegagalan panen dan dapat segera memulai usaha tani lagi pada musim berikutnya. Perlindungan asuransi akan menjadi kebutuhan dalam usaha pertanian modern yang dikelola secara komersial.

PEMBIAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA TANI

Peran sektor pertanian bagi perekonomian nasional sangat signifikan, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan prioritas pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional. Usaha pertanian banyak menghadapi tantangan di lapangan, di antaranya permodalan petani dan risiko kegagalan usaha tani.

Perubahan iklim secara global berdampak terhadap risiko kegagalan oleh ketidakpastian alam, ditambah ketidakpastian harga pasar produk pertanian sering menjadi penyebab petani beralih ke profesi lain yang memberikan pendapatan finansial lebih baik dan dengan risiko yang lebih rendah.

Kecenderungan ini dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang enggan menggeluti sektor pertanian dan beralih ke sektor informal. Apabila hal ini terus berlanjut, maka swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional akan terancam.

Salah satu masalah yang dihadapi petani dalam pengelolaan usaha tani ialah keterbatasan modal dan kesulitan mengakses sumber pembiayaan, dari lembaga keuangan formal.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menunjukkan dari 8 ribu petani sampel, hanya 15% atau 1.200 petani yang sudah mengakses kredit bank. Sebesar 52% mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank.

Terdapat empat faktor permasalahan pada sektor kredit pertanian, yakni pemberian kredit tidak tepat sasaran, subsidi bunga, prosedur yang birokratis, dan tingginya risiko akibat dari "*moral hazard*." Kredit pertanian yang sebenarnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif justru digunakan usaha lain atau untuk konsumsi.

Subsidi melalui pemberian bantuan idealnya diubah menjadi pola pembiayaan melalui KUR. Pembiayaan dengan metode KUR lebih selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat tani yang maju, mandiri, dan modern. Dengan pola pembiayaan KUR, petani diharapkan

tidak pasif hanya “menunggu” bantuan, tapi secara aktif menangkap peluang dan potensi pengembangan usaha tani yang dijalankannya.

Terkait dengan hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan gigih mendorong petani untuk memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan usaha tani. Untuk meningkatkan pemanfaatan KUR oleh petani diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

Langkah pertama, pemerintah telah memangkas suku bunga KUR, dari sebesar 7% menjadi 6%. Penurunan suku bunga ini ditujukan agar pelaku usaha semakin tertarik untuk memanfaatkani program KUR.

Sektor pertanian yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai sektor produktif juga akan mendapatkan porsi kredit lebih besar. Dari total pagu anggaran KUR tahun 2020 sebesar Rp 190 triliun, sektor pertanian memperoleh bagian Rp 50 triliun.

Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga perbankan terus digiatkan. Menteri Pertanian dan jajarannya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan sejumlah bank pelaksana, untuk memperkuat komitmen bank selaku kreditur. Komitmen dari bank ini penting sehingga proses birokrasi pemberian kredit bisa dipermudah.

Langkah kedua, sosialisasi tentang KUR dan pendampingan di level kelompok tani, untuk mampu mengakses dengan perbankan, optimalisasi pemanfaatan KUR, dan berkoordinasi dengan bank pelaksana. Kementerian Pertanian memanfaatkan para penyuluh dalam program Kostratani. Kelembagaan Kostratani yang diusung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mewajibkan penyuluh berperan mendampingi dan mengoordinasikan pemanfaatan dana KUR untuk pelaksanaan usaha tani termasuk penggunaan sarana dan prasarana, seperti alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih, dan asuransi. Dengan begitu, efektivitas penggunaan dana KUR bisa lebih terjamin.

Perlindungan usaha tani, Ditengah tantangan besar risiko akibat perubahan iklim, fluktuasi harga, dan pengaruh kesepakatan pasar regional, perlindungan usaha tani sangat dibutuhkan. Upaya peningkatan produksi sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, perlu didukung dengan perlindungan terhadap risiko bisnis pertanian agar dapat bangkit kembali, tidak gigit jari ketika mengalami kegagalan usaha taninya. Kementerian Pertanian membuat program perlindungan asuransi pertanian dengan memberikan subsidi biaya premi hampir 80%.

Dengan mengambil asuransi pertanian, petani bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim. Dengan membayar premi Rp 36 ribu/hektar/musim, petani akan mendapatkan penggantian Rp 6 juta per hektare jika usahatani

padinya gagal panen disebabkan bencana banjir, kekeringan, atau diserang OPT seperti wereng dan tikus. Bantuan premi AUTP disediakan tahun 2020 bagi 1 juta ha sawah.

Untuk melindungi usaha tani peternak sapi/kerbau, Kementerian Pertanian membuat program asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Premi asuransi usaha ternak sapi yang harus dibayarkan sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp10 juta per ekor atau sebesar Rp200 ribu/ekor per tahun.

Bantuan premi (subsidi) dari pemerintah sebesar 80% atau Rp 160 ribu per ekor per tahun, peternak membayar sebesar 20% atau Rp 40 ribu/ekor per tahun. Untuk sapi bibit, besarnya premi yang dibayar sebesar Rp 300 ribu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 15 juta dan jangka waktu pertanggungan asuransi selama satu tahun.

Program Bantuan Premi AUTS/K untuk melindungi kematian sapi/kerbau petani tahun 2020 disiapkan sebanyak 120 ribu ekor. Dengan program asuransi pertanian ini, diharapkan mampu memitigasi risiko bisnis (usaha pertanian dan peternakan). Karena itu diharapkan usahatani bisa berdaya saing lebih baik.

Model pembiayaan dan perlindungan usaha tani yang dikembangkan pemerintah bertujuan agar Indonesia bisa mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani berkorelasi dengan peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani. Kita mengharapkan semua pihak yang terlibat turut menyukseskan program ini demi Indonesia yang semakin berjaya.

KEPEDULIAN NEGARA KEPADA PETANI

Untuk sektor pertanian, maju atau mandek bukan pilihan untuk diperdebatkan, karena usaha pertanian merupakan keniscayaan atau harga mati bagi sebuah bangsa yang harus diperjuangkan.

Tulisan ini untuk menjawab beberapa opini dan kritik dari pengamat yang masih saja pesimistis, merendahkan, dan ragu akan kesungguhan pemerintah membangun sektor pertanian. Kami merasa perlu mengklarifikasi dan meluruskan beberapa ulasan di media yang ada.

Pertama, kondisi di sektor pertanian tidaklah sesuram yang dibayangkan dan tidak perlu kita ratapi. Menyalahkan lingkungan global, pasar, bahkan mengeluhkan latar belakang sosial dan pendidikan para petani yang masih rendah, serta masalah sosial lain, sebaiknya kita jawab dengan kerja nyata.

Kedua, menurut kami, pekerjaan rumah (PR) dalam menyejahterakan petani merupakan kerja bersama menggalang kebersamaan semua pihak. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. PR kita ialah membangun gerakan bersama dengan berbingkai semangat kebangsaan.

Bingkai ini tidak hanya untuk didiskusikan, tetapi untuk diterapkan. Dalam membangun kebersamaan semua elemen pendukung, seperti pendidikan, struktur pasar, pelaku usaha, koperasi, dan input produksi diperlukan peran pemerintah daerah. Sementara itu, pada masalah keamanan dan ketertiban untuk distribusi input dan hasil pertanian, kita butuh dukungan TNI-Polri.

Ketiga, mengurus pertanian itu perlu strategi besar yang didesain bersama sehingga dalam praktik dan implementasinya semua elemen mampu bersinergi. Salah satu sinergi ialah masalah data. Semua pihak yang berkepentingan perlu bersinergi menyamakan dan menyepakati data tunggal pertanian.

Kesadaran itu telah dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antara Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan komitmen kerja bersama, kita akan memiliki data produksi dan data lahan baku sawah yang satu.

Berjuang memerdekakan petani

Pemerintah telah menjadikan pendidikan petani sebagai program prioritas dan kekuatan utama pertanian. Dengan begitu, tingkat kemandirian diharapkan akan menyusul seiring kapasitas SDM yang makin terasah.

Data sampai Oktober ini, tercatat ada 22.913 petani telah mengikuti pelatihan. Kemudian ada 2.991 orang dari 997 kelompok yang dididik dan dikonsentrasikan pada program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Di sana, mereka dibekali ilmu usaha dan bisnis strategis pada sektor pertanian. Belum lagi ada 168 orang yang mengikuti program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dan petani magang ke luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah sukses membangun infrastruktur dan memodernisasikan sektor ini dengan meningkatkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di level petani.

Perlu diingat, modal petani saat ini bukan hanya berupa modal tenaga. Petani di zaman sekarang sudah menggunakan berbagai alat mekanisasi berbasis robot dan *drone*, pesawat Aeropro yang dibuat anak negeri, maupun alat mekanisasi modern lainnya, seperti traktor, *combine harvester*, dan *rice transplanter*. Alat-alat supercanggih itu dirancang dengan fungsi yang beragam untuk mendukung kemajuan pertanian kita.

Kerja petani saat ini tidak lagi bergantung hanya pada pacul. Kerja mereka saat ini bisa dipercepat dengan deretan alsintan yang sudah disediakan. Simulasi ini bisa kita lihat dari pengolahan lahan seluas 1 hektare. Penggunaan pacul membutuhkan 40 orang dengan lama pengerjaannya total 400 jam, sedangkan dengan alsintan, waktu kerja yang diperlukan hanya 16 jam dan cukup digarap tenaga kerja 2 orang. Dengan demikian, pekerjaan petani lebih ringan ketimbang bertani zaman dahulu.

Selain alsintan modern, petani saat ini juga sudah didukung infrastruktur pertanian, seperti bendungan besar, saluran primer dan sekunder, embung dan irigasi. Pembangunan infrastruktur ini bukan kerja Kementerian Pertanian saja, melainkan juga melibatkan lembaga lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Ke depannya, Kementerian Pertanian juga terus mengoptimalkan program dan anggaran dari Kementerian lain untuk mendukung pembangunan pertanian. Upaya ini selanjutnya disebut *program and budget for agriculture* sebagai komitmen menyejahterakan petani beserta keluarganya.

Melalui upaya ini, Kementerian Pertanian menargetkan pertumbuhan ekonomi rakyat sebesar 5% melalui peningkatan produksi dan produktivitas,

efisiensi usaha pertanian, penurunan biaya, ekspansi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan air, serta mekanisasi dan dukungan inovasi teknologi.

Untuk meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan, Kementerian Pertanian juga sedang menyiapkan skema dukungan permodalan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasi perluasan asuransi pertanian sebagai perlindungan usaha pertanian.

Melalui *program and budget for agriculture*, Kementerian Pertanian berupaya mendorong peran swasta dan perbankan yang jauh lebih besar dalam pembangunan pertanian. Keterlibatan swasta dan perbankan dapat secara nyata memberikan dampak kesejahteraan terhadap petani dan keluarganya. Untuk itu, manajemen korporasi akan dijadikan sebagai basis utama yang terbangun dalam agroindustri.

Selain itu, melalui manajemen korporasi diharapkan produk pertanian semakin kompetitif untuk diekspor. Demikian juga dengan desain pembangunan pertanian ke depan yang akan sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo terkait dengan ekspor dan investasi.

Sementara itu, untuk menarik minat generasi muda, Kementerian Pertanian membangun Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern seluas 50 ribu hektare di 15 provinsi. Di kawasan ini nantinya akan dikembangkan pertanian modern yang didukung teknologi informasi.

Negara telah hadir

Tulisan ini bukan soal konsep dan ide-ide yang mengulas petani dan mengeksploitasinya untuk kepentingan tertentu. Jauh dari pada itu, Kementerian Pertanian sudah mengenalkan peranti digital dengan berbasis *artificial intelligence* untuk memonitor pembangunan pertanian di seluruh Tanah Air. Teknologi yang tersedia telah mampu menembus ruang dan jarak, yang mana petani dan para penyuluh kita sedang bergerak.

Pendekatan inilah yang sebenarnya kita harapkan. Menghilangkan ego sektoral demi persatuan serta menentang ketidakadilan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Barangkali inilah kenapa kita memerlukan sosok pemimpin yang berpengalaman mengelola daerah dan sumber daya pertanian. Presiden mungkin mengharapkan sosok panglima tani yang punya rekam jejak cemerlang dan itu ada pada Menteri Pertanian saat ini.

Pengalaman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak periode pertama kepemimpinannya (2008-2013), Syahrul Yasin Limpo telah menjadikan pertanian sebagai sektor utama fokus pembangunan di daerah tersebut.

Hasilnya jelas, pada 2007 produksi padi Sulsel baru mencapai 3,635 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 2,280 juta ton beras. Data BADAN PUSAT STATISTIK menunjukkan pada 2011, produksi padi Sulsel melejit ke angka 4,51 juta ton padi GKG dan kembali naik hingga menembus angka 5 juta ton pada 2012. Target surplus dua juta ton beras untuk Sulsel pun terlampaui. Pada penghujung 2017, bahkan jumlah produksi padi Sulsel mencapai 6,01 juta ton GKG.

Peningkatan surplus beras yang berhasil dicatatkan Sulsel dari tahun ke tahun secara konsisten menghantarkan provinsi ini menjadi pilar utama penyangga pangan nasional. Beras Sulsel telah dikirim ke berbagai provinsi di Tanah Air. Sulsel rutin mengirimkan berasnya ke 11 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Di Kementerian Pertanian, sejak awal memimpin, Syahrul sudah menggebrak dengan pembentukan Kostratani. Di sebuah ruangan yang dinamai *War Room*, sejumlah perangkat digital digunakan untuk memantau lalu lintas data kebutuhan petani melalui ujung tombak penyuluh yang ada di setiap kecamatan.

Melalui perangkat ini, pemerintah memantau berapa luasan panen dan waktu tanam, memantau potensi serangan hama, serta mengamati setiap pergerakan informasi pasar. Semua sistem ini terkoneksi langsung dengan data yang kini sedang dirampungkan.

Bagi Syahrul, data merupakan hal yang paling mendasar dan penting untuk dibenahi. Terlebih untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan begitu, tidak mungkin rasanya jika kesejahteraan petani diletakkan pada posisi bagian belakang sehingga menimbulkan tafsir tidak manusiawi dan zalim seperti yang ditulis beberapa pengamat.

Hal lainnya, Menteri Pertanian Syahrul juga berusaha keras menarik dana KUR sebesar Rp 50 triliun untuk menggenjot ekspor. Dengan dana sebesar itu, total KUR yang akan disalurkan untuk sektor pertanian pada 2020 bisa mencapai Rp190 triliun atau 26,4%.

Syahrul ialah birokrat senior yang meniti karier dari level desa. Kariernya melesat hingga ia duduk menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode. Kini, Syahrul menjadi harapan tercukupinya pangan bagi 267 juta warga Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, dia mengajak para petani, praktisi, maupun pengusaha agar mampu berjalan selaras menuju barisan depan untuk

kemakmuran. Kata dia, tidak boleh pertanian kita mundur atau berjalan stagnan. Apalagi jika terhenti dan bergantung pada petani *gerontocracy*. Hari ini kita perlu semangat baru yang memberi rasa optimistis.

Jadi, PR kita ialah menyatukan kekuatan semua elemen bangsa untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Bukan sebaliknya, menyurutkan semangat petani kita yang tengah meningkat. Kita percaya, di bawah komandan baru Kementerian Pertanian, kita mampu mewujudkan harapan itu.

Ketahanan Pangan *Dan* Diversifikasi Pangan



MELAWAN RAWAN PANGAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan sumber daya alam yang besar. Selain memiliki lahan yang luas, letak Indonesia juga menguntungkan secara geografis. Sebagai negara beriklim tropis, aneka jenis tanaman dapat tumbuh subur.

Namun di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2,5 juta setiap tahunnya. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk itu, menunjukkan negara membutuhkan strategi khusus untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Karena itu, ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah bangsa menggerakkan semua elemen untuk menyediakan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, serta dapat diakses secara merata dan terjangkau.

Sempat muncul kritik yang menyatakan bahwa tingkat ketahanan pangan Indonesia masih rendah kendati Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Padahal kalau kita mengutip data *The Economist Intelligence Unit* (EIU), kondisi yang terjadi justru sebaliknya.

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia secara keseluruhan terus meningkat secara konstan. Jika pada tahun 2014 IKP Indonesia berada di angka 47,7, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 54,8. Capaian tersebut menjadikan peringkat ketahanan pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah pembangunan pertanian di Indonesia.

Penilaian IKP terdiri dari empat aspek. Pertama, *affordability* atau keterjangkauan terkait dengan cara memotong rantai pasok yang panjang. Kedua, *availability*, yaitu ketersediaan dari terjaganya penawaran. Lalu ketiga, *quality and safety* terkait kualitas dan keamanan pangan standar nutrisi dan pengawasan impor. Keempat, sumber daya alam dan ketahanan (*resilience*) terkait dengan lahan dan produksi pangan.

Ketahanan pangan Indonesia dari aspek keterjangkauan memperoleh skor 55,2 berada di peringkat 63 dari 113 negara. Kemudian skor dari aspek ketersediaan 58,2 di peringkat 58, dari aspek kualitas dan keamanan memperoleh skor 44,5 di peringkat 84 serta dari faktor sumber daya alam memperoleh skor 43,9 menempati peringkat 111.

Peningkatan ketahanan pangan juga berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Selama periode 2014 - 2018, terlihat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Pada tahun 2018, NTP mencapai 102.46, meningkat dibandingkan NTP 2014 yang berada di angka 102.03. Pada tahun ini, NTP diperkirakan terus meningkat. Setidaknya rerata NTP Januari - November 2019 sudah berada di angka 103.09.

Sama seperti NTP, data NTUP juga menunjukkan peningkatan signifikan. NTUP 2018 mencapai 111.83, jauh meningkat bila dibandingkan NTUP 2014 yang berada di angka 106.05. Rerata NTUP Januari - November 2019 berada di angka 112.33.

Sinergi dan Kolaborasi Entaskan Rawan Pangan

Meskipun IKP Indonesia terus meningkat, kita tak bisa lantas bersikap lengah. Langkah-langkah strategis perlu terus dijalankan agar kebutuhan pangan masyarakat terus terpenuhi secara merata.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan berbagai program. Pada aspek ketersediaan, upaya dilakukan melalui peningkatan produksi penguatan cadangan dan penyediaan pangan aman. Untuk aspek keterjangkauan, pemerintah berupaya meningkatkan keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Sementara pada aspek pemanfaatan, pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, penguatan sistem pangan dan gizi, jaminan keamanan, dan upaya pendukung lainnya.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) 2019, teridentifikasi ada 88 kabupaten/kota di Indonesia yang rentan rawan pangan. Artinya, sekitar 17,1 persen daerah Indonesia yang masuk kategori rentan rawan pangan. Maka bisa disimpulkan

sebanyak 426 kabupaten/kota lainnya di Indonesia masuk kategori tahan pangan. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan FSVA 2015, karena ada 177 kabupaten yang meningkatkan status ketahanan pangannya dalam rentang tiga tahun.

Menurut Badan Ketahanan Pangan, Kabupaten rentan rawan pangan merupakan kabupaten yang memiliki masalah akses pangan karena minimnya infrastruktur untuk mendistribusikan pangan sehingga harga menjadi tinggi. Selain itu, daerah rentan rawan pangan juga memiliki kendala minimnya tenaga kesehatan dan pendapatan rendah. Artinya, tingkat kemiskinan sangat berkorelasi dengan rendahnya ketahanan pangan di sejumlah kabupaten/kota tersebut.

Ketahanan pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Untuk itu, sejumlah kementerian/lembaga berkolaborasi dengan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan. Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Kementerian Pertanian akan berperan dalam meningkatkan ketersediaan pangan dengan mendorong produksi dan distribusi pangan. Penyediaan infrastruktur akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kementerian Sosial akan memastikan ketersediaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara Kementerian Kesehatan akan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Tak hanya lintas instansi di tingkat pusat, kerja sama juga digiatkan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Lurah. Kementerian Pertanian saat ini menyusun rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah sebagai acuan ke depannya. Setiap provinsi harus ambil peran dan berani menyelesaikan masalah tersebut sehingga ketersediaan pangan benar-benar dicukupi sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya pertanian, baik melalui peningkatan produksi maupun kualitas pangan yang bernilai gizi tinggi.

Kerja sama dalam penanganan kerentanan rawan pangan sangat penting dan strategis. Melalui kerja sama lintas instansi, diharapkan semua daerah yang mengalami rawan pangan akan meningkatkan ketahanan pangannya.

Memberdayakan Petani dan Masyarakat

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan program pengentasan kerentanan pangan yang dijalankan pemerintah saat ini diarahkan agar setiap

individu atau warga negara terpenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan standar kecukupan gizi sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Berarti, tidak boleh ada satu orang pun yang merasakan kekurangan pangan di Indonesia. Pengentasan daerah rentan pangan harus dikerjakan bersama-sama lintas sektor dalam bentuk program yang sinergis dan konvergen pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa program saat ini dijalankan oleh Kementerian Pertanian dengan fokus memberdayakan petani dan masyarakat. Salah satunya, Kegiatan Korporasi Usahatani (PKU) yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan. PKU merupakan kegiatan strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan. Pada tahun 2019, sasaran PKU adalah 13 lokasi di daerah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan. Pengembangan usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5 dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (RTM-P) >20% dan atau daerah *stunting* berdasarkan data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017, Kementerian Kesehatan (indikator FSVA Nasional 2018).

Pada program ini, Kementerian Pertanian fokus pada pemberdayaan petani dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, penyusunan kelembagaan usaha, dan temu usaha. Kelembagaan petani pun dikuatkan dengan meningkatkan kapasitas kelompok, membangun jejaring pemasaran hingga mendorong pembentukan lembaga usaha yang berbadan hukum. Difusi teknologi dan inovasi turut digiatkan melalui pelatihan dan penerapan alat pengolahan.

Selain petani, upaya pemerintah untuk mengentaskan rawan pangan juga untuk masyarakat umum melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendorong rumah tangga keluarga memanfaatkan pekarangan sebagai lahan pertanian. Setiap kelompok KRPL memiliki minimal 30 rumah tangga keluarga.

Kegiatan KRPL meliputi pengembangan pekarangan sebagai lahan pertanian hingga pengolahan hasil pekarangan. Diharapkan KRPL dapat mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, serta pendapatan secara berkelanjutan.

Harus disadari penyebab kerawanan pangan di Indonesia bersifat multifactor. Karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor. Untuk terus meningkatkan ketahanan pangan kita perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 juta jiwa rakyat Indonesia. Bersama-sama, Kementerian Pertanian sangat yakin akan bisa mengatasi semua masalah rawan pangan, sebelum tahun 2030. Semoga.(*)

BUKAN HANYA BERAS

Di negara kita, bicara pangan, identik dengan beras. Berdasarkan pola pikir ini, maka ketahanan pangan Indonesia, selalu dikaitkan dengan capaian produksi dan cadangan beras nasional. Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk Indonesia, secara rata-rata mengonsumsi beras sebanyak 114,6 kg per tahun, jauh di atas rata-rata konsumsi beras penduduk dunia, yang hanya sebesar 60 kg per tahun.

Stabilitas harga dan ketersediaan beras menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam membangun dan menjaga kedaulatan pangan. Kenaikan harga beras, berdampak langsung terhadap indikator makro ekonomi, terutama inflasi dan daya beli masyarakat. Sehingga tak jarang, fluktuasi harga beras, berujung pada turunnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Suasana memperingati Hari Krida Pertanian 21 Juni 2020, disaat pandemi covid-19 melanda negeri, dapat menjadi momentum merubah paradigma tersebut. Bahwa ukuran mencapai keberhasilan pertanian bukan hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Tekad seluruh insan pertanian adalah mampu menyediakan pangan yang sehat, beragam, terjangkau, serta bernutrisi bagi masyarakat.

Pembelajaran Diversifikasi

Bangsa Jepang menjadi contoh baik proses penganekaragaman pangan. Jepang yang secara tradisional mengonsumsi beras sebagai sumber pangan utama, sukses melakukan langkah diversifikasi pangan. Semenjak tahun 1950-an mereka mulai melakukan gerakan mengurangi makan nasi. Periode 1953 hingga 1975, Jepang meluncurkan program “mengurangi nasi” di sekolah, dimana secara berkala sekolah tidak lagi menyediakan nasi dan menggantinya dengan roti dari berbagai bahan tepung, sebagai menu utama makan siang.

Kebijakan ini berhasil menumbuhkan kebiasaan “tidak tergantung nasi” saat makan siang, yang diturunkan ke generasi selanjutnya, sehingga konsumsi beras di negeri sakura menurun drastis. Di tahun 1960-an, 70% sumber kalori

masyarakat Jepang masih dominan beras, sedangkan saat ini, beras hanya menyumbang 11% kebutuhan kalori warga Jepang.

Diversifikasi pangan di Jepang, tidak hanya fokus pada penganekaragaman pangan non-beras, tapi juga menganekaragamkan sumber kalori. Saat ini, sumber kalori utama warga Jepang adalah susu, telur, dan daging. Ketiga bahan pangan protein hewani ini, merupakan sumber kalori tertinggi bagi masyarakat dengan proporsi sekitar 17%. Fakta empiris di negara ini, menunjukkan langkah diversifikasi pangan berhasil membuat angka harapan hidup penduduk (*life expectancy*) meningkat. Karena diversifikasi pangan membuat masyarakat menjadi lebih sehat hingga berumur panjang.

Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Sebuah studi merilis data, di tahun 1954 proporsi beras sebagai sumber karbohidrat penduduk Indonesia hanya sebesar 53,5%, sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6%), jagung (18,9%), dan kentang (4,99%). Artinya, di masa itu, masyarakat tidak menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Seiring perjalanan waktu, beras semakin dominan sebagai sumber karbohidrat masyarakat.

Program swasembada pangan yang identik dengan beras, nilai prestise nasi sebagai makanan orang mampu dan pameo “belum makan, kalau belum makan nasi” semakin kuat di benak masyarakat. Akibatnya di akhir tahun 80-an, proporsi beras semakin dominan sebagai sumber karbohidrat, mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu (10,02%) dan jagung (7,82%). Bahkan sejak tahun 2010, pangsa pangan non-beras nyaris hilang, tetapi tergantikan oleh konsumsi terigu impor yang mencapai 17 kg per kapita per tahun, atau naik 500% dalam kurun waktu 30 tahun.

Di waktu yang lalu, pembangunan pertanian dan pangan terpusat pada penyediaan sarana dan prasarana produksi padi, hingga pengaturan distribusi, logistik dan penyimpanan, dan tata niaga beras. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan dan menunjukkan sistem sentralistik dari pemerintahan masa itu.

Kondisi ini, mulai kita rasakan di masa saat ini. Hilangnya kebiasaan masyarakat mengonsumsi karbohidrat nonberas, seolah menafikan dan mengabaikan kekayaan hayati ibu pertiwi. Setidaknya ada 100 jenis makanan karbohidrat, dari kentang, singkong, sagu, terigu, dan lain-lain. Indonesia tertinggal jauh dalam persoalan diversifikasi pangan bila dibandingkan negara lain seperti Korea, Jepang, Malaysia, atau Thailand. Padahal dari sisi keragaman sumberdaya pangan lokal, negara kita jauh lebih kaya.

Dampaknya, tingginya biaya logistik dan distribusi karena produsen beras berada di beberapa daerah tertentu membuat harga beras rentan. Selain itu memori kolektif masyarakat terhadap sumber daya pangan lokal telah terkikis.

Langkah antisipatif untuk mencegah krisis pangan dimasa mendatang adalah, melalui pengurangan konsumsi beras dan mengedukasi masyarakat pentingnya konsumsi pangan yang lebih beragam.

Strategi Baru

Pemerintah memiliki semangat untuk mengembalikan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis produk lokal. Upaya diversifikasi pangan sejatinya tidak semata langkah sektoral pertanian belaka. Diversifikasi pangan, sejatinya menjadi bagian dari memelihara ke-Bhinneka-an Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan berkali-kali, negara kita memiliki kekuatan dan potensi untuk mencapai kedaulatan pangan. Ada 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan sebenarnya cukup untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan keanekaragaman pangan lokal tersebut, tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi juga dunia.

Menteri Pertanian berharap dan berupaya agar konsumsi pangan masyarakat lebih beragam. Dampak positifnya di sektor hulu pertanian adalah bergairahnya para petani, untuk menganekaragamkan usaha taninya. Pengolahan pangan lokal di pedesaan akan tumbuh berkembang, dan bisnis kuliner berbahan baku pangan lokal juga semakin banyak dan digemari. Kondisi ini tentu selaras dengan fakta yang menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian nasional. Diversifikasi pangan tentunya akan mendorong peningkatan variasi pangan olahan produksi UMKM di pasar nasional.

Keterlibatan *stakeholder* ini sangat penting karena permasalahan ini cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi dalam menggiatkan diversifikasi pangan adalah mengubah kebiasaan pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan beras ke nonberas. Dunia usaha berperan untuk membangun industri pangan berbahan baku lokal seperti singkong, talas, ganyong, sagu dan lainnya untuk diolah menjadi bahan pangan yang siap dimasak atau disajikan dengan cita rasa yang enak, penampilan menarik, kemudahan akses beli, dan harga ekonomis.

Langkah pemerintah pusat dan daerah sebenarnya bukan hanya sebatas peraturan. Dalam tataran aplikasi paling sederhana, hidangan rapat-rapat dan pertemuan, konsumsi yang disiapkan terbuat dari bahan pangan lokal. Pimpinan daerah-pun secara aktif memelopori dan memberi contoh langsung untuk tidak mengkonsumsi nasi baik secara pribadi maupun dalam lingkungan perkantoran untuk mensukseskan program diversifikasi pangan.

Pemerintah juga perlu fokus untuk memberikan stimulus dan subsidi agar harga jual bahan pangan non-beras kompetitif bahkan lebih murah dari beras. Tanpa peran serta pemerintah, budidaya pangan nonberas tidak akan optimal karena rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur serta teknologi terbaru. Apabila nilai kesehatan dan keekonomian bahan pangan nonberas tinggi, sektor usaha tentu antusias mengembangkan dan memproduksi makanan berbahan baku nonberas.

MENJAGA PANGAN

FAO memperingatkan melalui *Global Report on Food Crisis* yang dikeluarkan bulan April 2020 yang lalu bahwa dunia dalam ancaman krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia terancam karena kebijakan negara-negara dalam menekan penyebaran virus covid-19, seperti pemberlakuan karantina wilayah atau *lockdown*, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan masing-masing negara dalam mencegah penyebaran covid-19 berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Negara-negara yang memiliki ketergantungan impor pangan dan pengelolaan pangan buruk akan terdampak berat dalam situasi saat ini.

Dalam kondisi seperti ini, negara-negara produsen pangan mulai melakukan restriksi produksi dan dagang. Produsen daging di Amerika Serikat, Brasil, dan Kanada menutup pabrik demi menekan laju penyebaran virus covid-19. Sejumlah negara Eropa juga sudah melakukan pembatasan ekspor, contoh seperti Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton.

Hal yang perlu kita syukuri, ketahanan pangan Indonesia terus meningkat sehingga kita dalam posisi yang baik dalam menghadapi peperangan melawan covid-19 ini. Laporan FAO dan diikuti beberapa lembaga Dunia menjelaskan bahwa jutaan manusia di dunia dan banyak negara sangat tergantung ketahanan pangannya dari perdagangan internasional. Perlu diminimalisir dampak dari pandemi ini bagi negara-negara tersebut. Dari beberapa laporan yang dikeluarkan lembaga dunia ini, Indonesia bukan termasuk negara yang disoroti akan mengalami krisis pangan.

Tentu saja pandemi ini menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian Indonesia dan harus diantisipasi dengan cermat. Tapi di setiap tantangan, selalu terdapat peluang. Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas, Selasa (21/4/2020) lalu, menyebutkan bahwa kita harus mengambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita.

Arahan dari Presiden tersebut harus direspon cepat oleh pemangku kepentingan pertanian, baik di eksekutif, legislatif, sektor swasta hingga

petani dan pelaku pasar pertanian lainnya. Peluang besar dari kondisi ini sebagai momentum pertanian nasional mengukuhkan diri sebagai pelaku utama di negerinya sendiri dengan kemandirian pangan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mendorong pelaku pembangunan pertanian untuk semakin erat bekerja sama. Kerja para insan pertanian pun tidak lagi bisa dengan cara biasa. Pemerintah, hadir untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani serta menjalankan program yang dapat meningkatkan produktivitas pangan nasional.

Reformasi pangan pada periode ini ditandai dengan modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian serta mengoptimalkan pendampingan oleh penyuluh dalam kerangka program Kostratani. Sinergi dengan berbagai pelaku pasar dan industri pertanian pun diperkuat untuk mengakselerasi peningkatan produksi pertanian. Indonesia juga sudah berhasil menekan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung dan sejumlah komoditas hortikultura. Neraca perdagangan sektor pertanian pun terus membaik dengan bertahannya ekspor komoditas pertanian di tengah pandemi ini.

Indikator lainnya adalah neraca ketersediaan dari data Badan Pusat Statistik dan Badan Ketahanan Pangan, untuk 11 komoditas strategis yang diprediksi dalam keadaan aman hingga tiga bulan ke depan. Neraca bahan pangan nasional hingga Juni diperkirakan surplus stok beras 6,4 juta ton, stok jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, minyak goreng 5,7 juta ton, dan bawang merah 330.384 ton. Selain itu, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam juga diperkirakan surplus.

Produksi beras sebagai pangan utama perlu dikendalikan optimal. Kondisi tanam yang masuk di awal musim hujan 2019/2020 dominan pada November 2019, menyebar di lahan sawah baku seluas 3.794.930 hektare, dan Desember 2019 menyebar seluas 3.099.146 hektare, plus tanam Januari sehingga puncak panen jatuh pada periode Maret-Mei 2020 perlu diantisipasi pascapanen dan pergudangannya.

Untuk mengantisipasi kemarau panjang di pertengahan tahun 2020, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2020 memberikan arahan agar mempercepat masa tanam untuk musim berikutnya karena berdasarkan prediksi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Terkait hal tersebut, Presiden menekankan sejumlah hal terkait, ketersediaan air, ketersediaan sarana produksi pertanian dan pengelolaan stok bahan pangan, termasuk harga yang baik untuk menjamin keuntungan petani.

Kita paham, pengelolaan pangan nasional tidak hanya sebatas persoalan produksi. Masih banyak aspek yang perlu ditangani dari produksi, pasca panen dan pengolahan, pergudangan, logistik, hingga pemasaran di tingkat konsumen.

Maka tak heran jika Menteri Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Ketika Presiden Joko Widodo mengutarakan sejumlah wilayah mengalami defisit pangan, pemerintah terus bekerja keras untuk memfasilitasi kelancaran distribusi pangan dari wilayah yang sedang surplus ke wilayah defisit. Pola distribusi pangan kita perlu beradaptasi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Maka dibutuhkan langkah-langkah tidak biasa untuk bisa memodifikasi rantai pemasaran kita sehingga bisa semakin efisien.

Untuk memastikan distribusi pangan lancar, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog terus memonitor kebutuhan dan ketersediaan pangan. Secara bersama pula, pemerintah akan mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam rangka menyederhanakan rantai distribusi pangan.

Sebagai bagian dari efisiensi rantai distribusi pangan, Kementerian Pertanian menggaet perusahaan layanan distribusi *online* maupun *start up* yang bergerak di rantai pemasaran. Jelas terlihat komitmen dari para pelaku layanan penjualan dan distribusi *online* ini dalam upaya menyederhanakan rantai pemasaran produk pertanian, seperti Tokopedia, Gojek, Grab, Blibli, Tani Hub dan Kedai Sayur dan lainnya.

Juga perlu digarap dan dilanjutkan partisipasi swasta yang turut menjembatani petani sebagai produsen dengan konsumen. Misal, Lazada bersama dengan Rumah Sayur yang berkolaborasi membantu 2.500 petani binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menjual hasil panen melalui laman Cari Sayur.

Tentu negara membutuhkan partisipasi semua pihak dan terus mendukung serta memfasilitasi gerakan-gerakan masyarakat seperti ini. Bagaimanapun, masalah pangan nasional bukan hanya tanggung jawab dan kepentingan dari kementerian, petani, ataupun pelaku dunia usaha, namun seluruh warga negara.

MERAYAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN DI HARI FITRI

Hari raya Idulfitri merupakan momen istimewa bagi umat muslim seluruh dunia. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak pun, Idulfitri identik dengan perayaan dan syukuran setelah sebulan berpuasa.

Sebagai bagian dari sebuah bentuk perayaan, Idulfitri selalu diwarnai dengan hidangan khas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, menu hidangan Idulfitri identik dengan ketupat, gulai daging, opor ayam, dan sayur labu sebagai menu utama.

Padahal, menelisik penjuru Nusantara, banyak menu populer lainnya yang rasanya tak kalah sedap menggoda. Menelisik aneka makanan yang sering dihidangkan di berbagai daerah, kita bisa melihat beraneka ragam dan kaya jenis kuliner berbahan baku lokal sebagai wujud diversifikasi pangan yang menjadi warisan nusantara.

Hal ini menyadarkan kita potensi pangan lokal yang perlu diangkat lagi dan dipromosikan ke luar daerah untuk dirasakan saudara kita dari wilayah lain. Hal ini penting sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam, kearifan lokal dan nostalgia melalui perayaan hari istimewa dengan aneka hidangan tradisional khas rumahan yang mungkin tidak ditemukan lagi di rantau.

Ternyata, makanan berbahan dasar sagu, jagung, umbi, dan sayuran adalah bahan dasar yang sejak dulu menjadi menu utama dan olahan menarik tiap Idulfitri. Berbagai pangan lokal yang memiliki aroma kuat serta memiliki tekstur khas menggoda untuk disantap.

Di sejumlah wilayah Sumatera, ada berbagai hidangan khas menemani Idulfitri. Aceh misalnya, memiliki makanan labu kari yang mirip dengan gulai. Kemudian ada iga sapi dan sayur labu air yang berwarna kehijauan. Di Medan, terkenal gulai nangka dari nangka muda serta irisan daging iga dan rempah-rempah lokal.

Menyeberang ke pulau Jawa, ada lodeh terong yang berasal dari Jawa Tengah dengan menggunakan bahan utama terong hijau yang dimasak

dengan santan, daun melinjo dan irisan bunga kecombrang. Biasanya lodeh terong ini dinikmati dengan jagung rebus atau ketupat sayur. Sementara di Jawa Barat, Idulfitri tidak akan lengkap tanpa mustofa, olahan kentang yang dimasak kering dan berbumbu pedas.

Kawasan timur Indonesia, menjadi surga dan perayaan aneka pangan lokal berbasis jagung dan Ubi. Di saat Idulfitri semua aneka pangan olahan berbasis produk pertanian lokal ada dan mudah didapatkan. Seperti olahan jambu mete misalnya, pangan lokal ini mudah dijumpai di setiap kunjungan silaturahmi ke rumah warga. Sulawesi dan Maluku adalah contoh kawasan yang selalu menyediakan olahan tersebut.

Sulawesi dan Maluku juga memiliki makanan tradisional bernama Kusuami. Makanan ini dibuat dengan cara sederhana, yakni hanya perlu memarut ubi kayu atau singkong. Kemudian parutan tersebut dikukus dan diberi parutan kelapa mentah. Selanjutnya makanan siap disantap. Biasanya masyarakat lokal menghidangkannya dengan lauk ikan asin atau ikan bakar. Namun, dalam perayaan Idulfitri, kusuami biasanya dibentuk tumpeng kerucut berukuran sedang dengan berbagai hiasan dan ornamen sayuran. Rasa kusuami sangat gurih dan lezat. Dari literasi yang didapat, makanan ini merupakan bekal para pelaut dari Wakatobi yang hendak menangkap ikan dalam waktu yang cukup lama. Para nelayan biasanya menyiapkan kusuami dengan jumlah yang cukup banyak.

Sama juga dengan Jepa bagi suku Mandar. Warga mandar di Sulawesi Barat biasa berbuka puasa dan Idulfitri dengan menyantap Jepa sebagai pengganti nasi. Rasa jepa memang “gado-gado” karena bahan utamanya yaitu ubi kayu dan kelapa parut bisa dicampur gula aren atau garam. Biasa dimakan begitu saja atau dengan sayuran dan ikan rebus.

Di Sulawesi Tenggara, banyak warga lokal suku Tolaki selalu menyantap makanan Sinonggi. Sinonggi merupakan makanan yang sangat mirip dengan papeda dari Maluku. Namun, teksturnya lebih lembut dan kenyal. Sama seperti papeda, sinonggi adalah makanan yang dibuat dari bahan dasar saripati sagu kental. Bahan tersebut selanjutnya disiram dengan air panas hingga menggumpal berbentuk seperti lem kertas. Setelah teraduk, makanan ini pun siap disajikan.

Biasanya, makanan ini memiliki tambahan lauk seperti ikan tenggiri asam pedas, sayur bening berisi daun katuk, terong kecil yang dibelah, kacang panjang dan jagung. Yang pasti, rasa dan aromanya sungguh menggugah selera. Selain itu, Sultra juga memiliki makanan Kambose. Makanan ini juga sangat lezat karena selalu dilengkapi dengan ikan bakar, sayur daun kelor dan sambal. Makanan pokok warga Kabupaten Muna ini dibuat dari biji jagung yang direbus dengan air kapur. Luar biasa rasanya.

Sagu Pengganti Nasi

Bahan pangan yang ternyata sering menjadi sumber kuliner Idulfitri di Indonesia adalah sagu. Untuk diketahui, tepung sagu memiliki kandungan gizi yang lebih baik ketimbang pangan karbohidrat lain. Sagu tergolong rendah lemak, yakni hanya sekitar 0,2 gram dalam jumlah 100 gram. Sagu juga memiliki kandungan gizi tinggi untuk asupan kesehatan dan vitalitas. Pasalnya, sagu secara ilmiah terbukti mengandung energi 355 kalori, 85,6 persen karbohidrat dan 5 persen serat. Tak heran, pemanfaatan sagu sangat luas sebagai pilihan bahan pangan utama banyak masyarakat nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Rupanya, Mie Sagu khas melayu berupa mie goreng ataupun mie kuah makin populer di Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Utara. Hidangan ini banyak disajikan oleh masyarakat pesisir timur Sumatera. Bahkan, di Riau, hidangan ini menjadi andalan sajian Gubernur Riau sebagai panganan kebanggaan saat menjamu tamu dalam acara halal bihalal atau pesta adat. Luar biasanya, Sagu selalu memiliki cerita dan menghadirkan bahagia.

Dari kawasan Maluku dan Papua, Papeda merupakan makanan terkenal yang menjadi hidangan utama dalam berbagai acara termasuk perayaan Idul fitri. Papeda yang dimakan dengan ikan bakar dan sayuran menjadi panganan khas yang luar biasa. Di samping, ada juga kue tradisional Bagea yang bertekstur keras namun gurih sebagai cemilan.

Dari Yogyakarta, makanan tradisional berbahan sagu juga sangat populer. Namanya Sagon, sebuah makanan dengan kategori kue ini juga sering disajikan di meja tamu ketika Hari Raya Idul Fitri, termasuk dalam beberapa upacara keraton.

Makan sagu juga menjadi tradisi bagi masyarakat Minang. Di sana, mereka biasanya membuat lompong sagu sebagai makanan tradisional khas Idulfitri dengan kualitas rasa manis legit serta terdapat aroma wangi.

Sementara di Provinsi Bangka Belitung, ada makanan tradisional bernama Kue Rintak. Kue yang terbuat dari bahan utama Sagu ini sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa.

Diversifikasi sebagai Pilar Ketahanan Pangan

Keberagaman hidangan menu Idulfitri sesungguhnya menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mengimplementasikan diversifikasi pangan dalam pola konsumsi. Semangat diversifikasi pangan dalam hidangan menu Idulfitri semestinya kita jadikan momentum untuk menjaga semangat tersebut

tidak saat Idulfitri saja, tapi berlanjut ke dalam pola makan sehari-hari. Nutrisi karbohidrat tak hanya bersumber dari beras, tapi juga bisa didapatkan dari sagu, singkong, jagung, ubi, kentang, dan pisang. Begitupun sumber protein, tidak melulu harus berupa daging sapi, tapi juga bisa ayam, ikan, kacang, atau bahkan kelinci.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah dan terus mendorong pengembangan aneka makanan alternatif untuk mengamankan kebutuhan pangan. Saat pandemi virus Covid-19, kampanye tersebut semakin digiatkan karena diversifikasi pangan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Indonesia memiliki modal besar untuk mendorong diversifikasi pangan. Kita memiliki sumber daya hayati yang kaya dan beragam. Sehingga bukan alasan bagi kita untuk hanya tergantung pada satu atau dua jenis bahan pangan saja.

Sistem ketahanan pangan yang kuat dan stabil bisa lebih mudah terwujud jika sebuah negara tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada satu komoditas pangan saja. Sumber pangan yang lebih beragam dapat membantu negara untuk lebih lentur dan adaptif terhadap berbagai kondisi, termasuk kondisi pandemi covid-19.

Apalagi bila pola konsumsi pangan yang beragam ini diintegrasikan dengan pemanfaatan pekarangan untuk pertanian keluarga. Terkait hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta agar masyarakat terus mengembangkan makanan berbahan baku lokal secara masif. Menteri Pertanian berharap makanan tersebut mampu didorong dengan promosi kuliner daerah dan menghasilkan bahannya melalui pertanian keluarga di pekarangan.

Dalam pandangan Menteri Pertanian, setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan membangun pertanian keluarga seperti memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan. Dengan begitu, ketahanan pangan keluarga bisa meningkat dan mendukung gerakan yang lebih besar lagi yaitu optimalisasi lahan pertanian.

Kementerian Pertanian sudah menjalankan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui program ini, setiap keluarga didorong untuk memanfaatkan pekarangan sebagai lahan pertanian. Di pekarangan, keluarga bisa menanam berbagai tanaman ataupun memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga.

Para peneliti dan penyuluh pertanian terus mengembangkan teknologi adaptif meniyasati hambatan-hambatan dalam pertanian pekarangan. Pekarangan

sempit bukan lagi jadi hambatan karena kita bisa menggunakan teknologi vertikultur, yaitu kegiatan bercocok tanam dalam bidang vertikal atau bertingkat. Bila tak ada tanah, kita bisa menggunakan hidroponik (bermedia air) atau bahkan aeroponik (bermedia udara). Jika tidak punya pekarangan di luar rumah, bertani pun sekarang sudah bisa dilakukan di dalam ruangan tertutup. Absennya cahaya matahari bisa digantikan oleh lampu atau sumber cahaya lainnya.

Pada momen Idulfitri ini, saatnya mengajak masyarakat turut serta mempromosikan panganan lokalnya ke level nasional dan mencoba panganan dari daerah lain. Sangat indah silaturahmi antar daerah dan warga nusantara dihiasi dengan berbagi kekhasan masing-masing pangan lokal. Secara pasti, diversifikasi pangan sebagai pilar ketahanan pangan nasional perlu didukung dengan gerakan ketahanan pangan nasional melalui pertanian pekarangan dan promosi pangan lokal. Melalui cara ini, kuliner Nusantara kita lestarikan dan ketergantungan akan satu jenis bahan pangan apalagi pangan impor kita kurangi. (*)

STRATEGI PENYEDIAAN PANGAN MENGHADAPI PANDEMI

Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global, tapi juga merambat ke bidang-bidang lainnya, terutama sosial dan ekonomi. Masyarakat umum mungkin banyak yang terfokus pada aspek kesehatan hingga terlupa ada aspek lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu aspek kebutuhan pangan. Pada akhirnya, pandemi ini tidak hanya mengancam keselamatan kesehatan masyarakat, tapi juga meneror sektor pangan, dimulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Potensi ancaman tersebut sempat disuarakan Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*). Menurut FAO, pandemi COVID-19 bisa berakibat pada krisis pangan dunia. Rantai pasokan pangan dunia terancam karena kebijakan negara-negara untuk menekan penyebaran virus corona, seperti pemberlakuan karantina wilayah atau *lockdown*, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan masing-masing negara dalam mencegah penyebaran COVID-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi pangan.

Sejumlah negara mengalami kesulitan mempertahankan produktivitas. Contohnya, Italia disebut tidak bisa memaksimalkan masa panen pada bulan Mei 2020 karena kehilangan 200 ribu pekerja tani akibat *lockdown*.

Selain produktivitas terganggu, rantai pasok juga terganggu karena adanya kebijakan larangan perjalanan. Kebijakan ini membatasi operasional pelabuhan, truk pengangkut, dan penerbangan yang berperan penting dalam mendistribusikan pangan lintas wilayah dan negara. Pada akhirnya, pandemi tidak hanya mengancam keselamatan kesehatan masyarakat, tapi juga meneror pelaku lain, terutama upaya pemenuhan kebutuhan pangan, dimulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Kondisi ini mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Pada Rapat Terbatas mengenai Bahan Kebutuhan Pokok, Selasa (21/4/2020), terdapat empat poin penting yang disampaikan beliau. Pertama, pastikan

ketersediaan bahan pokok pangan berbasis data dan empiris yang valid. Kedua, rantai pasok sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Ketiga, menjaga harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat. Dan keempat, situasi COVID-19 harus bisa dijadikan momentum reformasi kebijakan sektor pangan.

Melihat perhatian besar yang ditunjukkan oleh presiden tersebut, para pelaku usaha tani tak dapat dipungkiri memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran covid-19. Ibarat perang, serangan melawan Covid-19 kita menggunakan taktik militer *Vanguard Troops*, yaitu tim medis dengan semua infrastruktur dan supra strukturnya sebagai pasukan terdepan. Mereka adalah yang pertama maju, pertama bertemu lawan, dan pertama untuk bertempur, dengan formasi yang dapat memaksimalkan kecepatan dan daya kejut.

Sedangkan para pelaku usaha pertanian diposisikan sebagai posisi pertahanan. Dalam strategi perang, pertahanan adalah kondisi temporal untuk melawan usaha penyerang dengan menghentikan momentum serangannya. Pertahanan menyiratkan penggunaan taktik bertahan. Strategi pertahanan adalah kebijakan mencegah serangan, atau meminimalkan kerusakan serangan, oleh kekuatan-kekuatan strategis.

Dalam konteks pandemi covid-19 ini, pertahanan yang paling strategis adalah kecukupan pangan bagi masyarakat. Program apapun yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, baik itu PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Kecil, atau *Lock Down*, sepanjang pangan pokok tersedia untuk rakyat, maka program itu bisa efektif dijalankan.

Dengan kondisi global yang berpotensi mengalami krisis pangan, penyebaran covid-19 tampaknya benar-benar menjadi petaka global. Bahkan covid-19 menjadi ancaman yang paling nyata dan sebagai penyebab yang paling berpengaruh dalam proses pelambatan pertumbuhan perekonomian dunia. Kemampuan negara dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan mencegah penyebaran covid-19. Kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19 hanya akan efektif jika pemerintah bisa menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan kondisi tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat strategis dalam menahan pelemahan ekonomi, meskipun sektor ini tetap mengalami gangguan karena covid-19. Penyebaran covid-19 dapat membawa dampak ekonomi terhadap sektor pertanian di Indonesia, setidaknya melalui beberapa perspektif antara lain: (1) melemahnya produktivitas tenaga

kerja; (2) berkurangnya total faktor produktivitas; (3) meningkatnya ongkos perdagangan produk-produk pertanian; dan (4) meluasnya distorsi distribusi produk pertanian yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas pertanian. Kenaikan harga komoditas pada poin ini, bisa berdampak langsung dengan peningkatan biaya perdagangan, atau justru ongkos dagang tetap statis, tapi harga pada tingkat konsumen yang bertambah.

Dari hasil analisis dengan berbagai perspektif yang ada, implikasi ekonomi dari penyebaran covid-19 terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia dapat dilihat pada melemahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian yang berkisar antara 0,3-0,6persen, akan berimplikasi pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Diperkirakan, total faktor produktivitas telah berkurang sekitar 3,5 persen yang disebabkan oleh turunnya produktivitas tenaga kerja, Sedangkan ongkos perdagangan menaik paling kurang 5 persen. Kondisi ini berkaitan langsung dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia, dan akan meningkat pada keempat perspektif di atas, yang dijadikan sebagai alas kajian dalam tulisan ini, yakni masing-masing sekitar 2 persen, 7 persen, 10 persen dan 20 hingga 30-an persen, sebagai dampak langsung dari meluasnya covid-19.

Menurunnya daya tumbuh ekonomi global akibat tekanan covid-19, sudah pasti akan mempengaruhi produksi pertanian dengan besaran yang berlainan pada setiap perspektif yang dijadikan acuan dalam tulisan ini. Tentu saja selain produksi pertanian, produksi sektor industri pangan dan sektor ekonomi lainnya akan mengalami penurunan, dalam jumlah yang masih sulit dianalisis, karena belum ada yang bisa memastikan kapan tekanan covid-19 akan menurun atau berhenti. Kondisi ketidakpastian ini mendorong terjadinya spekulasi harga penurunan atau kenaikan harga pangan, dan akan terjadi pada keseluruhan komoditas pertanian maupun non pertanian.

Dampak ekonomi penyebaran covid-19 juga akan melemahkan nilai ekspor pertanian. Perspektif produktivitas tenaga kerja hanya meningkat 0,5 - 1 persen. Sedangkan pada perspektif turunnya total faktor produktivitas hanya sub-sektor hortikultura yang ekspornya bisa meningkat sebesar 0,5 - 1,5 persen. Sedangkan kalau dipotret pada perspektif terjadinya peningkatan biaya perdagangan, hampir semua ekspor pertanian akan turun antara 1,5 - 7 persen. Hanya sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan tanaman lainnya tidak mengalami kenaikan impor jika dianalisis pada perspektif turunnya produktivitas tenaga kerja. Kalau dilihat perspektif turunnya total faktor produktivitas, kenaikan nilai impor pertanian berkisar antara 4 - 5,5 persen,

sedangkan pada perspektif peningkatan ongkos perdagangan, nilai impor pertanian akan meningkat sekitar 3 - 6 persen.

Ketidakteraturan dan ketidakpastian kondisi perekonomian global, sebagai dampak dari semakin meluasnya penyebaran covid-19 akan semakin memperparah kondisi perekonomian global, dan bisa jadi berimplikasi pada melemahnya kinerja sektor pertanian.

Oleh karena itu, diperlukan konsep mitigasi risiko yang jelas atas penurunan kinerja sektor pertanian tersebut untuk memastikan pertumbuhan sektor pertanian tetap stabil. Strategi utama yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun rumusan reorientasi kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Pertama, menyusun program pemberdayaan masyarakat (petani) yang bersifat padat karya, dan berbasis pada sektor pertanian, dengan model *cash for work* (CFW). CFW ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kerja bagi petani yang kurang sejahtera dan menganggur/setengah menganggur, sehingga bisa menekan angka kemiskinan petani.

Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan anggaran kegiatan Padat Karya Tunai dan bantuan bibit/benih serta sarana dan prasarana produksi (saprodi) pertanian ke Kemenko Perekonomian sebesar Rp 6,38 triliun dengan rincian padat karya senilai Rp 2,24 triliun dan saprodi pertanian Rp 4,14 triliun. Bila disetujui, program ini bisa mengamankan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Apalagi pedesaan saat ini menjadi "katup pengaman" (*safety valve*) dampak gangguan ekonomi di perkotaan akibat covid-19.

Langkah berikutnya, menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Upaya ini dibarengi dengan menjaga terjadinya lonjakan harga pangan dengan mengoptimalkan peran satgas pangan.

Kita juga perlu melakukan pemetaan ketersediaan atau stok pangan nasional dan menemukan sejak dini daerah yang dianggap potensial timbulnya risiko rawan atau krisis pangan. Selain itu, kepastian akan kelancaran sistem logistik pangan antar wilayah serta kemampuan distribusi ke level konsumen tidak boleh terganggu.

Selain memastikan distribusi produk pangan tetap berjalan lancar, jalur distribusi subsidi pupuk kepada petani harus berjalan lebih efektif dan efisien. Ketersediaan pupuk untuk petani harus tercukupi jumlahnya dengan melakukan penambahan subsidi pupuk.

Sebagai bentuk kepastian distribusi dan logistik berjalan lancar, Menteri Pertanian telah menyurati Presiden yang ditembuskan kepada seluruh kepala

daerah Tk.I dan II pada tanggal 31 Maret 2020 lalu, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan akses di pintu keluar/masuk wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemberian akses ini tetap memperhatikan protokol atau SOP Penanganan Covid-19 sebagaimana yang ditetapkan

Selain sejumlah upaya di atas, Kementerian Pertanian juga bekerja keras untuk meningkatkan jumlah petani penerima KUR, dan peningkatan jumlah asuransi pertanian, dengan jalan menambahkan alokasi subsidi premi asuransi pertanian.

Beberapa konsep mitigasi di atas, sebagian besar berupa insentif yang diberikan kepada petani untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian, di tengah tekanan penyebaran covid-19 yang semakin luas. Hal ini juga dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan jumlah asuransi pertanian melalui tambahan alokasi subsidi premi asuransi pertanian.

Mitigasi di atas pun perlu dilakukan dalam kerangka sinergi dan kerja bersama. Seperti yang disebutkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, upaya bangsa ini dalam melawan covid-19 merupakan pertarungan dunia-akhirat. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan semua pihak dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan dan keberpihakan terhadap sektor pertanian ditengah pandemi covid-19 adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar karena hanya sektor pertanian yang mampu menyiapkan pangan untuk tetap sehat melawan covid-19.

KETAHANAN PANGAN DI DAERAH

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Jika sebagian warga menghadapi masalah pangan, dikhawatirkan tak hanya mengganggu pembangunan SDM, tapi juga berimplikasi negatif pada pembangunan ekonomi, sosial, hukum, bahkan ketahanan negara.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan diartikan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menyadari pentingnya ketahanan pangan nasional, Presiden Joko Widodo meminta gubernur, bupati/wali kota memperhatikan ketersediaan pangan di daerah sehingga tidak ada yang kekurangan pangan. Ini penting apalagi di tengah pandemi.

Permintaan Presiden tepat karena berdasarkan peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) akan terjadi krisis pangan dunia, selama pandemi virus korona terus terjadi dan belum diketahui kapan akan berakhir.

Dari daerah

Dalam membangun ketahanan pangan nasional, memang harus diperkuat terlebih dahulu ketahanan pangan di daerah. Jika ada daerah yang mempunyai masalah pangan, tidak hanya daerah itu yang bermasalah, tetapi juga memperlemah ketahanan pangan nasional.

Memperhatikan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, untuk membangun dan memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu sinergi yang kuat dari berbagai kepentingan, termasuk pimpinan daerah yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya.

Maka itu, dalam membangun ketahanan pangan di daerah perlu langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah harus dapat memastikan ketersediaan pangan di daerahnya cukup dan harga terkendali.

Untuk itu, monitoring ketersediaan dan harga pangan harus dilakukan setiap hari. Hal ini bisa dilakukan oleh dinas terkait dan dilaporkan kepada pimpinan daerah.

Jika ada tanda terjadi kekurangan pasokan salah satu komoditas pangan yang berdampak pada naiknya harga, pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Bulog/Dolog setempat atau perusahaan/distributor pangan agar membanjiri pasar melalui operasi pasar atau gelar pangan murah.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus pangan, untuk mengirimkan komoditas pangan tersebut. Melalui upaya di atas maka ketersediaan pangan teratasi dan harga stabil.

Kedua, memperpendek dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Untuk itu, pemerintah daerah harus memotong titik distribusi pangan yang terlalu panjang, memperlancar arus distribusi barang, serta mencegah pungutan liar dan mengaktifkan mitra tani.

Ketiga, membangun cadangan pangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Selain itu, PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah provinsi oleh gubernur dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota melalui perda.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan cadangan pangan. Dengan adanya cadangan pangan, ketahanan pangan daerah semakin kokoh, karena tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga bisa untuk bantuan bencana, stabilitasi harga melalui operasi pasar, dan sebagainya.

Keempat, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Dengan potensi pekarangan di Indonesia seluas 10,3 juta hektare, jika dioptimalkan pemanfaatannya selain dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, juga bisa meningkatkan pendapatan keluarga.

Kelima, menggerakkan diversifikasi pangan, selain untuk mengurangi ketergantungan pada beras, juga memperbaiki pola konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki gizi masyarakat.

Keenam, gubernur, bupati/wali kota sebagai pimpinan daerah dan ketua Dewan Ketahanan Pangan di daerah, perlu berkoordinasi dan bersinergi dalam pembangunan ketahanan pangan, lewat perangkat di bawahnya ataupun dengan Dolog, PT, dan satgas pangan.

Ketujuh, mengoptimalkan peran hubungan masyarakat dan media massa untuk publikasi, edukasi, dan sosialisasi kegiatan ketahanan pangan di daerah sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi akan mendukung dan berpartisipasi aktif di dalamnya.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan, tidak hanya ketahanan pangan daerah semakin kokoh, tetapi ketahanan dan kemandirian pangan nasional juga akan terwujud sebagaimana diharapkan.

MERDEKA PANGAN

Tahun 2020, genap 75 tahun Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, kemerdekaan bisa identik dengan perjuangan fisik dan politis untuk mendapatkan pengakuan politik dari negara-negara lain. Di era modern, kemerdekaan identik dengan kemandirian suatu bangsa.

Kemerdekaan bisa memiliki dimensi lebih luas, bisa dimaknai dalam konteks sektor pertanian. *Founding father* sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno, sejak awal menekankan pentingnya kemerdekaan pangan.

Pada saat peletakan batu pertama Institut Pertanian Bogor (IPB) – 27 April 1952, Soekarno menyebutkan persoalan pangan sebagai hidup matinya bangsa. Persoalan makanan rakyat harus dilakukan secara besar-besaran, radikal dan revolusioner, tegas Bung Karno.

Kemerdekaan di sektor pertanian dapat dimaknai sebagai kepemilikan kendali atas pemanfaatan sumber daya alam dan pemenuhan pangan rakyat. Tak dapat dinafikan, selama perjalanan 75 tahun terakhir, sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi Indonesia. Bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian termasuk pada posisi tertinggi, bersama sektor perdagangan dan sektor industri.

Merdeka pangan tak lepas dari konsep ‘ketahanan pangan’ dan ‘kedaulatan pangan’. Negara dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila masyarakat atau warga negaranya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Kedaulatan pangan lebih menekankan pada hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya dan menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya.

Di Indonesia, konsep ketahanan pangan, perdagangan bahan pangan diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan pada konsep kedaulatan pangan harga yang adil, memperhitungkan biaya produksi, pendapatan buruh tani, keuntungan bagi petani kecil secara bermartabat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan pelaku ekonomi kerakyatan menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Pemerintah tidak boleh melepaskan

tanggung jawab kedaulatan pangan pada mekanisme pasar, apalagi pada segelintir pelaku pasar.

Peran Sektor Pertanian

Ditengah pandemi dan kesulitan ekonomi tahun ini, data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di triwulan II 2020 PDB sektor pertanian tumbuh 16,2% dibanding kuartal sebelumnya (QoQ). Bahkan tahun sebelumnya hanya sektor pertanian yang tumbuh positif hingga 2,19% (YoY). Pertumbuhan sektor ini sekaligus menunjukkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional cukup besar.

Jika sektor pertanian pada kuartal II-2019 kontribusinya hanya 13,57 persen, tapi pada kuartal II 2020 ini kontribusi sektor pertanian pada PDB meningkat menjadi 15,46 persen, Menurut data Badan Pusat Statistik, 5 Agustus 2020.

Peran pertanian juga sangat nyata dalam peningkatan ekspor. Ekspor pertanian pada bulan April 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai US\$0,28 miliar atau tumbuh 12,66% (YoY). Bahkan, sejak 2019 sampai Maret 2020, nilai kenaikan ekspor pertanian mencapai lebih dari Rp12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,47%.

Mengamankan Pangan

Kekhawatiran publik sempat mencuat saat FAO mengeluarkan peringatan ancaman krisis pangan global pada April lalu. Selain permasalahan distribusi, setiap negara pun diperkirakan akan melakukan restriksi ekspor untuk memastikan kebutuhan negaranya terpenuhi terlebih dahulu. Dengan kondisi di atas, tak ada jalan bagi kita selain meningkatkan kemandirian dalam produksi pangan.

Salah satu upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam pencapaian kemandirian pangan adalah intensifikasi untuk maksimalisasi produktivitas yang telah berjalan secara meluas. Beberapa program yang dilakukan antara lain program pertanian padat karya, gerakan pengendalian OPT, olah tanah dan percepatan tanam, rehabilitasi jaringan irigasi, perpipaan dan perpompaan, bantuan benih, dan penguatan pekarangan untuk penyediaan cadangan pangan.

Ketahanan pangan nasional hanya bisa kuat jika kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dengan begitu, petani dan semua pemangku kepentingan sektor pertanian dalam negeri harus menjadi tumpuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian telah memformulasikan langkah strategis yang dikenal dengan Cara Bertindak (CB). CB pertama, yaitu peningkatan produksi pertanian dengan melakukan percepatan penanaman padi pada musim tanam (MT) II 2020 seluas 5,6 juta hektare dan pengembangan persawahan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 ha. CB berikutnya, diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal yang tidak terfokus pada satu komoditas, melalui gerakan pemanfaatan pangan lokal secara massal seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang. Juga program pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk pertanian melalui program pekarangan pangan lestari (P2L) pada 3.876 kelompok tani.

CB ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dengan penguatan cadangan beras pemerintah pada semua level, dari tingkat provinsi hingga ke level desa. Dan CB keempat adalah pengembangan pertanian modern, termasuk pengembangan *smart farming*, *green housefarming*, dan *screen house farming* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam. Urgensi modernisasi sektor pertanian didasarkan pada argumentasi bahwa kedaulatan dan kemerdekaan pangan hanya bisa diraih jika produktivitas dan efisiensi produksi pertanian meningkat. Modernisasi menjadi kunci peningkatan produksi dan efisiensi, tenaga, waktu, maupun biaya.

Tercakup dalam konsep pertanian modern yang saat ini dikembangkan, pemerintah menggiatkan penerapan mekanisasi dan terus mendorong bertumbuhkembangnya berbagai teknologi dan inovasi pertanian. Upaya menggiatkan mekanisasi dilakukan dengan meningkatkan bantuan alsintan, serta pelatihan dan pendampingannya. Sementara penumbuhkembangan teknologi dan inovasi dilakukan dengan penelitian adaptif yang menjawab kebutuhan di lapangan.

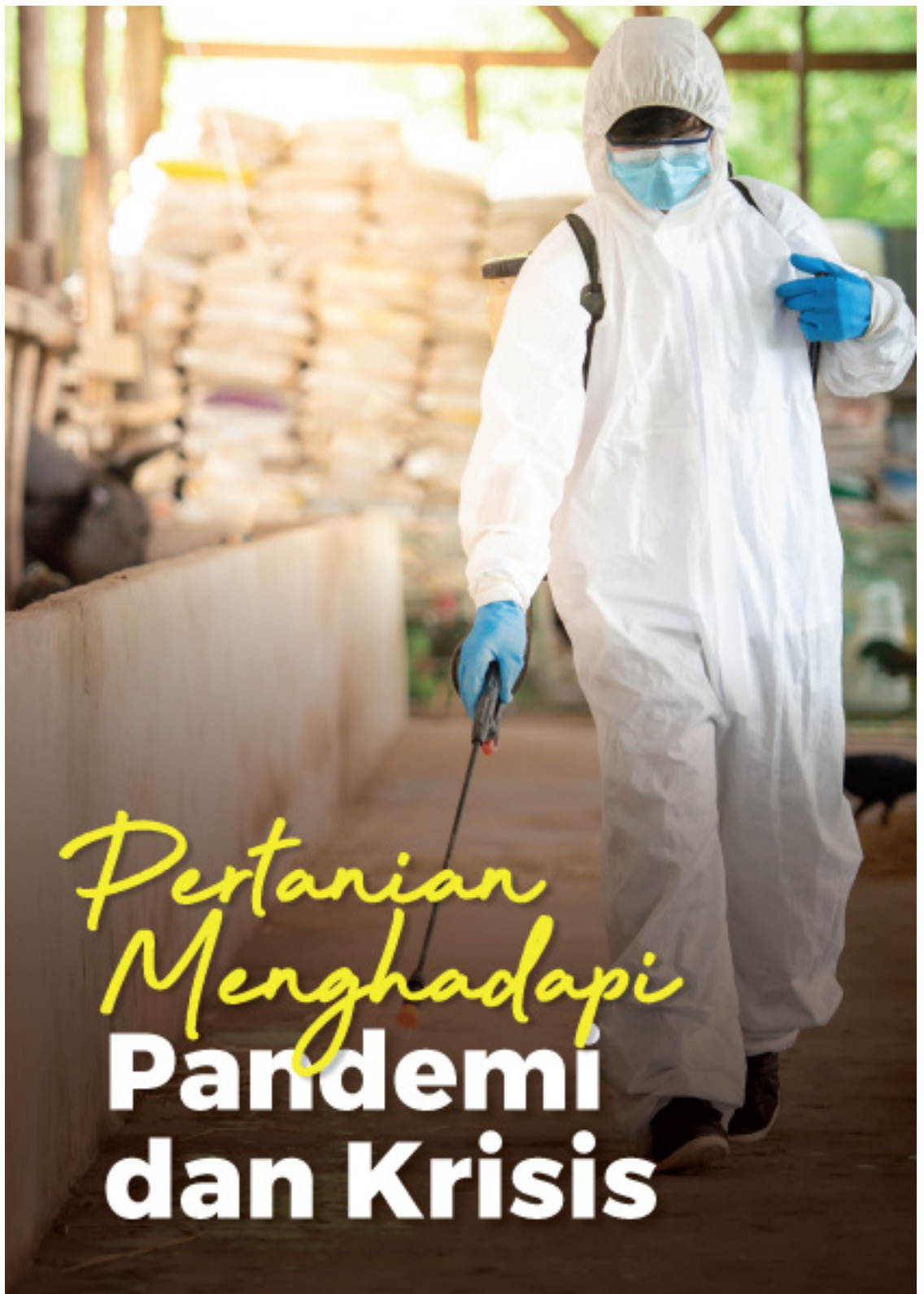
Hal penting lainnya yang dikembangkan dalam kerangka pertanian modern adalah perlu terus mendorong efektivitas dan efisiensi rantai pasok. Teknologi informasi terbaru wajib dimanfaatkan untuk memudahkan distribusi dan pemasaran hasil petani. Kehadiran usaha *start up* dan *e-commerce* dimanfaatkan secara maksimal demi mengurangi disparitas harga antara petani dan konsumen.

Konsep pertanian modern tak hanya mencakup sekedar persoalan peralatan dan teknologi, tetapi juga meliputi sumber daya manusia sebagai subyek dan pelaku utama. Untuk itu, petani didorong mampu menguasai teknologi dari hulu hingga hilir. Mereka harus mampu meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Dengan demikian pemanfaatan tenaga

kerja, ekonomi daerah dan potensi ekonomi lainnya dapat berkembang untuk menyelamatkan jutaan rakyat di pedesaan agar sejahtera.

Dengan berbekal semangat merdeka pangan, Kementerian Pertanian terus mengampanyekan dan menjaga spirit kolaborasi yang baik dari semua pemangku kepentingan.

Mengutip kembali pernyataan Bung Karno, dibutuhkan upaya radikal dan revolusioner dalam upaya penyediaan pangan. Karena itu, merdeka pangan bukan hanya tanggung jawab petani, penyuluh, ataupun insan pertanian saja, namun juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa secara bersama.



*Pertanian
Menghadapi*
**Pandemi
dan Krisis**

PERTANIAN MEREDAM KRISIS

Hingga saat ini, perekonomian global masih belum menunjukkan kondisi yang normal. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa waktu terakhir juga memberi sentimen negatif terhadap pasar dan perekonomian negara-negara di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat pada kuartal III 2019, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02 secara tahunan, relatif melambat dibanding kuartal I dan II – 2019 yang tumbuh 5,07 persen dan 5,05 persen.

Di balik kondisi perekonomian global yang sedang melesu, sektor pertanian menjadi tumpuan harapan dalam menjaga perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada awal Desember 2019 pernah mengutarakan peran penting dan strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Presiden menekankan bahwa sektor pertanian tidak hanya menjadi penyedia pangan bagi 267 juta jiwa rakyat Indonesia, tapi juga mampu menampung jumlah tenaga kerja yang besar, menekan angka kemiskinan, serta berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat

Sejarah mencatat, ketika krisis ekonomi nasional tahun 1998 - 2000 menerjang, sektor pertanian bisa bertahan, bahkan tetap tumbuh positif. Sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sekitar 0,26 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional saat itu sedang ambruk hingga mencapai minus 13,10 persen.

Begitu pula saat krisis yang terjadi di 2008 yang menyebabkan kehancuran sistem keuangan dunia. Saat itu krisis ekonomi berdampak pada kelumpuhan banyak sektor, termasuk pertanian. Krisis ekonomi tersebut telah mengambil korban negara-negara di Eropa dan beberapa negara eksportir Asia. Tapi patut disyukuri PDB Indonesia pada tahun tersebut masih dapat meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2007. Pertumbuhan PDB di luar migas bahkan meningkat 6,5 persen.

Bila ditelusur lagi struktur PDB menurut lapangan usaha, penurunan sebetulnya terjadi pada hampir semua sektor. Tercatat hanya tiga sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu sektor pertanian, sektor industri

pengolahan, dan sektor konstruksi. Sektor pertanian tercatat naik dari 13,7 persen di tahun 2007 menjadi 14,4 persen di tahun 2008. Gambaran ini menunjukkan kinerja sektor pertanian memiliki pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun itu.

Kinerja positif sektor pertanian pada tahun 2008 juga terlihat dari neraca perdagangan ekspor- impor. Volume ekspor pertanian tahun tersebut mencapai 29.287.752 ton, atau naik 12,9 persen dibandingkan tahun 2007 sebanyak 21.257.150 ton.

Data yang cukup menarik juga terlihat dari data impor tahun 2008. Volume impor pertanian pada tahun itu justru turun sebesar 20,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2008, keseluruhan impor Indonesia justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, volume impor sebanyak 89.935.600 ton, pada tahun 2008 melonjak sebesar 9 persen menjadi 98.664.300 ton. Kondisi ini menunjukkan di tengah perekonomian yang melesu, perdagangan pertanian kita di pasar internasional justru tetap melaju positif.

Kinerja ekspor – impor pertanian pada tahun 2008 sebetulnya bisa dihubungkan dengan kondisi kelangkaan pangan di pasar global pada tahun tersebut. Ancaman kelangkaan pangan terjadi sebagai salah satu dampak krisis ekonomi global. Kelangkaan pangan adalah situasi yang disebabkan oleh penurunan ekspor pangan ke pasar dunia. Di saat pasar global mengalami kelangkaan pangan, kita bisa lega karena volume ekspor Indonesia justru meningkat dan volume impornya menurun.

Semua data dan fakta di atas menjadi bukti bahwa pertanian bisa tetap kokoh saat krisis menerjang. Alasannya sebetulnya cukup sederhana, karena pertanian sangat terkait dengan urusan ‘perut’ manusia. Pangan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar dan ditunda-tunda. Untuk itu, penguatan sektor pertanian menjadi krusial dalam menghadapi krisis ekonomi. Jika sebuah bangsa bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dan bahkan bangsa-bangsa lain, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa pemenang dalam peperangan ekonomi global.

Pengalaman Hadapi Krisis

Saat ini ekonomi dunia kembali terancam krisis oleh pandemi covid-19 dan akibat perang dagang. Apakah pertanian kita bisa kembali bertahan? Memperkokoh sektor pertanian ketika krisis menerjang tentu membutuhkan pemikiran revolusioner.

Terkait hal tersebut, kita berharap sukses kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebagai kepala daerah selama 25 tahun bisa terulang saat menjabat

sebagai Menteri Pertanian. Sejak menjabat sebagai lurah, camat, bupati, hingga gubernur, Syahrul dikenal menggunakan pendekatan ekonomi berbasis rakyat. Dalam konsep pendekatan ini, ekonomi bisa bergerak maju jika masyarakatnya berdaya dan mandiri.

Saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (2008 – 2018), Syahrul melakukan banyak gebrakan sehingga pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sempat mengalami pertumbuhan sekitar 7,8 persen, terbaik yang pernah dicapai provinsi tersebut, dari sebelumnya yang berada di kisaran 7,4 persen.

Salah satu kunci keberhasilannya terletak dalam membangun sektor pertanian Sulawesi Selatan. Kala itu Syahrul menargetkan produksi beras bisa surplus 2 juta ton. Target ini tercapai sehingga Sulawesi Selatan bisa menjadi penyangga beras untuk kebutuhan nasional, dan bahkan melakukan ekspor ke mancanegara.

Target tersebut dinilai sulit dicapai karena pada tahun 2007 produksi padi Sulsel baru mencapai 3,635 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), setara dengan 2,280 juta ton beras. Dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 7,675 juta jiwa, maka diperkirakan kebutuhan beras mencapai 846,497 ribu ton beras.

Untuk mencapai target surplus dua juta ton, Sulawesi Selatan harus memastikan peningkatan produksi sebesar 566 ribu ton. Padahal melansir data Bank Indonesia, laju pertumbuhan produksi padi Sulawesi Selatan tercatat sangat lamban, yaitu rata-rata sekitar 0,2 persen per tahun.

Tapi Syahrul menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil selama dikerjakan secara serius dan bersungguh-sungguh. Syahrul mendorong peningkatan produktivitas dengan memperkenalkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM petani melalui penyuluhan dan sekolah lapang.

Pemerintah Sulawesi Selatan juga mengadopsi kearifan lokal dengan melakukan musyawarah “tudang sipulung” saat memasuki musim tanam. Musyawarah ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat dan tokoh adat, tetapi juga unsur pemerintah dan akademisi sehingga ada proses *knowledge sharing* yang mempertemukan pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki para pakar.

Strategi yang dijalankan Syahrul terbukti efektif. Dalam waktu kurang dari lima tahun, produksi padi melejit. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2011 produksi padi Sulawesi Selatan melejit ke angka 4,51 juta ton padi GKG (gabah kering giling) dan kembali naik hingga menembus angka 5 juta ton pada tahun 2012. Target surplus dua juta ton beras pun tercapai, bahkan terlampaui. Tak hanya menjadi penyangga beras nasional, Sulawesi Selatan bahkan berhasil ekspor ke sejumlah negara.

Lalu bagaimana caranya mengangkat pengalaman di daerah ini ke tingkat lebih luas? Terutama dengan potensi krisis ekonomi di depan mata? Banyak langkah yang sebenarnya seiring dengan program yang akan dilakukan Kementerian Pertanian lima tahun mendatang.

Kuasai *Big Data*, Jadi Pemenang

Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertanian, Syahrul telah mencanangkan pertanian Indonesia harus maju, mandiri, dan modern. Untuk mencapai itu, langkah pertama yang dilakukan adalah membenahi manajemen data pertanian. Ia secara langsung menyambangi sejumlah kementerian/ lembaga, seperti BADAN PUSAT STATISTIK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tujuan Indonesia bisa memiliki *single data* pertanian. Langkah ini krusial karena selama ini setiap kementerian/ lembaga mengolah data masing-masing sehingga muncul data yang berbeda. Kondisi ini tidak kondusif untuk pembangunan pertanian.

Gebrakan lain Syahrul berwujud program Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani. Kostratani merupakan pasukan khusus daerah yang terdiri dari penyuluh-penyuluh. Di tingkat kecamatan berbentuk Kostratani, di Kabupaten Kostra Daerah dan di Provinsi berupa Kostra Wilayah dan di Pusat bernama Kostra Nasional. Pada tahun 2019 ini, Kementerian Pertanian telah menggarap 534 Kostratani, terdiri dari 34 Kostra Wilayah, 100 Kostra Daerah, dan 400 Kostratani di tingkat kecamatan.

Kostratani dilengkapi dengan peralatan digital terkoneksi dengan *Agriculture War Room* (AWR). Jika AWR menjadi pusat pengelolaan data pertanian yang secara langsung dipantau dan dikendalikan oleh Syahrul, maka *War Room* yang dimiliki Kostratani di daerah menjadi alat untuk menangkap data lapangan, seperti luas sawah, luas tanaman, varietas, luas panen, hingga kejadian kekeringan, banjir, dan serangan hama.

Dengan dibekali manajemen data yang lebih baik maka petani bisa menjalankan pertanian presisi. Manajemen tanam, pembibitan, persiapan lahan, panen, hingga analisis usaha tani bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan *big data* ini akan memegang peran esensial dalam pembangunan pertanian. Apalagi ada pendapat yang menyebutkan, siapa yang menguasai *big data* akan menjadi pemenang. Tentunya pengelolaan *big data* pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Berbekal perbaikan manajemen data, Kementerian Pertanian optimistis menetapkan peningkatan produksi minimal 7 persen per tahun dan ekspor pertanian meningkat hingga tiga kali lipat.

Selain membenahan manajemen data pertanian, isu lain yang mendapat fokus Syahrul adalah pembiayaan pertanian. Syahrul dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, peran lembaga perbankan dioptimalkan dalam pembangunan pertanian.

Lembaga perbankan dirangkul dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertanian sudah mendapatkan alokasi KUR sebanyak Rp 50 triliun yang dikenakan bunga kecil, sebesar 6 persen.

Penguatan pembiayaan pertanian melalui KUR diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir. Dengan memudahkan akses petani terhadap KUR diharapkan potensi pertanian di tingkat daerah akan lebih kuat.

Dengan pengelolaan dan sistem yang baik, masa depan dunia pertanian menjadi sangat menjanjikan untuk kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita bisa meyakini berbagai tantangan ekonomi ke depan akan dapat dilalui Indonesia.

MENJAGA KETANGGUHAN PERTANIAN DI TENGAH KRISIS

Coronavirus disease atau dikenal sebagai virus covid-19 telah mewabah ke sebagian besar negara di dunia. Bahkan sejak 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Penetapan ini diberlakukan setelah penyebaran virus mencapai 114 negara.

Pandemi covid-19 diperkirakan akan berdampak pada melemahnya perekonomian dunia. Bahkan proyeksi banyak pihak, kondisi perekonomian global 2020 akan mengulangi krisis keuangan pada 2008. Dua belas tahun lalu, krisis keuangan global telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara signifikan. Merujuk data Bank Dunia saat itu, pertumbuhan ekonomi global adalah 1,851 persen,

Kekhawatiran dampak Covid-19 terhadap perekonomian global tersebut semakin terasa ketika sejumlah negara menerapkan kebijakan *lockdown*. Italia, misalnya, melakukan karantina total terhadap seperempat populasinya. Kota-kota besar di Italia bagian utara seperti Milan dan Venezia tertutup. Diperkirakan sebanyak 16 juta warga Italia tidak diizinkan meninggalkan wilayahnya.

Performa Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19

Di tengah kegelisahan banyak pihak terhadap perekonomian dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, Badan Pusat Statistik merilis data peningkatan ekspor. Pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia Februari 2020 mencapai US\$ 13,94 miliar atau meningkat 2,2 persen dibanding ekspor Januari 2020. Demikian juga dibanding Februari 2019 meningkat 11 persen.

Kinerja ekspor Indonesia tersebut sangat ditopang oleh peningkatan nilai ekspor pertanian. Pada Februari 2020, nilai ekspor pertanian naik sebesar 0,91 persen *Month of Month* (MoM) dan 28,04 persen *Year of Year* (YoY) dari total USD0,30 miliar. Kenaikan terjadi karena produk pertanian seperti biji kakao,

sarang burung, tanaman obat, aromatik, dan subsektor rempah-rempah meningkat signifikan. Kenaikan ekspor pertanian tersebut terjadi saat sektor migas justru turun 0.02 persen.

Pada Januari lalu sektor pertanian juga mengalami peningkatan ekspor tertinggi YoY dibanding sektor lainnya yang cenderung turun. Sementara, pada sektor industri pengolahan yang sebagian bahan bakunya berasal dari pertanian juga mengalami peningkatan sebesar 3,16 persen

Menelisis pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan *The 2nd Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF)* Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020) pekan lalu, sektor pertanian merupakan sektor yang tangguh dalam membantu stabilitas ekonomi. Sektor ini memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi, baik dalam ekspor, maupun meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kinerja ekspor pertanian selama dua bulan terakhir ini bisa menjadi bukti bahwa pertanian dapat menjadi penyelamat perekonomian Indonesia kala dunia dilanda pademi Covid-19. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun memiliki harapan yang sama. Seperti yang pernah diungkapkan Menteri Pertanian berulang kali, pertanian sangat terkait dengan urusan 'perut' manusia. Pangan merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa tergantikan.

Akselerasi Produktivitas dan Ekspor Pertanian

Sebelum pademi Covid-19, Kementerian Pertanian sedang menggalakkan program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). memasang target bahwa ekspor pertanian harus meningkat hingga tiga kali lipat. Tapi prosesnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Atau dalam istilah Pak Menteri Pertanian, semua jajaran Kementerian Pertanian bersama para kelompok pemangku kepentingan perlu bekerja dengan cara yang tidak biasa. Gratieks harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sehingga produk pertanian kita layak ekspor.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi pertanian. Ekspor hanya bisa dilakukan jika produksi pangan lokal surplus atau melebihi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi diupayakan dengan menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah dan peningkatan efisiensi, pengembangan dan penerapan mekanisasi dibarengi dengan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, serta ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan dan penyediaan air.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan standar kualitas produk pertanian sehingga bisa diterima oleh mancanegara. Para pelaku usaha tani

harus pintar dan cermat membaca kebutuhan pasar luar negeri, termasuk menangkap peluang pasar yang belum terjamah sebelumnya.

Dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, kemampuan bangsa kita dalam produksi pangan sedang dipertaruhkan. Apalagi kemampuan suatu bangsa dalam memproduksi pangan akan menjadi tolok ukur ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi krisis.

Saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian, Senin (18/03/2020) lalu, Menteri Pertanian memahami kondisi yang dihadapi saat ini dengan terjadinya pandemi Covid-19 memang tidak mudah. Sebelum memenuhi kebutuhan dunia, pertanian kita harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan pangan 267 juta jiwa rakyat Indonesia tercukupi. Mengutip arahan Menteri Pertanian, semua jajaran Kementerian Pertanian harus bekerja *extra ordinary* atau di luar kebiasaan yang ada.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 50 triliun akan dikhususkan untuk peningkatan produksi pertanian. Akses pembiayaan tersebut masih ditambah dengan program bantuan benih, bibit, dan subsidi pupuk, serta akselerasi ekspor pertanian.

Penyuluh pertanian akan semakin penting peranannya. Dengan berwadah Kostratani para penyuluh akan lebih mudah bergerak di lapangan. Kostratani sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, memiliki basis teknologi informasi (TI) dan memanfaatkan peralatan digital sehingga memungkinkan sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam jarak jauh. Para penyuluh yang tergabung dalam Kostratani akan lebih leluasa melakukan penyuluhan tanpa mengabaikan protokol *social distancing*. Meskipun ada pembatasan kunjungan ke lapangan, penyuluh bisa tetap melakukan pembinaan melalui *teleconference* dengan wilayah binaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Para penyuluh pun akan menjadi ujung tombak dalam sosialisasi protokol pencegahan Covid-19 kepada para petani. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian besar dari negara. Kesejahteraan dan kesehatan mereka menjadi prioritas utama.

Dengan protokol pencegahan Covid-19 yang dijalankan di lapangan, diharapkan kegiatan produksi pertanian akan tetap berjalan. Produksi pertanian bisa tetap terjaga stabilitasnya demi menyediakan pangan bagi 267 juta rakyat Indonesia, maupun memenuhi kebutuhan pasar dunia.

SEKTOR PERTANIAN ANDALAN HADAPI KRISIS

Di tengah krisis ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 di sebagian besar negara di dunia, nilai ekspor pertanian terus mengalami kenaikan. Sektor pertanian juga merupakan satu-satunya sektor nonmigas yang paling bertahan dari berbagai gejolak dan ancaman krisis, seperti saat wabah Covid-19 mengancam ekonomi Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Yunita Rusanti di Jakarta, Senin (16/3), bahwa kenaikan ini terjadi disaat sektor migas turun sebesar 0,02% akibat krisis yang terjadi.

Kenaikan signifikan ekspor tercatat sebesar 0,91% *Month of Month* (MoM) dan 28,04% *Year of Year* (YoY) dari total USD0,30 miliar pada Februari 2020. Kenaikan periode ini terjadi karena peningkatan produk pertanian seperti biji kakao, sarang burung, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah mengalami peningkatan volume dan nilai yang signifikan.

Yunita mengatakan, kenaikan ekspor pertanian juga berdampak langsung pada kenaikan ekspor keseluruhan Indonesia. Pada Februari 2020 mengalami kenaikan 2,24% atau setara USD13,94 miliar.

Di tengah lesunya ekonomi nasional dan dunia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume dan nilai ekspor produk pertanian sejak November-Desember 2019 meningkat masing-masing 8,66% dan 10,90% dibandingkan periode November-Desember 2018. Peningkatan terjadi yaitu dari 7,73 juta ton menjadi 8,40 juta ton dan dari USD4,67 miliar menjadi USD5,18 miliar.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada 2020. Di tengah tren penurunan ekspor nasional, sektor pertanian mengalami peningkatan ekspor tertinggi *Year on Year* dibandingkan sektor lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor pertanian Januari 2020 meningkat 4,54% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menetapkan target bahwa ekspor pertanian harus meningkat hingga tiga kali lipat dalam lima tahun kedepan. Sebagai langkah awal, pemerintah

memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi pertanian. Ekspor hanya bisa dilakukan jika produksi pangan lokal surplus atau melebihi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi diupayakan dengan menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah dan peningkatan efisiensi, pengembangan dan penerapan mekanisasi dibarengi dengan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, serta ekspansi pertanian melalui perluasan dan optimalisasi lahan.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan standar kualitas pertanian sehingga bisa diterima oleh konsumen mancanegara. Para pelaku usaha tani harus pintar dan cermat membaca kebutuhan pasar luar negeri, termasuk menangkap peluang pasar yang belum terjamah sebelumnya.

Rem Impor dan Akselerasi Ekspor

Langkah pemerintah untuk meningkatkan ekspor disertai dengan komitmen menekan impor. Sungguh menarik jika menelisik pernyataan Menteri Pertanian setiap kali ditanya tentang kebijakan impor. Syahrul menyebutkan bahwa impor tidak haram, namun kebijakan itu diambil bila segala upaya kegiatan produksi dalam negeri sudah dilakukan, dan kita kekurangan stok bahan pangan.

Pakar ekonomi Rizal Ramli bahkan tegas menyampaikan sektor pertanian adalah solusi yang tepat untuk menghadapi wabah Covid-19. Sektor pertanian, kata dia, memiliki kekuatan nilai ekonomi yang membuat negara ini tetap bertahan dari ancaman krisis global.

Seperti yang sering disampaikan oleh Menteri Pertanian, pemerintah melalui layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian senilai Rp50 triliun mendorong peningkatan produksi dan kualitas pertanian. Fasilitas ini didukung dengan layanan penyediaan benih, bibit dan subsidi pupuk, serta peningkatan akselerasi ekspor pertanian.

Paradigma baru dalam pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani ini diharapkan secara kontinu bisa berdampak pada ekonomi nasional, khususnya penurunan kemiskinan dan kesenjangan antara kota dan desa. Perhatian besar Presiden Joko Widodo terhadap petani telah terbukti sejak periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun dan gini rasio sebagai indikator ketimpangan kota-desa juga semakin mengecil.

Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan juga diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, khususnya di perdesaan yang ditandai oleh menurunnya indeks gini ratio. Pada September 2013, gini ratio sekitar 0,324 terus menurun dan September 2018 menjadi 0,319.

Pada Maret 2019, pemerataan pendapatan di perdesaan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya gini ratio menjadi 0,317. Pada akhir 2019, ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan turun kembali, dengan gini ratio sebesar 0,315.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya mengungkapkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang paling tangguh, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi. Mengenai hal ini pada kesempatan lainnya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia tidak meremehkan sektor pertanian sebagai sebuah kebutuhan melawan berbagai krisis. Sektor pertanian, kata dia, adalah sektor yang tangguh dalam membantu stabilitas ekonomi.

Presiden berharap sektor pertanian dapat berkontribusi lebih besar, baik dari segi ekspor maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Presiden, sektor pertanian memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi, baik dalam kontribusi ekspor maupun meningkatkan pendapatan masyarakat.

STRATEGI PERTANIAN MENGHADAPI PANDEMI

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi covid-19 yang tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia juga terancam di tengah pemberlakuan karantina wilayah, restriksi transportasi, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan tiap-tiap negara dalam mencegah penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan nasional maupun kemampuan produksi.

Realitas ini menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran covid-19, begitu pun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya, berperan sebagai penyedia logistik dalam perlawanan tersebut.

Pertahanan yang penting pada level negara dan masyarakat dalam melawan covid-19 ialah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mencegah penyebaran virus melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal sebagai PSBB. Strategi itu hanya akan efektif apabila pangan pokok tersedia untuk rakyat di semua wilayah PSBB. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan keyakinannya, RI dapat melewati masa pandemi ini, bahkan keluar menjadi bangsa pemenang. Khususnya, untuk sektor pertanian, Menteri Pertanian percaya kondisi ini bisa menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, semua insan pertanian harus tetap bekerja dengan semangat tinggi dan tangguh, untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kita membutuhkan tenaga yang bekerja ekstra keras, pemikiran-pemikiran *out of the box*, serta kerja sama yang semakin erat. Saatnya para petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya untuk menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara dengan semangat kebersamaan.

Produksi berbasis pertanian rakyat

Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pandemi covid-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan meningkatkan produksi pangan nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil.

Untuk bisa mewujudkannya, pemerintah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk bantuan benih/bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Realokasi anggaran itu menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberpihakan terhadap petani kecil ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi covid-19 tidak boleh menjadi penghalang penyuluh untuk mendampingi petani. Kementerian Pertanian sudah membentuk wadah Kostratani yang dilengkapi teknologi informasi digital sehingga pendampingan oleh penyuluh bisa dilakukan kapan dan di mana pun.

Langkah strategis yang juga berperan penting ialah optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan pertanian di seluruh Indonesia perlu gerakan antarlintas sektoral. Pemerintah daerah harus berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan suboptimal, seperti lahan kering dan rawa, mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian.

Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya memberdayakan keluarga ataupun satuan kelompok masyarakat untuk budi daya lahan pekarangan dan pengolahan hasilnya. Upaya pemanfaatan lahan dilakukan tidak hanya dengan berbudi daya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga, budi daya ternak dan ikan sehingga bisa mencukupi ketersediaan pangan, baik karbohidrat, protein, vitamin, maupun mineral.

Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan bisa dilakukan keluarga atau dilakukan oleh kelompok masyarakat, seperti warga permukiman, rusun, asrama, ataupun siswa sekolah, dan pondok pesantren.

Berkali-kali Menteri Pertanian Syahrul juga menegaskan perlunya mengantisipasi dan memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat. Untuk mengurangi potensi kerawanan pangan, masyarakat perlu didorong untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya melalui gerakan masyarakat memperkuat cadangan pangan, dengan cara membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

LPM dibangun untuk mendekatkan akses pangan ke anggota kelompok masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya cadangan pangan terutama di masa krisis. Melalui keberadaan LPM, masyarakat bisa menjaga kontinuitas ketersediaan dan akses pangan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang rawan kekurangan pangan.

Dalam kondisi pandemi, dibutuhkan lebih banyak inovasi dan terobosan untuk memastikan distribusi kebutuhan pangan bisa merata ke wilayah rawan pangan. Sebagai langkah awal, Kementerian Pertanian bekerja dengan TNI-AD meluncurkan ATM Beras. Salah satu tujuannya membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pangan selama mengikuti kebijakan PSBB. Kita harapkan inovasi dan terobosan, serta sinergi dengan K/L lain, BUMN, dan sektor swasta terus kita giatkan, sehingga tingkat kerawanan pangan bisa kita tekan.

Keberpihakan pada petani

Pandemi covid-19 telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Kita harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk menciptakan efisiensi rantai pemasaran, antara lain mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani, hingga bisa mencakup 34 provinsi. Pasar Mitra Tani telah berfungsi menjadi penghubung bagi Gapoktan yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen.

Di era digital, kita juga terbantu oleh hadirnya sejumlah layanan antar berbasis *online*. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong efisiensi rantai pemasaran turut memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis *online*, seperti Go-Jek, Grab, Blibli, Tokopedia, dan yang lain.

Upaya lain yang dilakukan, memfasilitasi dan bekerja sama dengan usaha *startup* yang bergerak di rantai pemasaran. Kondisi PSBB berpotensi pada menurunnya daya serap pasar terhadap produk petani. Perusahaan *startup* bisa membantu menyerap hasil produk tani sehingga harga di tingkat petani pun

tetap stabil. Yang tidak boleh dilupakan dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi covid-19 ialah memastikan petani tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus memproduksi.

Kedaulatan pangan akan sulit diwujudkan jika petani sebagai pelaku utama usaha produksi tidak sejahtera. Maka, negara hadir untuk menjamin kesejahteraan petani, menjaga semangat, dan memastikan kesehatannya di tengah pandemi covid-19.

KERJA PERTANIAN DI TENGAH PANDEMI

Produksi pertanian tidak boleh berhenti, meski saat ini dunia sedang dilanda pandemi. Pertanian harus berjalan supaya kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Untuk pemenuhan itu, peningkatan produksi menjadi sebuah kewajiban dalam menghadapi kehidupan normal atau *new normal*.

Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan yang kuat bagi negara di dunia tentang ancaman krisis pangan yang bakal melanda dunia, terutama bagi negara-negara yang tidak mampu memenuhi pangannya sendiri selama ini. Pandemi Covid-19 memiliki potensi pada penurunan produksi global dan akses pangan masyarakat, yang dapat menurunkan ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan kekurangan pangan.

Indonesia yang akan masuk periode musim kemarau, menjadi perhatian tersendiri, mengingat kerap munculnya kekeringan di beberapa daerah tertentu. Keterbatasan jalur logistik menjadi tantangan serius dalam ketersediaan dan distribusi pangan.

New normal yang diiringi dengan menurunnya daya beli masyarakat, kembali menjadi masalah baru, tatkala produksi yang telah sangat baik (melimpah) di sentra produksi, tidak sampai ke pasar. Pekerjaan rumah yang sangat kompleks ini menuntut pemikiran dan energi ekstra pemerintah.

Kementerian Pertanian menjawab tantangan pemenuhan pangan di era Covid-19 ini melalui pendekatan jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan ini dijalankan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya situasi terburuk seperti krisis pangan.

Agenda jangka pendek atau SOS yang dilaksanakan pada saat pandemi masih berlangsung adalah melalui pendekatan menjaga produksi dan stabilisasi pasokan bahan pokok, dan percepatan tanam. Fase ini dilakukan secara terukur dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan pemanenan air hujan untukantisipasi kekeringan saat musim kemarau. Program penting berikutnya adalah optimalisasi lahan dengan bantuan alat dan mesin pertanian serta benih dan varietas unggul.

Berbarengan dengan program tersebut, pemerintah terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan memperlancar lalu lintas pasar komoditas dan produk pertanian. Hal lain yang tak kalah penting melalui perbaikan sistem distribusi pangan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan perusahaan swasta yang bergerak di Bidang transportasi dan jasa pengantaran barang, pengembangan Pasar Mitra Tani untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dengan memotong rantai pasok pemasaran hasil pertanian.

Strategi jangka menengah, pengembangan Kostratani sebagai upaya peningkatan koordinasi dan kemampuan produksi, masuk dalam program prioritas. Selain itu, pemerintah terus menumbuhkan minat anak muda pada dunia pertanian dan melakukan modernisasi pertanian, serta memajukan usaha bidang pertanian. Program optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dan lahan kering juga ditangani sebagai upaya penyediaan pangan di masa pandemi dan mewujudkan kemandirian pangan.

Strategi jangka panjang merupakan program utama, berdasarkan visi utama 2020-2024, dimana Kementerian Pertanian menargetkan terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Melalui pendekatan ini diharapkan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan ekonomi nasional serta mempertahankan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui strategi pendekatan tersebut pemerintah dinilai cukup berhasil. Produksi dan pasokan pangan cukup dan harga pangan stabil selama masa pandemi. Selama Masa Tanam I, periode Oktober-Maret, luas tanam padi 6,07 juta hektare, dengan luas panen antara Januari – Juni tahun 2020 seluas 5,83 juta hektare menghasilkan 29,31 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 16,80 juta ton beras. Diperkirakan stok beras akhir Juni 2020 adalah 6,84 juta ton.

Selain itu, kinerja ekspor produk pertanian di masa pandemi ini juga masih menunjukkan kinerja yang menggembirakan dan tercatat mengalami neraca perdagangan yang positif. Selama Januari-April 2020, nilai ekspor pertanian meningkat 16,9 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019, dari Rp 115,18 Triliun meningkat menjadi Rp 134,63 Triliun. Surplus perdagangan produk pertanian selama Januari-April 2020 juga meningkat signifikan, yaitu 32,96 persen, dari sebesar Rp 33,62 Triliun (Januari-April 2019) meningkat menjadi Rp 44,70 Triliun (Januari-April 2020).

Memasuki Periode *New normal*

Kementerian Pertanian terus mempersiapkan kebijakan strategis menjelang masa transisi *new normal*. Persiapan dilakukan mengingat sektor pertanian

merupakan sektor yang penting terkait pemenuhan pangan dan ekonomi nasional.

Namun, Pandemi Covid 19 membawa perubahan dan dinamika lingkungan strategis yang berakibat pada gangguan suplai pangan dan penurunan permintaan produk pertanian. Karenanya kebijakan-kebijakan yang adaptif harus ditata dengan cepat, agar bisa mendorong sektor ini tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Kebijakan adaptif periode *new normal* difokuskan pada upaya meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga, dan mengembangkan *buffer stock*, serta intervensi pasar. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya melakukan peningkatan ketersediaan pangan di masa *new normal*. Upaya itu dirumuskan dengan memperkuat upaya program atau Cara Bertindak (CB) dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Upaya pertama atau CB 1 meliputi peningkatan kapasitas produksi dengan percepatan tanam MT II seluas 5,5 juta hektare, serta pengembangan dan optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare, dan perluasan areal Tanam Baru (PATB) dan peningkatan produksi.

CB 2 melakukan pengembangan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal secara massal dan memanfaatkan pekarangan lestari (P2L) untuk 3.876 kelompok. CB 3 adalah penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat desa. Sementara upaya lainnya, CB 4 adalah melakukan pengembangan pertanian modern melalui *smart farming* dan *percision farming*. Kementerian Pertanian berharap, kebijakan-kebijakan tersebut mendapat pengawasan dan dukungan pembiayaan yang cukup bukan saja dari anggaran negara tetapi juga partisipasi masyarakat dan swasta.

Semua program tersebut akan ditunjang oleh *platform digital* dalam meningkatkan efisiensi pemasaran dan perluasan pasar hasil pertanian. Akselerasi peningkatan ekspor pertanian didukung oleh penggunaan teknologi canggih, sehingga Kementerian Pertanian menargetkan jumlah ekspor tiga kali lipat dalam lima tahun kedepan.

Konsep cadangan pangan strategis nasional dipersiapkan dengan serius. Ide Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membuat lumbung pangan mulai dari kecamatan, kabupaten hingga propinsi, merupakan gagasan yang inovatif untuk menyimpan produksi yang ada. Keterbatasan kapasitas penyimpanan gudang Bulog, harus disiasati dengan baik, sehingga tidak semua cadangan pangan dibiarkan secara tidak terkontrol di 'tangan pihak lain'. Stok bahan pangan masyarakat yang selama ini ukurannya hanya gudang Bulog yang

berkapasitas hanya 3% dari jumlah produksi nasional, harus ditingkatkan dengan lumbung pangan baru.

Sudah sepatutnya insan pertanian memupuk optimisme memasuki kondisi *new normal* dalam menangani sektor pertanian dan pangan, dengan membuat terobosan yang cerdas dan efisien. Rakyat akan terus butuh pangan, dan pemerintah terus bekerja untuk memfasilitasi. Bukan hal mudah memang, tapi keyakinan dan harapan harus terus dijaga.

KEMANDIRIAN PANGAN DITENGAH PANDEMI

Seperi banyak diprediksi oleh para ahli sejak awal, pandemi covid-19 tidak hanya menyentuh masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga turut berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi negara dan masyarakat.

Berdasarkan survei lembaga riset dan intelijen media, Indonesia Indikator, berita isu ketahanan pangan nasional naik signifikan dan terpengaruh kuat oleh adanya pandemi covid-19. Selama periode 1 April - 10 Mei 2020, eskalasi pemberitaan terkait isu Pangan meningkat hingga mencapai 60.209 artikel, hanya untuk media arus utama saja.

Peningkatan pemberitaan seputar ketahanan pangan menandakan publik memberikan perhatian besar dan intens terhadap faktor ketersediaan pangan. Hal ini tentu bisa dipahami, karena disaat pandemi dan situasi abnormal seperti saat ini, ketersediaan kebutuhan dan pelayanan primer seperti pangan dan kesehatan menjadi hal penting dan utama.

Kekhawatiran publik sempat mencuat saat *Food and Agriculture Organization* (FAO) mengeluarkan peringatan ancaman krisis pangan global pada April 2020 lalu. FAO mengingatkan setiap negara untuk meningkatkan kemandirian pangan karena distribusi antar negara akan semakin terkendala dengan upaya masing-masing negara dalam mencegah penyebaran covid-19. Selain permasalahan distribusi, setiap negara pun diperkirakan akan melakukan restriksi ekspor untuk memastikan kebutuhan negaranya terpenuhi terlebih dahulu.

Dengan kondisi di atas, tak ada jalan lain selain meningkatkan kemandirian produksi pangan. Ketahanan pangan nasional hanya bisa kuat jika kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Oleh karena itu, petani dan semua pemangku kepentingan sektor pertanian dalam negeri menjadi tumpuan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas, Selasa (21/4/2020) beberapa waktu lalu juga menyebutkan bahwa bangsa kita harus mengambil masa pandemi ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita.

Arahan dari Presiden tersebut perlu direspons cepat oleh semua pemangku kepentingan pertanian. Peluang besar dari kondisi ini sebagai momentum pertanian nasional mengukuhkan diri sebagai pelaku utama penyedia pangan di negerinya sendiri untuk mencapai kemandirian pangan.

Satu hal yang perlu disyukuri, pemerintah sebelum pandemi pun sudah berfokus pada upaya meningkatkan kemandirian pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sejak awal kepemimpinannya sudah berulang kali menegaskan bahwa kita harus bisa mengusahakan semaksimal mungkin kebutuhan pangan bisa terpenuhi dari dalam negeri. Impor pangan harus ditekan, bahkan kita harus menggencarkan ekspor komoditas pertanian. Hanya dengan langkah tersebut, kemandirian pangan bisa terwujud dan para pelaku di sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menjaga Rantai Pasok Pangan

Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan tidak bisa bertumpu hanya sebatas pada kegiatan pertanian di hulu (*on farm*) atau produksi, tapi juga melibatkan kegiatan di hilir (*off farm*) atau pasca panen dan distribusi. Maka Kementerian Pertanian terus mengampanyekan dan menjaga semangat bahwa kegiatan menjaga pangan membutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik dari semua pihak.

Dengan berbekal harapan meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri, Kementerian Pertanian mendorong efektifitas dan efisiensi rantai pasok dari hulu hingga hilir terkait distribusi dan pemasaran produk pangan.

Ketahanan pangan secara mandiri dicapai dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahatani. Penyuluh di lapangan wajib mendampingi petani dalam menerapkan teknologi melalui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dipedomani. Petani juga harus didorong untuk mempraktikkan *Good Hygiene Practice* (GHP) sehingga tetap terjaga dari bahaya penularan covid-19.

Akselerasi produksi pertanian dicapai dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Kementerian Pertanian terus mendorong pemanfaatan teknologi maju dan memanfaatkan mekanisasi pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan program padat karya untuk membangun infrastruktur pangan dan menolong tenaga kerja PHK.

Terkait ketersediaan lahan pertanian, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran menterinya untuk mencetak lahan pertanian baru di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu provinsi yang ditarget adalah Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut memiliki potensi yang bisa digunakan seluas 164.598 hektare. Dari potensi tersebut ada beberapa wilayah yang sudah

memiliki jaringan irigasi, dan ditanami padi oleh masyarakat meskipun belum intensif.

Pemerintah bersikap konsisten dalam pencegahan alih fungsi lahan. Di samping telah ada undang-undang, sudah dibuat perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Abadi Pertanian. Pihak yang melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan UU Nomor 51 tahun 2009, dikenakan sanksi penjara lima tahun. Menteri Pertanian menyebutkan menjaga lahan pertanian yang ada sangat penting demi memenuhi kebutuhan pangan 267 juta jiwa rakyat secara mandiri. Apalagi dalam kondisi pandemi, kita tidak bisa lagi kehilangan lahan, terutama yang sudah dilengkapi infrastruktur pendukung pertanian.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi kekeringan pada musim kemarau yang dikhawatirkan menimbulkan gagal panen. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan gerakan tanam padi dan jagung serentak segera sebelum memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun. Pada tahun 2020 secara nasional pemerintah menargetkan luas tanam padi 11,66 juta hektare, dengan target hasil 33,6 juta ton beras. Penanaman jagung, ditargetkan seluas 4,49 juta hektare, menghasilkan 24,17 juta ton pipilan biji kering.

Di samping aspek memperkuat produksi, kegiatan peningkatan ketahanan pangan melibatkan penguatan kegiatan di hilir. Produk pangan yang sudah dihasilkan para petani harus bisa sampai ke masyarakat dengan baik dan cepat. Untuk itu, dibutuhkan efisiensi rantai pasok sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan dan stok pangan merata di seluruh wilayah. Efisiensi rantai pasok ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, meliputi berbagai Kementerian serta institusi distribusi dan pemasaran, juga Perum Bulog untuk menjaga cadangan stok pangan.

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan juga terus mendorong terbangunnya Sistem Logistik Pangan Nasional. Sistem logistik pangan nasional yang kuat harus bertumpu pada empat strategi, yaitu peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, pengembangan kelembagaan, dan mendorong konsumsi pangan lokal.

Dalam konsep Sistem Logistik Pangan Nasional ini, kelembagaan distribusi pangan harus diperkuat dan dikelola oleh BUMN sebagai *national hub* dan BUMD sebagai *regional hub* yang dilakukan dengan pengendalian bersama oleh *stakeholder* terkait.

Keberadaan Sistem Logistik Pangan Nasional memudahkan dalam memetakan ketersediaan dan stok pangan di setiap wilayah. Peta ini bisa memudahkan pemerintah dan pemangku kepentingan pangan dalam menentukan intervensi sehingga tidak ada lagi istilah wilayah defisit pangan.

NORMAL BARU PERTANIAN

Sektor pertanian membuktikan keandalannya sebagai penopang perekonomian nasional selama masa pandemi Covid-19. Kinerja sektor pertanian menunjukkan indikator menggembirakan, terkait produksi pertanian dan kinerja ekspor. Badan Pusat Statistik merilis data, selama Januari-April 2020, nilai ekspor pertanian meningkat 16,9% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019, dari Rp 115,18 Triliun meningkat menjadi Rp 134,63 Triliun. Surplus perdagangan produk pertanian selama Januari-April 2020 juga meningkat signifikan, yaitu 32,96%. Secara nilai, terdapat peningkatan dari sebesar Rp 33,62 Triliun (Januari-April 2019) meningkat menjadi Rp 44,70 Triliun (Januari-April 2020).

Fakta ini memberi optimisme bagi para pelaku di bidang pertanian. Pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada pemberlakuan kebijakan *new normal*, tidak melemahkan peran pertanian sebagai “backbone” perekonomian bangsa. Ditengah perlambatan ekonomi dimasa pandemi, kegiatan pertanian justru menunjukkan kinerja baik dan positif. Kinerja usaha pertanian nasional, tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi nasional, yang masih berada di kisaran 3,0%, tapi juga mengurangi kekhawatiran terhadap munculnya kerawanan bahkan krisis pangan, akibat pandemi Covid-19.

Kementerian Pertanian terus menjaga dan memaksimalkan produksi pertanian nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam setiap kesempatan, mengatakan bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang harus tetap berproduksi dan dipastikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Bahkan di kala kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, para petani tetap bekerja. Termasuk ketika kebijakan *new normal* alias Tatanan Kehidupan Baru berlaku, sektor pertanian harus tetap berproduksi maksimal, sehingga 267 juta penduduk Indonesia tetap bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Implementasi *new normal* seharusnya tidak memberi banyak perubahan pola masyarakat dalam memenuhi dan mengakses pangannya. *New normal* justru dapat menjadi momentum untuk kembali menggeliatkan sektor pertanian dalam arti luas, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat bisa bangkit.

Kebijakan *new normal* menjadi momentum untuk mengembangkan pola bisnis pertanian yang lebih mumpuni.

Peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian harus mampu menjaga dan meningkatkan semangat itu. Caranya dengan menghadirkan program dan kebijakan yang dapat mendukung secara konkret kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir. Agar pelaku pertanian dapat segera beradaptasi dan mampu bebenah dengan situasi terkini atau era *new normal*, Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan postur anggaran. Perubahan ini bertujuan untuk menguatkan produksi pertanian dan secara langsung dapat menjaga serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah telah melakukan "*refocusing*" anggaran Kementerian Pertanian, dengan mengutamakan peningkatan sarana produksi pertanian, pengamanan ketersediaan pangan, padat karya, hingga "*social safety net*" (jaring keamanan sosial), termasuk *social safety net* berjangka pendek. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga berupaya menguatkan permodalan bagi petani, melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan.

Alokasi KUR untuk pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp 50 triliun dari total KUR Rp 190 Triliun. Dan sampai pertengahan Mei 2020, serapan KUR yang sudah disalurkan untuk pertanian mencapai Rp 17 triliun, artinya upaya ini direspon positif oleh petani. Berbagai stimulus yang diberikan kepada petani diharapkan dapat memicu semangat petani untuk terus berproduksi dan menghasilkan pangan. Apabila dari sisi produksi aman, maka ketahanan pangan masyarakat pun dapat lebih mudah untuk dijaga.

Petani dan sektor pertanian terus bergerak, hingga diperkirakan pada akhir Desember 2020 stok beras nasional masih akan tersedia sebanyak 4,7 juta ton. Percepatan tanam padi 5,6 juta hektare pada musim tanam kedua di 33 provinsi telah digulirkan untuk tetap mengamankan pasokan beras ditengah pandemi covid-19. Dalam percepatan musim tanam kedua, pemerintah menargetkan program itu bisa menghasilkan beras sebesar 15 juta ton pada periode Juli-Desember 2020.

Begitupun dengan komoditas strategis lainnya, untuk cabai dan bawang merah sejak April lalu, sejumlah wilayah sentra produksi, sudah mulai panen dan diperkirakan berlangsung hingga Juli mendatang. Begitu pula dengan petani tebu yang masuk musim giling. Meski di sisi produksi aman, pemerintah harus tetap menjaga pengelolaan dan pendistribusian komoditas pertanian, demi menjaga harga, baik ditingkat petani maupun konsumen.

Kementerian Pertanian menginisiasi beberapa program alternatif untuk mengamankan pangan masyarakat Indonesia. Di antaranya optimalisasi lahan

rawa di luar Pulau Jawa. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan tambahan produksi pangan baru di masa depan. Selain itu, gerakan diversifikasi pangan di masyarakat terus disosialisasikan, terutama memopulerkan bahan pangan pokok selain beras. Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan secara desentralisasi, dengan cara memperkuat lumbung pangan di setiap provinsi. Pemerintah juga mendorong masyarakat secara swadaya membudidayakan pangan, melalui program pemanfaatan perkarangan rumah, alias P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Modernisasi dan inovasi pertanian untuk produksi pertanian yang lebih pintar, efisien, efektif dan menguntungkan juga terus digalakkan.

Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa dukungan teknologi. Sektor pertanian harus mampu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan. Pengolahan lahan, menanam bibit, panen hingga pengolahan harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat berteknologi tinggi. Mekanisasi pertanian merupakan salah satu komponen penting untuk pertanian modern dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan. Inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh petani perlu terus didorong.

Kegiatan *on farm* diatas perlu dukungan dan kerja banyak pihak agar pemasaran dan pendistribusian hasil pertanian juga dapat berjalan efisien dan menguntungkan petani. Selain itu keterlibatan generasi milenial dan setelahnya dalam sektor pertanian, adalah salah satu kunci agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Generasi muda seharusnya tidak lagi ragu berkiprah di sektor pertanian. Berbekal besarnya potensi ekonomi di sektor ini, alam dan iklim tropis yang mendukung budidaya pertanian dan di dukung oleh aplikasi teknologi, generasi milenial bisa berperan sebagai penjaga ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa, bahkan menjadikan negeri kita sebagai lumbung pangan dunia.

AGRIPRENEUR MENJAWAB “*New normal*” PERTANIAN

Sematan gelar ‘pahlawan’ bagi para petani bukanlah sesuatu yang berlebihan. Pangan merupakan kebutuhan primer umat manusia dan petani memiliki peranan utama dalam penyediaannya. Benua Asia saja, diperkirakan menjadi rumah bagi 4,9 miliar orang pada tahun 2030. Ini akan mengakibatkan peningkatan konsumsi pangan lebih dari dua kali lipat dalam 12 tahun mendatang. Sementara itu, urbanisasi yang kian tinggi di negara-negara Asia, juga berkontribusi mengurangi pasokan pangan domestik. Untuk itu, dibutuhkan terjadinya regenerasi petani dengan bekal teknologi dan inovasi sehingga produktivitas pertanian bisa meningkat mengikuti pertumbuhan permintaan pangan yang cepat.

Inovasi selalu menjadi kata kunci dan berperan penting dalam penataan masa depan di semua lini. Inovasi mendorong perubahan pola pertanian tradisional menjadi lebih modern, juga penting dilakukan. Pertanian masa depan harus kompetitif, menguntungkan dan menarik, untuk mengatasi stagnasi.

Perubahan paradigma dari pertanian tradisional menjadi modern tentu bukan persoalan mudah. Mayoritas petani saat ini berusia lanjut dan bekerja secara tradisional. Maka dibutuhkan pemikiran inovatif “*out of the box*” dari generasi penerus sektor ini yang mampu mentransformasi pertanian untuk lebih maju. Beberapa alasan menurunnya jumlah petani dan minat bertani pada generasi muda karena bertani masih dianggap sebagai pekerjaan, bukan bagian dari aktivitas kewirausahaan. Petani sebagai sebuah pekerjaan tentu tidak menjanjikan keuntungan besar. Apalagi jika menggarap lahan milik orang lain atau upahan dari pemilik tanah.

Pemerintah telah berupaya menarik minat generasi muda terjun ke dunia pertanian dan mendekatkan konsep petani dengan kewirausahaan. Kementerian Pertanian menata ulang konsep petani melalui agripreneur. Dalam konsep petani sebagai agripreneur, petani tidak hanya menjadi ‘buruh’, tapi menjadi pemilik usaha tani. Sebagai agripreneur, petani tidak hanya berkutat di aspek hulu (produksi), namun didorong turut menguasai aspek hilir (pengolahan) sebagai sebuah sistem agribisnis.

Pada saat bersamaan, Pandemi covid-19 secara natural telah menciptakan tatanan baru pada lingkungan sektor pertanian. Tatanan baru atau *new normal* itu harus diikuti dengan berbagai inovasi, jika pelaku usaha pertanian ingin tetap bertahan. Tatanan baru dalam kegiatan pertanian menuntut Agriprenur melibatkan inovasi dan penerapan teknologi sebagai variabel penting.

Akselerasi Agriprenur Pertanian

Fenomena dalam tatanan baru sektor pertanian saat pandemi ini adalah semakin berkembangnya agriprenuer atau *startup* pertanian. *Start up* sendiri merupakan sebutan umum untuk usaha rintisan berbasis teknologi dan inovasi. Agriprenur muda juga bertumbuh dan marak berkembang sejak era 2010-an dengan generasi milenial sebagai penggeraknya.

Selama pandemi, *start up* pertanian banyak yang bergerak dalam pemberdayaan petani, layanan berbasis *E-commerce* dan jasa distribusi telah berhasil memangkas rantai pemasaran. Misal, Tanihub, Sayur Box, Kedai Sayur, dan sejumlah *start up* lainnya, hadir secara kolektif dan efektif menjembatani kebutuhan petani selaku produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Dalam kondisi pandemi, petani mengalami kendala untuk menjual produk mereka karena distribusi terhambat. Sementara masyarakat pun kesulitan untuk mendapatkan produk pangan karena pembatasan aktivitas sosial. Agripreneur hadir sebagai entitas penghubung sehingga kendala yang dialami unit hulu dan unit hilir bisa teratasi.

Peranan penting agripreneur atau *start up* pertanian ini ditekankan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR. Menteri Pertanian mengatakan pembangunan pertanian ke depannya akan semakin mengandalkan para petani muda dengan teknologi digital, terutama sebagai strategi untuk memperkuat produksi dan distribusi.

Agripreneur muda yang melek teknologi adalah potensi dan mitra strategis memecahkan kendala distribusi dan lemahnya akses pasar petani selama ini. Beberapa *start up* terbukti mampu menyelesaikan permasalahan petani di satu wilayah. Misalnya petani cabai di Jawa Timur, ada *start up* yang membuka akses pasar pada perusahaan pengolahan saus. Ada pula Inacom.id yang membeli kelapa petani di pesisir Sumatera, bahkan sekarang sudah mampu ekspor.

Selain itu terdapat inovasi segar dari para *start up* yang memfokuskan dalam penyediaan jasa informasi dan data pertanian, pemetaan daerah produksi dan pasar, bahkan pembiayaan bagi petani. Mereka semua anak-anak muda yang kreatif dan mampu berpikir menyelesaikan masalah petani.

Kini generasi milenial telah beradaptasi dengan sangat baik terhadap teknologi. Mereka pun kian sadar bahwa bekerja itu adalah menjadi *entrepreneur*, dan cita-cita menjadi seorang CEO sebuah usaha *start up* pertanian adalah modal besar yang harus didukung negara. Tak pelak saat ini banyak generasi muda tanpa *skill* dan pengetahuan yang mumpuni dari pendidikan formal pertanian, turut masuk kedalam ekosistem pertanian. Yang sangat menarik adalah, mereka telah mampu mengkombinasi pengetahuan non pertanian, kedalam ekosistem produksi pertanian. Ini adalah kesempatan besar bagi negara untuk memacu pertumbuhan dan peran anak muda dalam sektor pertanian.

Pertanian kini tumbuh tidak hanya menjadi bagian petani dan mahasiswa pertanian, namun berkembang seiring kepekaan para generasi milenial dari berbagai kalangan, membaca peluang ekonomi dunia. Mereka sadar bahwa urusan makan tidak akan pernah berhenti, sepanjang kehidupan manusia. Adaptasi teknologi dan cara baru industri pertanian mereka buat menjadi satu ekosistem pertanian baru. Sungguh *start up* agritech menjadi sebuah *new normal* baru sektor pertanian untuk masa depan.

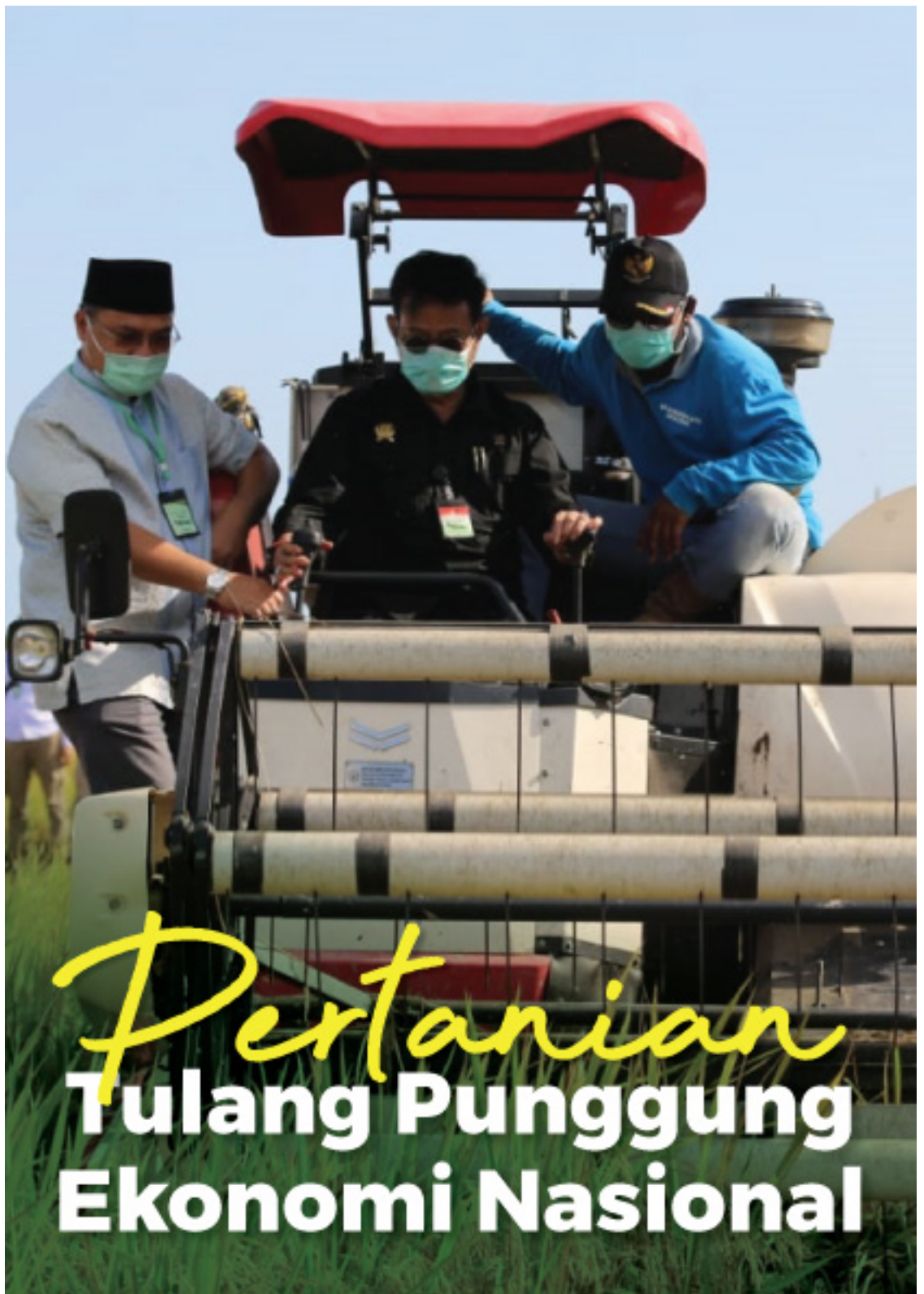
Meski pertumbuhan dan pergerakan agriprenur di Indonesia tergolong tinggi dan efektif, tapi kapasitasnya masih harus terus ditingkatkan. Sebagai sektor yang masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional, terutama pedesaan, pertanian membutuhkan lebih banyak lagi kehadiran pengusaha tani muda dan perusahaan pertanian yang peduli pada sektor ini.

Skala intervensi dan ekonomi dari *start up* ini harus kita dorong makin besar sehingga bisa memberi dampak bagi ekonomi nasional. Pemerintah telah bekerja sama dan memfasilitasi pergerakan petani muda ini, antara lain melalui dukungan permodalan. Pemerintah sudah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian senilai Rp 50 triliun. Selain itu, inovasi dan teknologi yang dimiliki pemerintah melalui berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian, harus semudah mungkin dapat diakses oleh generasi baru pertanian.

Menjaga jiwa positif anak muda adalah yang terpenting. Karena mereka masih punya idealisme dan harus terus bermitra dengan semua pihak termasuk pemerintah, untuk saling mengisi dan memperkuat di sektor pertanian. Kehadiran sejumlah *start up* pertanian telah memberi warna baru bagi pertanian kita saat ini. Tentunya kita harapkan masa depan pertanian Indonesia pun akan semakin cerah.

Pandemi covid-19 menjadi hal yang tak terhindarkan, namun bagi sektor pertanian menjadi sebuah harapan baru, untuk terus berkembang. Masa depan pangan Indonesia dan dunia kini ada di tangan para Agriprenur muda. Inovasi, teknologi dan adaptasi *new normal* menjadi strategi penting. Mengutip

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan, “Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang lama, kita harus berpikir dan bekerja lebih dari cara lama”. Keyakinan akan kemampuan generasi muda petani kita mengemban peran itu adalah sebuah harapan dan jawabannya.



Pertanian
**Tulang Punggung
Ekonomi Nasional**

PERTANIAN UNTUK PEREKONOMIAN BANGSA

Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang. Catatan ini menjadi torehan positif bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Badan Pusat Statistik menyebutkan, terdapat penurunan 810 ribu penduduk miskin jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Namun, Presiden Joko Widodo memastikan upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan tidak akan berhenti di situ. Pada saat memberikan pidato pertamanya saat pelantikan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia terlepas dari kemiskinan. Bahkan, beliau menargetkan Indonesia masuk dalam lima besar negara perekonomian terbesar di dunia.

Sebagai bagian dari pemerintah yang memfasilitasi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional, target tersebut tentunya menjadi tantangan besar bagi Kementerian Pertanian. Akan tetapi, kami percaya, dengan kolaborasi dan sinergi semua pelaku pembangunan nasional, tidak ada yang tidak mungkin.

Di mata kami, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Apalagi dalam data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85%, sedangkan kota sebesar 6,89%.

Wilayah perdesaan selama ini sarat dengan kegiatan usaha tani. Mayoritas sektor ekonomi andalan masyarakat perdesaan pun pada sektor pertanian. Namun, kita tidak bisa menafikan bahwa pembangunan pertanian Indonesia masih menghadapi dilema *gerontocracy*, yaitu sebuah kondisi kalangan tua mendominasi kegiatan pertanian. Dunia pertanian sejatinya membutuhkan regenerasi, khususnya keterlibatan generasi milenial di lapangan.

Pertanian maju, mandiri, dan modern

Transformasi pola pertanian mustahil dilakukan tanpa adanya perubahan dalam manajemen pembangunan pertanian. Kebijakan dan program pembangunan pertanian terus dibangun berdasarkan aspirasi dan masukan dari bawah, terutama dari petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Kita harapkan rancangan langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun pertanian maju, mandiri, dan modern bisa berbuah pada penurunan kemiskinan secara signifikan.

Implementasi revolusi industri 4.0 mau tidak mau memang akan mengubah cara kita menjalankan manajemen usaha pertanian. Revolusi industri 4.0 jelas memerlukan terobosan manajemen, yang tentu tidak akan berhasil tanpa terobosan perilaku dan kepemimpinan.

Harus disadari, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah peningkatan produksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, jika kita masih terpaku dengan cara lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan era Industri 4.0. Kita harus mengejar ketinggalan melalui upaya *benchmarking* dengan negaranegara lain yang telah berlari terlebih dahulu. Dengan demikian, kita tahu berada di posisi mana dan berapa jauh kita harus mengejar ketinggalan itu.

Peranan kaum milenial sangat vital dalam mentransfer kemampuan penggunaan dan penerapan teknologi. Melalui teknologi informasi dan media digital, kecepatan diseminasi akan lebih efektif. Dampak lain yang juga dalam genggamannya anak muda ialah akselerasi informasi dengan memviralkan teknologi pertanian melalui media sosial.

Selain itu, respons pengguna terkait dengan suatu inovasi teknologi langsung dapat diketahui secara *real time* dan akurat setelah informasi tersebut diuji coba dan dimanfaatkan petani di lapangan.

Patut disyukuri sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Oktober lalu, Syahrul Yasin Limpo sudah menegaskan komitmennya bahwa Indonesia harus secepatnya meninggalkan pola pertanian lama. Dirinya meminta jajarannya untuk bekerja cepat dalam memfasilitasi terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.

Pertanian maju menandakan bahwa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pertanian tidak hanya mengikuti deret hitung, tetapi juga harus ada lompatan dengan mengikuti deret ukur. Inovasi mutlak diperlukan dalam akselerasi produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Besarnya pangsa ekonomi sektor pertanian secara empiris dapat dihitung berdasarkan nilai bahan pangan harian, karena seluruh bahan pangan masyarakat praktis berasal dari usaha pertanian secara luas (umum). Bila nilai bahan pangan harian tiap penduduk rata-rata Rp75.000, maka nilai ekonominya mencapai Rp20 triliun per hari. Dalam satu tahun nilai ekonomi produk pertanian yang langsung dikonsumsi mencapai Rp7.300 triliun. Jumlah yang sangat besar ini jarang kita sadari, karena pikiran kita tertutup oleh bayangan bahwa kehidupan masyarakat pedesaan miskin, tidak terdapat gemerlap kemewahan. Faktanya, pedesaan mengandung kegiatan ekonomi yang super besar.

Untuk memahami besarnya nilai ekonomi produk pertanian pangan dalam arti luas, kita andaikan usah pertanian tidak ada sama sekali. Maka untuk menyediakan bahan pangan bagi 260 juta orang, Negara harus mengimpor bahan pangan senilai Rp 7.300 triliun setiap tahun, atau setara dengan US \$ 500 Milyard. Dari gambaran kasar tetapi nyata tersebut menjadi jelas, bahan usaha pertanian merupakan tulang punggung pertanian bangsa.

Apalagi setelah ditambah dengan nilai ekonomi produk perkebunan non pangan, jumlah nilai ekonomi usaha pertanian menjadi lebih besar lagi.

Pertanian modern juga perlu digiatkan sebagai pendorong loncatan pertumbuhan sektor pertanian. Tanpa penerapan teknologi modern, sektor pertanian tidak akan maju dan tumbuh. Perkembangan teknologi harus didorong dan dipacu. Modernisasi juga ditandai dengan penggunaan teknik-teknik yang canggih sehingga cara koordinasi dan pemecahan masalah yang digunakan akan berbeda dengan cara sebelumnya. Bertani pun bisa lebih cepat dan efisien.

Kita harapkan rancangan langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun pertanian maju, mandiri, dan modern bisa berbuah pada penurunan kemiskinan secara signifikan. Kami percaya kemajuan pertanian kita akan turut mengeluarkan masyarakat dari jebakan kemiskinan.

KOLABORASI MEMAJUKAN PERTANIAN INDONESIA

Pembangunan pertanian harus dilaksanakan dalam kerangka semangat dan kerja bersama. Kalimat tersebut tidak hanya sekali dua kali diucapkan, tapi berulang-ulang digaungkan oleh Syahrul Yasin Limpo sejak dilantik menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2019 lalu. Alasannya sederhana. Pertanian sebagai sektor produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, memang melibatkan banyak pelaku dan kelompok pemangku kepentingan yang tentunya memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, menjadi penting untuk menyelaraskan langkah para pelaku dan pemangku kepentingan di sektor ini. Bagaimana pun keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kekompakan dan kepedulian semua pihak.

Apalagi Menteri Pertanian selalu menekankan bahwa tujuan utama pembangunan pertanian adalah bagaimana kita mampu memberi makan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka tidak perlu disangsikan bahwa pembangunan pertanian, termasuk upaya memastikan ketersediaan pangan nasional dari produksi dalam negeri terus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Maka jika saat ini ada tuduhan bahwa pemerintah abai terhadap tata kelola pangan, kita perlu mempertanyakan basis data dan fakta yang digunakan. Bahkan kita bisa mengatakan, tuduhan tersebut muncul dari pihak yang tidak mengikuti perkembangan sektor pertanian saat ini.

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya terlihat dari tidak adanya gejolak harga pangan, sekalipun pada hari raya dan tahun baru 2020. Bahkan harga beras sepanjang tahun 2019-2020 cenderung menurun, dan hal ini terlihat pada kelompok pangan beras dan umbi-umbian mengalami deflasi sebesar 0,15%, dan dimana beras mempunyai andil terbesar (0,0334) dalam mengendalikan inflasi.

Berbicara tentang ketahanan pangan secara keseluruhan, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Perlu kita syukuri, data dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan capaian indeks ketahanan pangan Indonesia terus menunjukkan pergerakan yang positif. Pada tahun 2018, indeks ketahanan pangan Indonesia naik menjadi 54,8. Angka ini menjadikan peringkat ketahanan pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.

Peningkatan indeks ketahanan pangan ini berkorelasi dengan menurunnya tingkat kemiskinan di pedesaan, sebagai wilayah berbasis pertanian. Data terbaru Badan Pusat Statistik menyebutkan pada September 2019, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun menjadi 12,60 persen atau 14,9 juta jiwa. Sebelumnya, jumlah penduduk miskin di pedesaan memang terus menurun. Jika melihat data pada Maret 2013, persentase penduduk miskin di pedesaan 14,32 persen. Maret 2018, angkanya turun menjadi 13,20 persen. Di periode yang sama tahun 2019, tinggal 12,85 persen.

Selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan, kesejahteraan petani juga terus meningkat. Terbukti, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani, menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2018, NTP mencapai 102.46, meningkat dibandingkan NTP 2014 yang berada di angka 102.03. Pada tahun ini, NTP diperkirakan terus meningkat. Setidaknya rerata NTP Januari – November 2019 sudah berada di angka 103.09.

Sama seperti NTP, data NTUP juga menunjukkan peningkatan signifikan. NTUP 2018 mencapai 111.83, jauh meningkat bila dibandingkan NTUP 2014 yang berada di angka 106.05. Rerata NTUP Januari – November 2019 berada di angka 112.33.

Meningkatkan Produktivitas Pangan, Mensejahterakan Petani

Dengan segala capaian tersebut, perlu dipahami bahwa program dan kebijakan pemerintah saat ini berlandaskan pada dua misi utama, yaitu (1) mewujudkan kedaulatan pangan dan (2) meningkatkan kesejahteraan petani. Dua misi ini saling terhubung dan tak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan dan mewujudkan swasembada pangan, tidak dapat diartikan sebagai upaya membebani petani. Karena sesungguhnya swasembada pangan hanya bisa

terwujud jika petani terjamin kesejahteraan. Karena itu, pembangunan pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi,, tapi harus berakhir pada peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri.

Untuk memastikan kesejahteraan petani, maka diperlukan model pengelolaan usaha tani yang modern dan mandiri. Untuk mengembangkan usaha tani dengan model yang lebih maju tersebut, maka saat ini pemerintah tengah mengembangkan konsep korporasi petani.

Konsep korporasi petani ini dikembangkan dalam berbagai model, seperti pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani ataupun Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Daerah Rentan Rawan Pangan. Berbagai model korporasi petani tersebut bermuara pada tujuan untuk pemberdayaan petani dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, penyusunan kelembagaan usaha, dan temu usaha. Kelembagaan petani pun dikuatkan dengan meningkatkan kapasitas kelompok, membangun jejaring pemasaran hingga mendorong pembentukan lembaga usaha yang berbadan hukum. Difusi teknologi dan inovasi turut digiatkan melalui pelatihan dan penerapan alat pengolahan.

Konsep korporasi petani tersebut akan diintegrasikan dengan model pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian. Pemerintah telah memangkas suku bunga KUR, dari semula sebesar 7 persen menjadi 6 persen. Penurunan suku bunga ini ditujukan agar pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di bidang pertanian, semakin tertarik untuk mengikuti program KUR.

Sektor pertanian yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai sektor produktif juga akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Dari total pagu anggaran KUR pada tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, sektor pertanian memperoleh bagian lebih dari 25 persen, atau sebesar Rp50 triliun.

Di era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo, gerak dan langkah petani di lapangan akan semakin terbantu dengan terobosan baru melalui revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian yang ada di setiap kecamatan menjadi Kostratani. Kebaruan dalam Kostratani ini dicirikan oleh penggunaan IT dan alsintan secara masif serta memanfaatkan KUR sebagai tulang punggung pembangunan pertanian ke depan. Semua kegiatan pembangunan pertanian di Kostratani tersebut dapat dipantau secara langsung melalui *Agriculture War Room* (AWR) yang ada di Kementerian Pertanian.

Kepemimpinan Sang Komandan

Seperti tertuang di awal tulisan ini, pembangunan pertanian tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan kekompakan semua pelaku dan kelompok pemangku kepentingan. Tentunya sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, insan pertanian sangat berharap kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo bisa merajut semua kepentingan dari setiap elemen pelaku pembangunan pertanian.

Pengalaman kurang lebih 25 tahun sebagai Kepala Daerah dari level lurah hingga gubernur di provinsi Sulawesi Selatan, kami harapkan dapat menjadi modal kuat bagi beliau untuk mengomandani segala strategi yang dijalankan. Apalagi Sulawesi Selatan saat dipimpin beliau memiliki catatan sangat positif dalam hal pembangunan pertanian.

Sulawesi Selatan sejak dipimpin Syahrul merupakan salah satu provinsi yang memiliki ketahanan pangan sangat kuat. Terbukti, Sulawesi Selatan berhasil menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Ketahanan pangan Sulawesi Selatan yang sangat kuat tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi itu. Pada 2009, pergerakan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sekitar 7,8 persen, atau terbaik yang pernah dicapai provinsi tersebut kala itu, dari sebelumnya sekitar 7,4 persen.

Kita harapkan di bawah komando Syahrul Yasin Limpo dan kerja sama semua pihak, sektor pertanian bisa terus berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Petani dan semua pelaku pembangunan pertanian pun bisa merasakan manfaat keberhasilan pembangunan pertanian. Bersama kita bisa wujudkan “Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern”.

SINERGI MEMBANGUN PERTANIAN

Presiden Joko Widodo menyebutkan kunci untuk mewujudkan Indonesia Maju ada di sektor pangan. Indonesia bakal bisa bersaing dengan negara-negara maju dengan memperkuat ketahanan pangan karena pangan merupakan komoditas yang akan dibutuhkan oleh semua negara. Maka tidak perlu heran jika berulang kali Presiden Joko Widodo menyebutkan pertanian sebagai sektor produktif dalam kerangka pembangunan nasional.

Komitmen Presiden Joko Widodo ini merupakan modal penting bagi semua pelaku pembangunan pertanian. Dengan dukungan penuh dari Presiden, kita bisa mengharapkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi para pelaku usaha tani.

Dengan bermodal komitmen Presiden Joko Widodo bagi kemajuan pembangunan pertanian, strategi berikutnya yang perlu diuntai adalah menyelaraskan langkah semua pelaku pembangunan pertanian. Laju pembangunan pertanian tidak hanya bisa mengandalkan gerak petani sebagai pelaku di garis depan, ataupun Kementerian Pertanian sebagai fasilitator. Keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kekompakan semua pihak yang terlibat.

Semangat kebersamaan itu lah yang saat ini sedang dibangun oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Di internal Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berulang kali meminta jajarannya untuk bekerja keras dan bersinergi dengan semua pihak sehingga sektor pertanian bisa membawa rahmat bagi masyarakat tani. Mulai dari pejabat teras hingga peneliti, penyuluh, dan para petugas di lapangan, disebut memiliki peran penting dalam kinerja Kementerian Pertanian.

Semangat yang sama turut dibangun dengan semua kelompok pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian mengajak para petani, praktisi, pengusaha, maupun pemerintah daerah agar mampu berjalan selaras menuju barisan depan untuk kemakmuran.

Membangun pertanian dalam semangat kebersamaan menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Pertanian adalah sektor yang melibatkan begitu banyak pihak dengan kepentingan yang juga beragam. Memadupadankan semua kepentingan dari setiap pihak yang terlibat tentunya membutuhkan usaha yang tidak mudah dan waktu yang tidak sedikit.

Karena itu, jelang 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, kita semua bisa melihat kerja tiada henti dari Kementerian Pertanian untuk merajut semua kepentingan kelompok pelaku pertanian dalam suatu semangat kebersamaan.

Pembenahan data pertanian yang saat ini terus dikejar pun tak bisa dilepaskan dari keterlibatan banyak pihak. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, tak terhitung pertemuan dan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan data pertanian bisa diakses melalui satu pintu dan disimpan dalam satu atap.

Maka tidak perlu heran, tak lama setelah dilantik, Menteri Pertanian bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk sesegera mungkin menyusun dan memvalidasi data pertanian khususnya luas lahan baku sawah.

Gerak cepat ini memang perlu segera dilakukan karena perencanaan dan program produksi dan tata niaga pangan sangat bergantung pada data. Polemik berpotensi muncul ketika masing-masing kementerian dan lembaga mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif karena data yang dimilikinya berbeda. Data pertanian yang terkelola dengan baik akan bermuara pada pengelolaan pembangunan pertanian yang juga semakin baik.

Sinergi dan kerjasama dalam pembangunan pertanian pun digiatkan dalam pengelolaan anggaran. Upaya awal yang sudah dan akan terus dilakukan adalah menyinergikan dan mengoptimalkan program dan anggaran dari kementerian/lembaga lain untuk mendukung pembangunan pertanian. Upaya ini dimaksudkan untuk menggalang program dan anggaran untuk sektor pertanian. Ke depan filosofi yang dikembangkan adalah *program and budget for agriculture* bukan *program and budget in agriculture*. Menteri Pertanian menyadari anggaran di Kementerian Pertanian (*budget in agriculture*) sangat terbatas. Menggalang *resources* dari luar Kementerian Pertanian menjadi pilihan yang rasional.

Melalui filosofi *program and budget for agriculture*, Kementerian Pertanian juga akan mendorong peran swasta dan perbankan lebih besar dalam pembangunan pertanian. Manajemen korporasi akan dijadikan sebagai basis

utama. Dengan cara ini, keterlibatan swasta dan perbankan dapat secara nyata memberikan dampak kesejahteraan terhadap petani dan keluarganya.

Sinergi program dan anggaran antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain akan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan, antara lain: (a) peningkatan produksi dan produktivitas; (b) efisiensi usaha pertanian (rendah biaya); (c) ekspansi pertanian melalui optimalisasi.

Untuk mengimplementasikan sejumlah program itu secara baik, Kementerian Pertanian sedang menyiapkan skema dukungan permodalan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Arahkan langsung dari Menteri Pertanian, alokasi KUR untuk pertanian pada tahun 2020 diharapkan sebesar Rp 50 triliun dari total KUR Rp 190 triliun.

Selain itu, Asuransi Pertanian juga akan menjadi agenda prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian. Skema subsidi dan bantuan pemerintah juga akan lebih diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas secara nyata serta berkeadilan.

Kolaborasi Dalam Wadah Kostratani

Strategi untuk menyelaraskan langkah dalam pembangunan pertanian juga dilakukan Menteri Pertanian melalui revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian yang ada di setiap kecamatan sebagai pusat pembangunan pertanian melalui pembentukan Kostratani. Kostratani ini akan melibatkan seluruh *stakeholder* di daerah untuk bersama sama membangun pertanian di daerah.

Kostratani mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu: (a) Pusat Data dan informasi; (b) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian; (c) Pusat Pembelajaran dan Pelatihan Petani; (d) Pusat Konsultasi Agribisnis; dan (e) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan.

Dalam wadah Kostratani yang dilengkapi perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyuluh bisa semakin memaksimalkan perannya sebagai penghubung antara petani dengan pemerintah sebagai *policy maker*, juga dengan lembaga penyedia inovasi dan teknologi, seperti Badan Penelitian dan Pengembanagan Pertanian (Balitbangtan) dan perguruan tinggi, maupun dengan para pelaku pasar.

Dalam kerangka program Kostratani juga, Kementerian Pertanian memiliki *Agriculture War Room* (AWR) sebagai pusat komunikasi dan informasi para pelaku pembangunan pertanian. AWR terkoneksi dengan semua Kostratani di tingkat daerah sehingga pemerintah pusat akan lebih mudah memantau

maupun berkomunikasi dengan para pelaku pembangunan pertanian di daerah. Kostra Tani telah tersebar di 34 provinsi Indonesia. Kementerian Pertanian telah menggarap 534 Kostra Tani, terdiri dari 34 Kostra Wilayah, 100 Kostra Daerah, dan 400 Kostra Tani di tingkat kecamatan. Dengan jaringan yang terus diperluas, Kostratani bisa menjadi entitas penghubung yang semakin efektif.

Dengan upaya terus membangun kerja sama antar pelaku pembangunan pertanian, kita tentunya bisa berharap pembangunan pertanian akan memiliki fondasi yang kuat. Sektor pertanian selayaknya dibangun melalui gerakan bersama dengan berbingkai kebangsaan dan gotong-royong. Pembangunan pertanian perlu berpijak pada dasar yang kuat, perlu rumusan konsep yang mantap dan ramuan strategi supaya bersinergi. Karena itu, pijakan yang tepat adalah membesarkan gerakan bersama. Dengan menyatukan kekuatan semua elemen bangsa, “Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, dan Modern” bukan sekedar mimpi, tapi sebuah cita-cita yang bisa segera terwujud.

HIBRIDASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Ideologi pembangunan pertanian Indonesia mengalami pergeseran dari hanya paradigma produksi, menjadi produksi untuk kesejahteraan petani dan kemakmuran sosial. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut pergeseran ini sebagai langkah mentransformasi kedudukan pembangunan pertanian konvensional yang hanya berbasis produksi *on farm* menjadi pertanian *off farm* yang dikelola dengan data, platform, aplikasi, teknologi, hasil riset, dan inovasi tinggi. Transformasi ini bisa dilakukan melalui pendekatan korporasi dan dikelola dengan prinsip kolaboratif antar multi *stakeholders*.

Sejak menjadi Menteri Pertanian RI, Syahrul memang getol mengubah wajah pembangunan pertanian Indonesia. Masyarakat masih memandang pertanian sebagai sektor tradisional yang tidak menjanjikan secara ekonomi dan status sosial. Pola pikir masyarakat ini berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja pertanian. Kelompok muda kurang berminat untuk terjun ke sektor pertanian.

Strategi awal Syahrul untuk menghilangkan stigma pertanian “kumuh” dilakukan dengan menjadikan “Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern” sebagai tagline Kementerian Pertanian RI. Menurut Syahrul, pertanian Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern bisa tercapai jika kita fokus pada peningkatan produksi untuk kesejahteraan petani dan kemakmuran sosial.

Pertanian disebut MAJU manakala kita bisa mencapai target pertumbuhan 7%, Gratieks, peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 2000 triliun. Pendapatan per kapita petani meningkat, dan kesejahteraan masyarakat membaik, ditunjukkan dengan mengecilnya Gini Ratio dan meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP).

Pertanian disebut MANDIRI apabila pemerintah mengurangi intervensi dalam memberikan bantuan dalam pembangun pertanian. Petani memiliki kelembagaan ekonomi yang baik, mempunyai hubungan yang setara dengan

pengusaha, dan memiliki akses yang terbuka pada lembaga keuangan perbankan (KUR) dan asuransi.

Pertanian dikatakan MODERN kalau dalam pelaksanaan pembangunan pertanian itu sudah memanfaatkan hasil-hasil riset, teknologi IT, platform, aplikasi, dan inovasi yang handal. Pengelolaan pembangunan pertanian memasuki era baru dengan implementasi teknologi secara penuh. Implementasi teknologi ditandai dengan menghasilkan produk kualitas tinggi dalam jumlah yang terencana, berkelanjutan, *input* semakin kecil, *output* semakin tinggi, dan efisien. Semakin modern sebuah sektor tertentu, akan semakin diminati oleh pencari kerja, karena pendapatan dan kehormatan sosialnya semakin baik.

Upaya kita untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern mustahil dilakukan jika tidak melakukan pembenahan dalam manajemen usaha tani. Saat ini pemerintah menggiatkan transformasi pertanian dari *on farm* menjadi *off farm* dengan mengembangkan model manajemen usaha tani berbasis korporasi.

Dalam manajemen usaha tani berbasis korporasi, para petani atau pelaku usaha tani disatukan dalam kelompok besar. Kelompok tani berbasis korporasi ini diajak untuk berpikir dan bergerak dengan manajemen dan aplikasi modern, melakukan pengolahan hasil tani dengan teknologi industri modern, serta memasarkannya ke masyarakat dengan cara yang modern pula.

Sistem kelompok usaha tani dalam skala besar memungkinkan para pelaku ini untuk memiliki industri perbenihan dan pengolahan mandiri, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam memasarkan produk mereka. Proses agribisnis seperti ini memungkinkan kelompok tani mendapatkan nilai tambah yang besar. Keuntungan terbesar usaha tani memang terletak di bidang pengolahan dan pemasaran.

Untuk menyokong manajemen usaha tani berbasis korporasi, pemerintah tidak akan lagi mengandalkan pembiayaan dengan model pemberian bantuan secara gratis. Meskipun tidak bisa dihilangkan secara instan, model pembiayaan seperti ini harus terus dikurangi. Pelaku usaha tani yang mandiri hanya dapat dilahirkan dari sistem pembiayaan yang mandiri. Maka perlahan kita harus menghilangkan stigma pembangunan pertanian yang dilakukan dengan pendekatan sinterklas.

Program kredit usaha rakyat (KUR) bisa menjadi alternatif pembiayaan yang ideal. Berulang kali Syahrul turut mengkampanyekan pemanfaatan KUR oleh pelaku usaha tani. Langkah pemerintah untuk mengurangi suku bunga KUR dari 7 persen menjadi 6 persen, membawa angin segar kepada dunia usaha, termasuk sektor pertanian. Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian turut terlihat dari besarnya porsi anggaran KUR yang didapat.

Sektor pertanian memperoleh bagian lebih dari 25 persen, atau sebesar Rp 50 triliun.

Dengan plafon Rp 50 triliun dan penurunan suku bunga menjadi 6 persen, kita harapkan semakin besar peluang petani untuk memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan. Dengan pinjaman tanpa agunan, petani dapat membeli sarana dan prasarana produksi dengan lebih mudah. Dana KUR juga bisa digunakan dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian.

Eskalasi dan akselerasi pembangunan pertanian juga akan gencar dilakukan pada level kecamatan melalui program Kostratani. Kostratani menjadi titik koordinat dan simpul akselerasi, menjadi hub dan pusat kolaborasi kelompok pemangku kepentingan, serta melibatkan aktivitas produksi, petik, olah, dan jual. Kostratani juga menjadi jembatan untuk mempertemukan produk dengan pasarnya. Perannya sebagai penghubung tersebut dilakukan dengan mengoptimasi platform, aplikasi teknologi informasi (*information technology/IT*), digitalisasi, riset, big data, dan *artificial intelligence*.

Kostratani sebagai pusat manajemen pembangunan pertanian juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek, dan bahkan dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud). Kolaborasi ini akan membantu mempercepat bisnis model pertanian yang berbasis korporasi antar desa di area Kostratani. Ini yang disebut sebagai kolaborasi strategis, yang akan menghantarkan konsep hibridasi dalam pembangunan pertanian.

Menggeser paradigma lama dalam pembangunan pertanian, tentu bukanlah soal yang mudah. Karena itu, usaha transformasi perlu melibatkan semua pihak. Dengan mengubah cara kerja, orientasi dan perspektif pembangunan pertanian menjadi pertanian maju, mandiri, dan modern, akan menyelesaikan lebih dari setengah persoalan bangsa. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan bangsa Indonesia ada pada sektor pertanian. Untuk itu, marilah mengubah bangsa ini dimulai dari sektor pertanian. Kami yakin, Indonesia pasti maju.

DIPLOMASI EKSPOR PERTANIAN

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggagas Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka impor.

Gerakan ini dinilai sebagai gerakan paling kuat untuk membuka pintu keluar relesi di sejumlah negara. Gratieks juga bisa dibilang sebagai bukti nyata bahwa Indonesia memiliki nyali besar dalam melawan lesunya ekonomi dunia.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul, gerakan ini dengan sendirinya juga memiliki kemampuan dalam memantau situasi kekisruhan di dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Akan tetapi, jangan lupa, kita harus punya strategi untuk memastikan bahwa gerakan ini berhasil diterapkan.

Setidaknya ada dua cara yang mesti dilakukan secara simultan. Pertama, pengelolaan keunggulan komparatif dan kedua melakukan identifikasi pelebaran potensi pasar. Akan tetapi, untuk mencapai kedua hal ini, setidaknya kita juga mesti bisa melakukan tiga hal lainnya.

Ketiga hal itu, antara lain melakukan percepatan peningkatan produksi komoditas ekspor, melakukan pengembangan kawasan komoditas pertanian, serta membangun platform diplomasi ekonomi dengan cara melakukan promosi dan memfasilitasi ekspor.

Dalam hal ini diplomasi dagang dan *networking* harus menjadi kekuatan utama dan faktor penentu tumbuhnya neraca perdagangan kita. Diplomasi dan *networking* harus mampu merebut posisi Thailand sebagai produsen karet terbesar di dunia.

Pengelolaan keunggulan komparatif produk tentu saja dapat dilakukan Kementerian Pertanian. Akan tetapi, langkah yang lain, seperti perluasan pasar ekspor, melakukan diplomasi, promosi dan fasilitas ekspor, wewenangnya ada pada Kementerian Perdagangan dan lembaga lain.

Diplomasi ekonomi, misalnya, dalam konteks ini sepenuhnya menjadi ranah Kementerian Luar Negeri, sedangkan promosi dan fasilitas ekspor menjadi tugas pokok Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, tugas utama Kementerian Pertanian ialah meningkatkan daya saing produk pertanian ekspor dengan cara memperbaiki kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

Di samping itu, Kementerian Pertanian juga wajib mendorong penggunaan teknologi sebagai upaya memperbanyak jumlah produk turunan, melalui agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan dan pasar, serta menguasai kebijakan dan pengalaman dari negara lain.

Namun, bagaimanakah kekuatan diplomasi dagang produk-produk pertanian Indonesia? Pengalaman yang sangat menarik. Produsen karet terbesar nomor dua di dunia, sesudah Thailand, ialah Indonesia. Berikutnya, Malaysia. Tiga negara ini menguasai 70% produsen karet dunia, tetapi tidak memiliki kemampuan menentukan harga karet di pasar global. Sementara itu, Singapura, negara yang tidak memiliki sebatang pohon karet pun justru mampu menentukan harga karet dunia.

Yang paling penting ialah inilah saatnya kita mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerjasama ekonomi internasional. Kita harus mampu meningkatkan level serta kualitas kehidupan masyarakat tani agar jauh lebih baik lagi.

Mengapa demikian? Karena Singapura memiliki *networking* dan kemampuan diplomasi ekonomi yang lebih baik di Asia.

Dengan begitu, dapat dipahami mengapa Menteri Pertanian menggunakan terminologi “gerakan” sebagai salah satu cara melipatgandakan ekspor. Istilah gerakan tak lain hanyalah sebagai cara Kementerian Pertanian dalam melibatkan semua *stakeholders* agar memiliki kesadaran kolektif untuk ekspor.

Inilah yang disebut Menteri Pertanian sebagai aliansi strategis dorongan peningkatan ekspor tiga kali lipat. Jika pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah memiliki orientasi yang jelas tentang ekspor, *stakeholders* dengan sendirinya akan menghasilkan produk dengan kualitas dan standar yang sesuai preferensi pasar.

Apa yang dicanangkan Menteri Pertanian bukanlah pepesan kosong sebab Indonesia memiliki potensi ekspor yang sangat besar dan tersebar luas di banyak negara. Daya saing beberapa komoditas pertanian unggulan Indonesia di pasar internasional juga sangat baik.

Dalam hal ini Kementerian Pertanian tinggal menggali potensi ekspor komoditas pertanian lebih serius dan lebih luas, dengan memahami kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki yang tercermin pada keunggulan komparatif komoditas pertanian menurut wilayah.

Inovasi dan kreativitas menjadi kata kunci dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Produk hasil pertanian diusahakan tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan baku, tapi diolah terlebih dahulu menjadi produk jadi sehingga bisa meningkatkan nilai tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan ekspor, Kementerian Pertanian harus siap-siap menghadapi isu global. Isu yang dilahirkan oleh kelompok broker transnasional. Isu-isu ini dimaksudkan untuk menghambat akses pasar internasional. Setiap komoditas biasanya memiliki isu-isu sendiri. Kelapa Sawit, misalnya, akan diperhadapkan dengan isu deforestasi, kebakaran hutan, *carbon stock*, HCV, *indigenous people*, *animal welfare* (kerusakan habitat gajah, harimau, orang utan), keamanan pangan: kandungan logam berat, dll.

Kakao dan kopi; keamanan pangan: kandungan kadmium, automatic detention, sertifikasi, MRLs/kandungan logam berat, *animal welfare* (kopi). Paia dan lada; persyaratan mutu/sertifikasi, kandungan logam berat, karet; persyaratan mutu dan sertifikasi *oversupply*.

Bagaimana melawan isu-isu global untuk produk pertanian Indonesia? Jawabannya ialah perkuat diplomasi. Dalam konsep ekonomi politik internasional, interaksi antaraktor atau pelaku ekonomi dicapai melalui komunikasi, salah satunya dengan diplomasi. Diplomasi ekonomi harus fokus pada upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional.

Diplomasi ekonomi dalam konteks Grati eks dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan partner dagangnya. Pertemuan ini penting dilakukan untuk menjelaskan dan menyusun prioritas aspek-aspek yang menguntungkan.

Yang paling penting ialah, inilah saatnya kita mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerja sama ekonomi internasional. Kita harus mampu meningkatkan level serta kualitas kehidupan masyarakat tani agar jauh lebih baik lagi.

GRATIEKS, EKOSISTEM PERTANIAN

Negara-negara di dunia membutuhkan hasil produksi pangan Indonesia. Bagaimana tidak, seluruh produk pertanian kita tumbuh dengan subur dan memiliki hasil yang berkualitas dan memuaskan. Pertanyaannya, mampukah semua komponen dan praktisi pertanian kita menyuplai kebutuhan mereka?

Mengutip pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kelebihan dari berbagai aspek teknis dan strategis. Ketimbang negara lain, negeri ini selalu disirami air hujan dan dihangati sinar Matahari setiap harinya. Karena itu, tanah kita subur. Alam kita masyhur. Air kita mancur.

Dengan demikian, tak ada kata lain selain memusatkan pemikiran kita pada kata maju, mandiri, dan modern, tiga kata yang menjadi kunci bagi pembangunan ekspor pertanian Indonesia.

Terkait hal ini, Menteri Pertanian meminta pengusaha dan eksportir untuk melipatgandakan lalu lintas ekspor mereka menjadi tiga kali lipat. Permintaan ini merupakan bagian dari program jangka panjang yang diyakini memiliki dampak pada roda ekonomi nasional.

Melalui gerakan ini, akan ada jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian. Namun, apakah implementasi program ini bisa direalisasikan dengan cepat? Jawabannya bisa! Pertama, kegiatan produksi *on farm* dengan kegiatan *offfarm* perlu dihubungkan sebagai dasar menuju ekosistem pertanian modern.

Sistem ini dengan sendirinya akan mengubah kegiatan pertanian individu menjadi kegiatan pertanian kolektif dan korporasi. Teknologi, digitalisasi, aplikasi, platform, dan inovasi, menjadi satu kesatuan dan bingkai konsep ekosistem pertanian modern.

Penghubungan *on farm* dan *off farm* diyakini mampu menaikkan nilai tambah produk pertanian untuk menemukan pasar yang bisa menyerapnya. Lebih dari itu, hubungan dan gerakan ini lahir dari keinginan Menteri Pertanian Syahrul untuk melipatkan nilai tambah produk pertanian dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Apalagi hasrat Menteri Pertanian dalam melaksanakan gerakan ini mendapat angin segar dari Kementerian Keuangan RI. Kemenkeu telah membangun kantor bersama ekspor (KBE) untuk memudahkan kepentingan pengekspor terkait kebutuhan segala macam informasi dan konsultasi ekspor.

Keberadaan KBE juga disebut sebagai wujud dan komitmen sejumlah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kantor KBE, pembiayaan yang kerap menjadi kesulitan bagi pelaku ekspor UMKM sektor pertanian dapat dipecahkan secara bersama.

Tren kenaikan ekspor

Di sisi lain, keseriusan Kementerian Pertanian menggenjot gerakan ini telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Ini terlihat dari catatan Badan Pusat Statistik pada periode Desember 2019. Hasil ekspor pertanian Indonesia meningkat 24,35% atau jika dianggarkan ke dalam bentuk dolar, nilainya mencapai US\$370 juta.

Tren kenaikan ekspor ini terlihat juga dari data yang dikeluarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian. Pusdatin menyampaikan selama lima tahun ini, Kementerian Pertanian berhasil menggenjot ekspor produk pertanian hingga 26,9%. Capaian itu tercatat dari volume ekspor tahun 2013 yang tadinya 33,5 juta ton menjadi 42,5 juta ton pada 2018.

Dari sisi nilai, selama periode 2014-2018, jumlah keseluruhan ekspor produk pertanian Indonesia mencapai Rp 1.957,5 triliun dengan akumulasi tambahan Rp 352,58 triliun. Pada bagian ini, sektor perkebunan tercatat menjadi komoditas ekspor yang cukup tinggi. Sektor ini menjadi andalan ekspor Indonesia seiring meningkatnya konsumsi dan perubahan gaya hidup masyarakat global.

Beberapa komoditas yang menunjukkan kontribusi itu, antara lain kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi. Selanjutnya, ada juga komoditas peternakan, khususnya perunggasan dan produk hortikultura, seperti sayur dan buah. Secara umum, kontribusi sektor pertanian dalam ekspor nonmigas mengalami peningkatan.

Pada 2018, kontribusi ekspor sektor pertanian mencapai 2,11% dari total ekspor nonmigas senilai kurang lebih Rp 500 triliun. Namun, pada 2019, angkanya meningkat menjadi 2,34% atau setara Rp 550 triliun.

Jika Gratiex dapat berkontribusi penuh pada 2024, potensi ekspor kita diperkirakan mencapai Rp 1,800 triliun. Angka ini sama dengan 7,5% kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor nonmigas.

Sebagai informasi, Grati eks merupakan gerakan yang digagas Menteri Pertanian Syahrul yang dalam implementasinya telah melibatkan banyak *stakeholders*. Gerakan ini memiliki tujuan utama, yakni menyatukan kekuatan pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini diharapkan mampu bekerja dengan cara yang tidak biasa karena sudah memanfaatkan teknologi, inovasi, IT, digitalisasi, riset, jejaring, dan kerja sama yang kuat.

Dengan begitu, akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di setiap daerah secara tidak langsung terbuka lebar. Akses inilah yang diharapkan bisa mendulang ekspor melalui aplikasi peta potensi ekspor dan *Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export* (IMACE).

Adapun potensi ekspor kita pada 2018 meliputi *palm oil*, karet alam, kopi, biji kakao, lada, jambu biji, mangga, manggis, pisang, nanas, buah-buahan, dan hewan ternak mencapai total transaksi sebesar US\$17,5 miliar, sedangkan kemampuan kita saat ini hanya US\$10,4 miliar. Hal ini disebabkan slot yang tersedia tidak mampu memenuhi negara tujuan, yakni USA, Belanda, Malaysia, Jepang, Rusia, Australia, Jerman, Kanada, Singapura, dan Tiongkok.

Potensi ini tidak termasuk puluhan komoditas lain dan puluhan negara tujuan ekspor yang lain walaupun kita juga harus ingat bahwa semua negara yang ada di dunia ini sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah ekspor, lalu menekan jumlah impor. Atau paling tidak, semua negara menjaga keseimbangan neraca perdagangannya masing-masing.

Untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan, Indonesia harus melakukan dua hal penting. Pertama ialah meningkatkan daya saing setiap komoditas. Kedua, melakukan lobi dan diplomasi multilateral dengan negara di dunia.

Akan tetapi hal yang perlu diingat, langkah penguatan daya saing selalu berkaitan dengan karakteristik pasar. Pasar secara bebas memberikan kriteria untuk komoditas yang bisa bersaing pada pasar bebas. Komoditas yang memiliki daya saing tinggi dengan sendirinya akan diserap oleh pasar. Komponen daya saing termasuk di dalamnya ialah harga.

Pada posisi diplomasi perdagangan, baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral, dimaksudkan untuk membangun bargaining pasar dengan melakukan intervensi dan melibatkan kapasitas diplomasi sebuah negara.

Di masa sekarang dan yang akan datang, keunggulan sebuah negara akan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara dalam merebut dan menguasai pasar. Sektor pertanian menjadi sektor kunci yang paling strategis untuk melakukan penetrasi pasar karena pertanian menghasilkan komoditas

kebutuhan pangan. Semakin banyak penghuni bumi, semakin besar kebutuhan terhadap produk-produk pertanian.

Dengan asumsi itu, dapat dimengerti mengapa Kementerian Pertanian RI mencanangkan Gerakan Tiga Kali Ekspor atau Grati Eks. Mengapa disebut sebagai gerakan, karena harus mengubah pola pikir, kebiasaan, dan kultur masyarakat, khususnya petani, dalam membangun orientasi tentang pertanian.

Dalam konteks ini, pertanian tidak sekadar memproduksi, tapi mentransformasi *on farm* menjadi *off farm*. Sebuah perspektif usaha personal menjadi usaha kolektif bersifat korporasi dan kolaboratif, yang memiliki interkoneksi dari hulu hingga hilir. Gerakan ini bisa disebut sebagai gerakan membangun ekosistem pertanian modern.

Kembali ke pertanyaan awal, apakah kita mampu menyuplai kebutuhan masyarakat dunia. Apakah kita mampu menyatukan kekuatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya tentu saja mampu, sebab, kita berada dalam posisi maju dan mandiri. Untuk itu, mari kita bangun ekosistem pertanian yang modern.

EKSPOR DAN KESEJAHTERAAN PETANI

Perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebuah negara akan diuntungkan jika bisa memiliki neraca perdagangan surplus, yaitu lebih banyak melakukan ekspor dibandingkan impor.

Untuk meningkatkan daya saing produk kita di pasar global, Presiden Joko Widodo berulang kali meminta pada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membatasi ekspor bahan mentah. Presiden memandang ekspor produk dalam bentuk setengah jadi atau jadi akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Maka langkah yang diambil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah sangat tepat. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian meminta transformasi pertanian untuk sesegera mungkin dilaksanakan. Paradigma pertanian berbasis produksi saja semakin tidak relevan. Sudah saatnya pertanian kita berorientasi pada kesejahteraan petani dan kemakmuran sosial.

Transformasi ini hanya bisa dilakukan jika pola pertanian konvensional yang umumnya berbasis produksi *on farm* diubah menjadi pertanian *off farm*. Untuk memperkuat *off farm*, pengelolaan pertanian tidak bisa lagi menggunakan pola lama dengan perangkat tradisional. Pertanian model baru ini harus dilakukan dengan memperkuat data, serta menggiatkan inovasi, teknologi, dan hasil riset. Transformasi juga tidak mungkin dilakukan secara parsial. Transformasi secara *holistic* tersebut bisa dilakukan dengan prinsip kolaborasi multi *stakeholders* yang berbasis korporasi.

Maka dalam kerangka pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern, secara perlahan tapi konsisten pemerintah akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. Langkah tersebut semakin tegas karena saat ini Kementerian Pertanian sudah mencanangkan program Gerakan Tiga kali Ekspor atau disingkat Grati eks.

Dari sisi sasaran, Grati eks memasang target bahwa ekspor pertanian harus meningkat hingga tiga kali lipat. Tapi prosesnya tentu tidak semudah

membalikkan telapak tangan. Atau dalam istilah Pak Menteri Pertanian, semua jajaran Kementerian Pertanian bersama para kelompok pemangku kepentingan perlu bekerja dengan cara yang tidak biasa. Grati eks harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sehingga produk pertanian kita layak ekspor.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi pertanian. Ekspor hanya bisa dilakukan jika produksi pangan lokal surplus atau melebihi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi diupayakan dengan menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah dan peningkatan efisiensi, pengembangan dan penerapan mekanisasi dibarengi dengan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, serta ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan dan penyediaan air.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan standar kualitas produk pertanian kita sehingga bisa diterima oleh mancanegara. Para pelaku usaha tani harus pintar dan cermat membaca kebutuhan pasar luar negeri, termasuk menangkap peluang pasar yang belum terjamah sebelumnya.

Akselerasi Ekspor Pertanian, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Langkah pemerintah untuk meningkatkan ekspor sekaligus disertai komitmen menekan impor. Sungguh menarik jika menelisik pernyataan Menteri Pertanian setiap kali ditanya tentang kebijakan impor. Syahrul menyebutkan bahwa impor tidak haram, tapi ia memastikan bahwa selama beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian, rekomendasi impor tidak akan mudah dikeluarkan. Bahkan beliau menegaskan bahwa untuk setiap rekomendasi impor yang dikeluarkan, pihaknya akan mempertanyakan tujuan dan manfaatnya bagi rakyat.

Dari pernyataan Syahrul tersebut, kita bisa menangkap akan sulit bagi para importir untuk memasukkan produk-produk pertanian ke wilayah Indonesia. Impor hanya akan dilakukan jika ada kebutuhan mendesak dengan persyaratan ketat.

Komitmen tersebut tercermin dari positifnya neraca perdagangan pertanian kita, setidaknya sejak Syahrul menjabat sebagai Menteri Pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume dan nilai ekspor produk pertanian selama Nopember-Desember 2019 meningkat masing-masing 8,66 persen dan 10,90 persen dibandingkan periode Nopember-Desember 2018, yaitu dari 7,73 juta ton menjadi 8,40 juta ton dan dari US\$ 4,67 Miliar menjadi US\$ 5,18 Miliar. Pada periode tersebut, surplus neraca perdagangan produk pertanian Indonesia juga meningkat 34,72 persen dibanding tahun 2018, yaitu dari US\$ 1,44 Miliar menjadi Rp 1,95 Miliar.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada awal tahun 2020. Di tengah tren penurunan ekspor nasional, sektor pertanian mengalami peningkatan ekspor tertinggi *Year on Year bases*(YOY) dibanding sektor lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor pertanian Januari 2020 meningkat 4,54% dibanding bulan sebelumnya.

Peningkatan ekspor dan surplus perdagangan produk pertanian dalam dua bulan terakhir ini tentunya tidak terlepas dari dorongan kuat kepemimpinan Syahrul dalam menggerakkan ekspor dan menekan impor produk pertanian. Kebijakan ini tak semata-mata untuk meningkatkan pemasukan devisa, tapi juga untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dengan peningkatan ekspor pertanian, pendapatan para petani pun kita harapkan turut bertambah.

Paradigma baru dalam pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani ini kita harapkan secara kontinu bisa berdampak pada penurunan kemiskinan dan semakin berkurangnya kesenjangan antara kota dan desa. Perhatian besar Presiden Joko Widodo terhadap petani telah terbukti sejak periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun dan gini rasio sebagai indikator ketimpangan kota-desa juga semakin mengecil.

Dari sisi tingkat kemiskinan, pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 11,36% (28,17 juta jiwa) dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia, dan terus berangsur-angsur turun dan menembus angka satu digit (9,82%) pada Maret 2018. Pada Maret 2019 kembali turun menjadi 9,41% (25,14 juta jiwa) dari sekitar 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Pada September 2019 turun lagi menjadi 9,22%.

Menurunnya jumlah penduduk miskin juga diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, khususnya di perdesaan yang ditandai oleh menurunnya *Indek Gini Ratio*. Pada September 2013, *Gini ratio* sekitar 0,324 terus menurun dan September 2018 menjadi 0,319. Pada Maret 2019 pemerataan pendapatan di perdesaan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya *Gini Ratio* menjadi 0,317. Pada akhir 2019, ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan turun kembali, dengan *Gini Ratio* sebesar 0,315.

Ke depan kami harapkan kesejahteraan petani bisa terus meningkat. Sejumlah program sudah siap dijalankan untuk memantapkan langkah petani dalam meningkatkan produktivitas pangan. Sebut saja, *Kostratani* sebagai bentuk revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan dengan memasifkan penggunaan IT dan alat mesin pertanian modern. Para penyuluh *Kostratani* berperan melakukan pendampingan sehingga petani lebih berdaya, maju, dan mandiri dalam mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian.

Selain Kostratani, pemerintah juga sudah menyiapkan paket pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Model pembiayaan KUR memungkinkan petani bisa memiliki modal untuk meningkatkan skala usahanya. Seperti yang dicita-citakan pemerintah, petani tidak lagi bergerak pada skala kecil, tapi meningkat ke skala yang lebih besar, yaitu bidang hulu hingga hilir.

Kami harapkan dengan sinergi dan kolaborasi yang sedang digiatkan pemerintah, ekspor pertanian bisa terus menggeliat. Seperti yang diungkap Pak Syahrul, mari lawan impor dengan meningkatkan ekspor!

PERTANIAN PENYELAMAT EKONOMI

Seperi diprediksi oleh banyak lembaga dunia dan para pakar, pandemi covid-19 akan bedampak dahsyat terhadap perekonomian global. Prediksi tersebut terbukti, saat sejumlah negara telah mengalami resesi, seperti Korea Selatan, Singapura, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan Italia. Indikator resesi mengacu pada penurunan produk domestik bruto (PDB), merosotnya pendapatan riil, jumlah lapangan kerja, penjualan ritel, dan terpuruknya industri manufaktur. Beberapa ekonom juga memprediksi negara kita dalam ancaman resesi ekonomi.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) di Kuartal II 2020 tumbuh negatif, -5,32% dibandingkan Kuartal II 2019 (*Year on Year-YoY*), dan tumbuh -4,19% dibandingkan Kuartal I 2020 (*Quarter to Quarter-QtQ*).

Tapi di balik angka tersebut, terdapat fakta yang perlu kita telisik. Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian justru melesat positif hingga mencapai 16,24% pada triwulan II (QtQ). Bahkan, catatan dari tahun ke tahun (YoY), hanya sektor pertanian yang tetap mampu tumbuh positif hingga 2,19%. Pertumbuhan sektor pertanian sekaligus membuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional terus menguat.

Jika kita amati sektor pertanian pada kuartal II-2019 kontribusinya hanya 13,57 persen, tapi pada kuartal II 2020 ini kontribusi sektor pertanian pada PDB meningkat menjadi 15,46 persen (Badan Pusat Statistik, 5 Agustus 2020).

Capaian kinerja sektor pertanian tersebut sebetulnya telah diprediksi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sejak awal pandemi, Menteri Pertanian menyebutkan bahwa sektor pertanian akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Argumennya jelas, pangan dan produk pertanian merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa tergantikan. Maka di tengah pelemahan ekonomi dunia akibat pandemi, sektor pertanian menjadi bisnis yang paling menjanjikan.

Tak heran mulai muncul pula pendapat sejumlah pakar yang menyatakan sektor pertanian bisa menjadi “Penyelamat” ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi ini.

Pertumbuhan positif ini tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba. Perlu telaah dalam mengungkap penyebab sektor pertanian tetap meraih pertumbuhan positif di tengah melemahnya sektor lain.

Menteri Pertanian selaku pejabat teknis dan penanggung jawab sektor pembangunan pertanian sejak awal telah merumuskan serangkaian kebijakan. Salah satunya fokus pada peningkatan produksi pangan dengan stimulus pelaku usaha pertanian, seperti relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, serta mempercepat bantuan sarana dan prasarana serta subsidi pertanian. Menteri Syahrul juga meluncurkan subsidi transport pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sehingga distribusi pangan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya di hulu, Kementerian Pertanian juga berupaya mengoptimalkan industri pertanian di hilir dengan menggerakkan “Pasar Mitra Tani” dan memperbaiki penyerapan produksi pertanian yang ada di seluruh provinsi. Kementerian Pertanian bekerja erat dengan perusahaan rintisan teknologi (*start-up*) yang bergerak di sektor jasa distribusi. Langkah ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau di tengah menurunnya daya beli.

Langkah lain yang dilakukan adalah meluncurkan optimalisasi pekarangan dan lahan melalui kegiatan Pertanian Keluarga dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. P2L adalah sebuah upaya jangka panjang yang berupaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat bahwa teknologi pertanian telah menyediakan alternatif metode budidaya tanaman pangan di lahan yang sempit. Bentuk konkrit P2L di lapangan adalah membangun *awareness* masyarakat terhadap pola budidaya pertanian di perkotaan (*urban farming*). Saat ini semakin banyak rumah tangga perkotaan yang memanfaatkan halaman dan pekarangan rumah mereka untuk bertani.

Faktor lain yang turut mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian adalah kinerja ekspor pertanian yang semakin cemerlang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja ekspor pertanian pada April 2020 mencapai US\$ 0,28 miliar atau tumbuh 12,66% (YoY). Kenaikan ekspor itu didapat dari empat subsektor unggulan, yakni perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Nominal kenaikan bahkan mencapai lebih dari Rp 12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,47% sejak tahun 2019 sampai Maret 2020.

Upaya mengakselerasi ekspor pertanian memang perlu terus dilakukan. Saat ini merupakan momen yang tepat bagi produk pertanian kita memasuki pasar dunia. Para pelaku usaha tani di negara-negara lain tengah mengendorkan produktivitasnya. Bahkan pada semester pertama 2020, sejumlah negara melakukan restriksi ekspor pangan.

Kondisi ini menjadi peluang bagi para insan pertanian nasional untuk mengisi kekosongan stok pangan global. Hal yang harus kita acungi jempol, alih-alih mengendor, para insan pertanian nasional malah semakin kencang berproduksi dan berinovasi sehingga makin banyak produk pertanian kita yang masuk ke pasar mancanegara.

Menjaga Kinerja

Kinerja sektor pertanian yang tetap positif sampai Kuartal II 2020 ini, tentu sangat melegakan, khususnya bagi pelaku dan perumus kebijakan. Namun, di Kuartal III dan IV 2020 terdapat tantangan besar yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga kinerja dan menyiapkan kebijakan antisipatif.

Penopang utama pertumbuhan positif PDB sektor pertanian yang lalu adalah subsektor tanaman pangan. Di kuartal II 2020 ini, subsektor tanaman pangan tumbuh 9,23% (YoY) dan 19.54% (QtQ).

Secara historis dan tradisional, panen raya biasanya jatuh pada bulan Maret. Tetapi di 2020, panen raya bergeser sampai April. Dampak pergeseran panen raya tanaman pangan dan perkebunan, menurut Menteri Syahrul, terlihat di Kuartal II dan memberikan kontribusi yang positif.

Perlu diantisipasi di Kuartal III dan IV, berdasarkan studi analisa statistika inferensial, kontribusi subsektor tanaman pangan ini akan menurun, khususnya di Kuartal IV. Sehingga di Kuartal III dan IV, subsektor peternakan, horti dan perkebunan perlu didorong menjadi motor utama dalam menggerakkan ekonomi di sektor pertanian. Sedangkan di Kuartal IV, subsektor jasa dan industri turunan pertanian yang perlu menjadi fokus pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan prediksi di atas, maka Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan sektor pertanian di semua subsektor.

Kementerian Pertanian tetap berupaya agar senantiasa dekat dan mendukung para petani. Di tengah pandemi, Kementerian Pertanian gencar memberikan bantuan dan pendampingan agar aktivitas pertanian terus memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Produksi pangan harus tetap berjalan lancar dan relatif tidak menemui banyak masalah. Salah satu langkah konkrit pendampingan petani oleh Kementerian Pertanian

adalah KUR sektor pertanian. Program ini memiliki alokasi dana mencapai Rp50 triliun, dan setengahnya telah terserap tahun ini.

Dalam jangka pendek, penyaluran KUR, selain menjaga proses produksi juga diharapkan mampu menangkal dampak pandemi covid-19. Proses pencairan KUR pertanian sudah dimudahkan. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan pengecekan status debitur oleh Bank Indonesia (BI *Checking*). Secara teknis, dalam penyaluran KUR, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada awal semester I 2020, Kementerian Pertanian juga telah mengubah postur anggaran. Perubahan ini menggambarkan fokus Kementerian Pertanian pada peningkatan aspek produksi dan kesejahteraan petani. Pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan Dukungan Pencegahan Penularan covid-19 sebesar Rp. 40,42 miliar serta Pengamanan Ketersediaan Pangan sebesar Rp. 1,46 triliun. Dana sebesar itu dibelanjakan dalam bentuk kegiatan operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, serta bantuan penyerapan gabah, transportasi/angkut distribusi pangan dan pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.

Selain itu revisi anggaran sebesar Rp, 1,15 triliun juga difokuskan pada kegiatan *Social safety net* yang sebagian besar berbentuk padat karya seperti gerakan pengendalian OPT, Olah tanah dan percepatan tanam, rehabilitasi jaringan irigasi, perpipaan dan perpompaan, bantuan benih, penguatan P2L dan lain sebagainya. Dengan menyesuaikan struktur anggaran sebagai langkah awal, diharapkan program seperti bantuan sarana produksi, akselerasi produksi pertanian, program padat karya, dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dapat didorong secara maksimal.

Padat karya menjadi salah satu kunci penting (*key factor*) agar pertumbuhan PDB sektor pertanian tetap berada di zona hijau, khususnya di Kuartal IV 2020. Sebagaimana yang telah diperkirakan, subsektor jasa pertanian dan industri turunannya adalah kontributor dominan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian pada Kuartal IV. Program padat karya diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi pelaku pertanian, di luar periode panen raya.

Mungkin tak banyak disadari, pandemi Covid-19 telah memperkuat nilai tradisional bangsa Indonesia sebagai negeri agraris. Para petani, pekebun, dan peternak yang terus konsisten membudidayakan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan telah membuktikan ketangguhan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kinerja mereka juga

harus didukung dan ditingkatkan melalui kebijakan dan keberpihakan, dalam sistem penyuluhan dan pengaplikasian sistem pertanian cerdas (*smart farming*) berbasis *Internet of Things* (IoT) yang menjadi ruh revolusi industri generasi keempat (4.0).

Bertepatan dengan momentum Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Ke-75, seluruh insan pertanian terus memberi bukti dari baktinya kepada negara yang dilanda pandemi. Terima kasih insan pertanian nasional atas kerja kerasnya. Mari terus bekerja sama dan menjaga semangat demi kemajuan pembangunan Indonesia.

RIWAYAT PENULIS



DR. H. Syahrul Yasin Limpo S.H., M.Si., M.H. adalah anak kedua dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dengan Hj. Nurhayati Yasin Limpo. Syahrul lahir di Ngawing, Makassar pada tanggal 15 Maret 1955.

Syahrul mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1983, serta mendapatkan gelar S2 pada tahun 2004 dan gelar Doktor pada tahun 2008 di Universitas Hasanuddin.

Syahrul memulai karir sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1980, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Tata Kota di Dinas Tata Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada 1982 – 1983, Kepala Sub Bagian Perangkat IV & V pada PD Biro Pemerintah Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada 1983 – 1984, Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa pada 1984-1987, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk I Sulawesi Selatan 1987 – 1988, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk I Sulawesi Selatan 1988 – 1989, Kepala Bagian Urusan Generasi Muda & Olah Raga Setwilda Tk I Sulawesi Selatan 1989 – 1991, dan Sekretaris Wilayah Daerah Tk II Kab. Gowa.

Kemudian Syahrul menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode, dari tahun 1994 – 2002. Kemudian menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam pada tahun 2003 - 2008, Pada tahun 2008, Syahrul terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode.

Seusai menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul sempat menjadi Penasehat Senior Presiden RI Joko Widodo pada awal tahun 2019. Pada 23 Oktober 2019, Syahrul dilantik sebagai Menteri Pertanian RI hingga sekarang.

RIWAYAT PENULIS



Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, menyelesaikan S1 pada Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1998). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dalam bidang Ekonomi dan Pemasaran Pertanian di Graduate School of Agriculture, Saga University, Jepang (2004), dan S3 bidang Ekonomi dan Kebijakan Pertanian di The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University , Jepang (2007).

Sejak bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Indonesia pada tahun 1998, Kuntoro telah banyak melakukan penelitian ekonomi dan kebijakan pertanian dengan topik manajemen rantai pasok, sistem agribisnis, strategi pemasaran dan pengembangan wilayah/pertanian. Berhasil mencapai jenjang Peneliti Utama Tahun 2017 dan Peneliti Madya tahun 2009.

Kuntoro berpengalaman sebagai collaborating scientist, technical consultant, dan project coordinator pada beberapa international project seperti the Indonesian FAO project, Bioversity International Bioversity Internasional (CGIAR Consortium), ILRI (International Livestock Institute), ACIAR (Australia), dan AVRDC (Taiwan) Project Development. Telah banyak menerbitkan tulisan ilmiah pada beberapa international scientific journals di Jepang, Eropa dan and USA, dan menjadi Dewan Redaksi pada beberapa jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Pada beberapa kesempatan juga menjadi pengajar dan penguji tamu untuk program sarjana dan pascasarjana di beberapa universitas Swasta dan Nasional.

Pada tahun 2016, Kuntoro menerima beasiswa IVLP (International Visitor Leadership Program) dari the United States Department of State - Bureau of Educational and Cultural Affairs, untuk berkunjung ke USA. Sebelumnya, pada tahun 2000, menerima penghargaan Yoshinogari Goodwill Ambassador of The Saga Prefecture untuk kerjasama dan pertukaran ilmu dan kebudayaan dari Gubernur Saga Prefecture-Jepang.

Kuntoro sempat menjadi Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Jawa Timur (2014-2015), Kepala LPTP Sulawesi Barat (2016), Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (November 2016-Januari 2018), dan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang (Januari - Maret 2018). Sejak 18 Maret 2018, Kuntoro menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian hingga sekarang.

RIWAYAT PENULIS



Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmud, M.TDev merupakan ahli pada bidang Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Ekologi Politik, Sosiologi Pertanian dan Pedesaan, Manajemen Agribisnis, Kewirausahaan Pertanian. Imam lahir di Raba, pada tanggal 23 Januari 1969 sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara pasangan H. Abd. Majid Azis dan Hj. Fatimah Mulya Majid. Pendidikan Sarjana ditempuh di Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar, lulus pada tahun.1991. Pada tahun 2001 Imam diterima pada program studi Trade and

Development Newcastle University di Australia dan menamatkannya pada tahun 2003. Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor diperoleh pada tahun 2007 pada program studi Sosiologi Pedesaan Institute Pertanian Bogor (IPB) di Bogor.

Imam pernah bekerja sebagai supervisor peneliti pada program Kerjasama CIDA dan Non-Government Organization untuk sejumlah wilayah di Indonesia Timur pada tahun 1991 hingga 1993. Sejak tahun 1994 Imam bekerja sebagai staf pengajar di UNHAS hingga sekarang. Disamping itu, Imam juga memimpin sebuah lembaga riset yakni Institute for Social and Political Economic Issues (ISPEI) sebagai Executive Director sejak 2004 hingga sekarang yang berkedudukan di Makassar. Imam juga dipercaya sebagai Ketua Tim Mediasi Center Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 hingga sekarang, konsultan ahli gubernur Provinsi Sulsel (2008-sekarang) dan sebagai staf ahli Dinas Tanaman Pangan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (2008-sekarang). Dan sejak tahun 2010 hingga sekarang, Imam dipercaya juga sebagai salah satu pimpinan kolektif KAHMI Sulawesi Selatan. Imam saat ini dipercaya menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI dari sejak tahun 2019 hingga sekarang.

